



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



**PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu menyusun rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur periode IV dan disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
- BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperuntukkan sebagai pedoman :

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- b. penyesuaian prioritas pembangunan tahun 2019 kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019; dan
- c. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Pasal 5

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2018



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 18



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKP	I-6
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-39
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-50
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-54
BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2019	III-1
3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-7
3.2 Kerangka Keuangan Daerah	III-12
3.2.1 Penerimaan Daerah	III-12
3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah	III-15
3.2.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-15
3.2.4 Belanja Daerah	III-16
3.2.5 Pembiayaan Daerah	III-17
BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	IV-1
4.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019	IV-3
4.1.3 Tema dan Strategi Pembangunan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-4
4.1.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-7
BAB 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	
5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota	V-1
5.1.1 Arah Pengembangan Kota Samarinda	V-2
5.1.2 Arah Pengembangan Kota Balikpapan	V-3
5.1.3 Arah Pengembangan Kota Bontang	V-4
5.1.4 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara	V-5
5.1.5 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur	V-6
5.1.6 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Barat	V-7
5.1.7 Arah Pengembangan Kabupaten Paser	V-8
5.1.8 Arah Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara	V-9



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
5.1.9 Arah Pengembangan Kabupaten Berau	V-10
5.1.10 Arah Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu	V-11
BAB 6. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII-1
BAB 8. P E N U T U P	VIII-1

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>	
Tabel 2.1	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-3
Tabel 2.2	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-3
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-5
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-10
Tabel 2.5	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Pengeluaran Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)	II-11
Tabel 2.6	Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran Indeks Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-12
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-13
Tabel 2.8	Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016	II-14
Tabel 2.9	Tiga kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2016	II-17
Tabel 2.10	Tiga kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2016	II-18
Tabel 2.11	Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-20
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017	II-21
Tabel 2.13	Persentase Komoditi Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2017	II-21
Tabel 2.14	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-22
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (jiwa)	II-24
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II-26
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-29
Tabel 2.18	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-29
Tabel 2.19	Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II-30
Tabel 2.20	Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-31
Tabel 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-33
Tabel 2.22	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-35
Tabel 2.23	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-36
Tabel 2.24	Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-37
Tabel 2.25	Jumlah Proyek PMA/PMDN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-37
Tabel 2.26	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-38
Tabel 2.27	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017	II-39
Tabel 2.28	Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-40

DAFTAR TABEL

		<u>Halaman</u>
Tabel 2.29	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017 (2012=100)	II-41
Tabel 2.30	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)	II-41
Tabel 2.31	Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	II-42
Tabel 2.32	Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015	II-43
Tabel 2.33	Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.34	Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-45
Tabel 2.35	Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-45
Tabel 2.36	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-46
Tabel 2.37	Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016	II-47
Tabel 2.38	Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-48
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2017	II-54
Tabel 2.40	Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	II-55
Tabel 2.41	Aspek, Fokus, dan Inikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-56
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro	III-7
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019	III-14
Tabel 3.3	Proyeks Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	III-15
Tabel 3.4	Proyeksi Kapasitas Riik Keuangan Daerah Tahun 2019	III-16
Tabel 3.5	Raelisasi dan Target Belanja provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019	III-17
Tabel 4.1	Interpretasi/Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Periode 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur Terhadap sasaran Pokok RJPD Tahap IV	IV-2
Tabel 4.2	Target RKP Tahun 2019 di Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-4
Tabel 4.3	Sasaran RKPD Provisi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-7
Tabel 4.4	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-9
Tabel 5.1	Target Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Usaha Potensial pada Kabupaten/Kota Tahun 2019	V-1
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	VI-3
Tabel 6.2	Penelaahan Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur Tahun 2019	VI-80
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur	VII-2
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	VII-3



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR GAMBAR

		<u>Halaman</u>
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-5
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2035	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016	II-4
Gambar 2.3	Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-4
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-6
Gambar 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (dalam juta rupiah)	II-7
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-8
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017	II-9
Gambar 2.8	Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II-15
Gambar 2.9	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-19
Gambar 2.10	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017	II-22
Gambar 2.11	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-23
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017	II-23
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-25
Gambar 2.14	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-26
Gambar 2.15	Harapan Usia Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-27
Gambar 2.16	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-28
Gambar 2.17	Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-30
Gambar 2.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-32
Gambar 2.19	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-32
Gambar 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-33
Gambar 2.21	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-34
Gambar 2.22	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-36
Gambar 2.23	Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-37
Gambar 2.24	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015	II-39
Gambar 2.25	Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-40
Gambar 2.26	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-42
Gambar 2.27	Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)	II-43
Gambar 2.28	Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II-46
Gambar 2.29	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016	II-47
Gambar 2.30	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-49
Gambar 2.31	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-50
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	III-1
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Tahun Dasar 2010)	III-2
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017	III-3
Gambar 3.4	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2012-2017	III-4
Gambar 3.5	Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2019	III-8
Gambar 4.1	Aspek Utama Tujuan Pembnagunan RPJPD Tahap IV Kalimantan Timur	IV-1



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR GAMBAR

		<u>Halaman</u>
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Rumusan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-5
Gambar 4.3	Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	IV-8
Gambar 5.1	Lokus Penanganan banjir di Sekitar Sungai Karang Mumus dan Deliniasi Areal Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda	V-2
Gambar 5.2	Pengembangan Kawasan Industri Karianganu di Balikpapan dan Pengembangan Jaringan Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Mendukung Konektivitas Kawasan Industri Kariangau	V-3
Gambar 5.3	Pengembangan Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL dan Kawasan Peruntukkan Perikanan di Kota Bontang	V-4
Gambar 5.4	Lokus Bendungan dan Jaringan Irigasi Marangkayu dan Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan Serta Perikanan di Kutai Kartanegara	V-5
Gambar 5.5	Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas KEK MBTK di Kutai Timur	V-6
Gambar 5.6	Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan di Kutai Barat dan Pengembangan Akses Transportasi Dari dan Menuju Pusat-Pusat Produksi	V-7
Gambar 5.7	Areal Pengembangan Food Estate di Kabupaten Paser dan Peruntukkan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan di Kabupaten Paser	V-8
Gambar 5.8	Pengembangan Kawasan Industri Buluminung dan Areal Pengembangan Food Estate di Kabupaten Penajam Paser Utara	V-9
Gambar 5.9	Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya dan Areal Pengembangan Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Berau	V-10
Gambar 5.10	Pembangunan Akses Jalan di Kawasan Perbatasan dan Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Mahulu	V-11



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjamin tercapainya kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dengan tetap menjamin keberlanjutannya. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah ini perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat dipahami sebagai sebuah upaya terencana, baik itu periode 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahun, maupun 1 (satu) tahun, untuk memberdayakan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, politik, infrastruktur dan aspek lainnya) yang berkelanjutan.

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun untuk merinci RPJPD dan RPJMD pada tahun yang bersangkutan. Pasal 263 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD

ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan, dalam hal ini RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Selain itu, RKPD digunakan pula sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

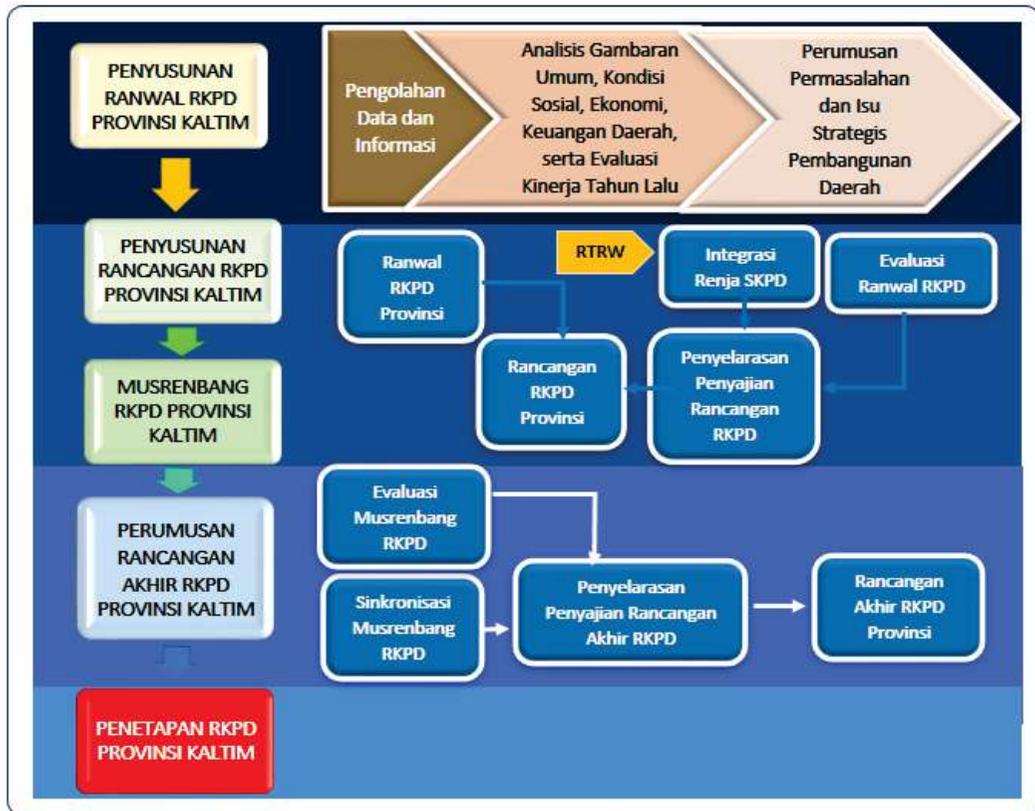
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sangat strategis karena menjadi dokumen perencanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahap III Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Tahap IV Tahun 2018-2023. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2019 merupakan tahapan transisi periodisasi RPJMD IV Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2019-2023) dimana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018 sedangkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2014-2019.

Adapun penyusunan RKPD 2019 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tersebut secara runut tergambar pada bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPd Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

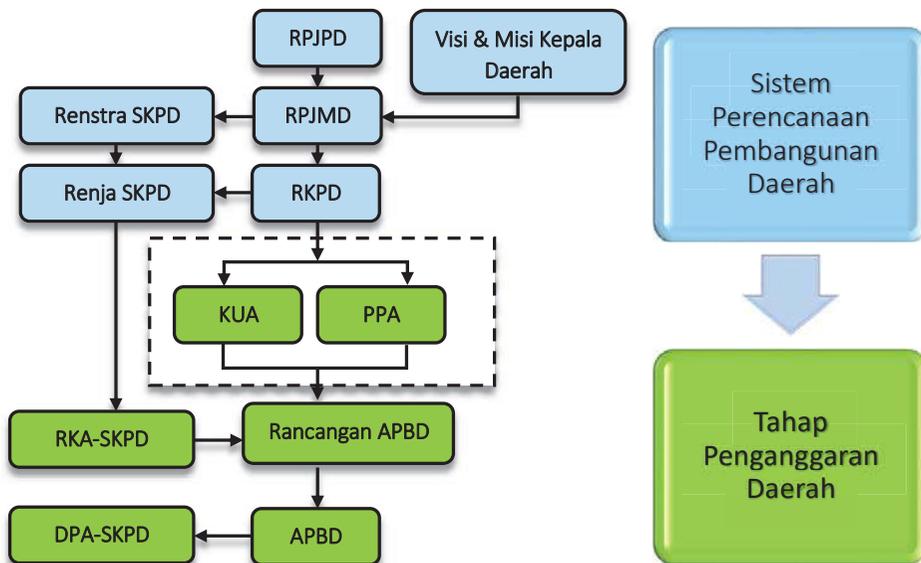
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2019. Tujuan dari penyusunan dokumen RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah mensinkronisasi dan mensinergikan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJMD dan RKPD tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memberikan gambaran kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator makro ekonomi dan keuangan daerah, serta arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang disusun pada tahun 2019.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Menjabarkan kerangka pikir perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang direncanakan oleh provinsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjabarkan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kerangka pendanaan keuangan daerah.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2019 yang meliputi arti penting RKPD Tahun 2019, peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2019 serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi serta keanekaragaman sumber daya alam, baik terbaharukan maupun tak terbaharukan, yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kekayaan sumber daya alam yang terkenal adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbaharukan). Sedangkan SDA terbaharukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, dan pariwisata. Dari sisi letak geografis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

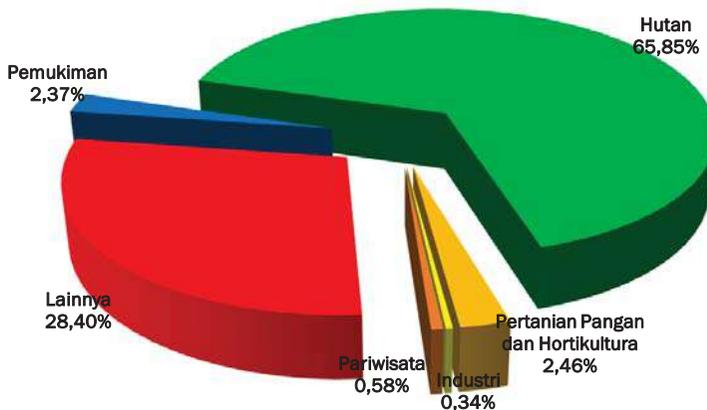
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini

menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur berstatus kawasan hutan dengan luasan mencapai 8.339.153 Ha (65,48%), sedangkan sisanya terbagi untuk kawasan industri seluas 57.176 Ha (0,45%), kawasan pariwisata darat seluas 97.442 Ha (0,77%), kawasan perikanan seluas 187.304 Ha (1,47%), kawasan perkebunan seluas 3.269.561 Ha (25,67%) kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), serta kawasan pertanian pangan, dan hortikultura sebesar 412.096 Ha (3,24%).

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2035



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. (Ditambahkan kaitannya dengan sektor pertanian dan bencana banjir). Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

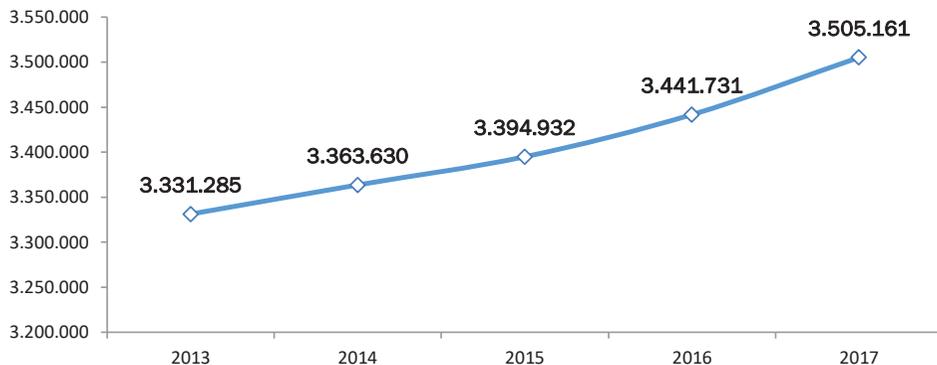
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	23,00	22,30	22,00
	- Maksimum	36,60	35,50	36,20
2	Kelembaban (%)	79,00	82,00	79,00
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,50	1.012,10	1.011,10
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	4,00	4,00
5	Curah Hujan (mm)	2.480,80	2.263,80	3.027,50
6	Penyinaran Matahari (%)	48,00	55,00	49,00

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 3.331.285 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.505.161 jiwa pada tahun 2017.

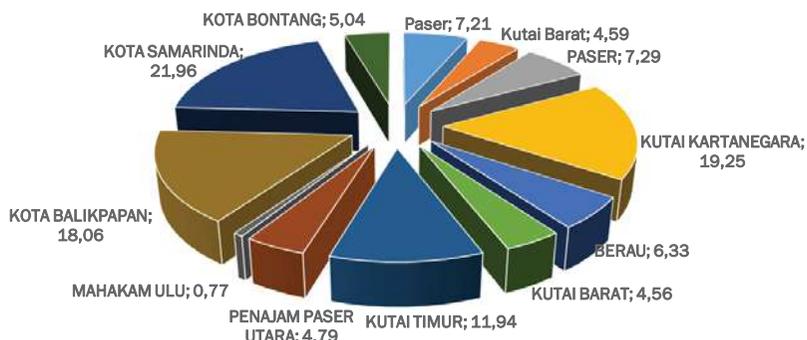
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,96 persen, disusul Kota Balikpapan 18,06 persen, dan disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 19,25 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang paling jarang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,77%), disusul Kabupaten Kutai Barat (4,56 %) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (4,79%).

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mencapai 27,26 jiwa per Km², dengan Kota Samarinda sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.495,39 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

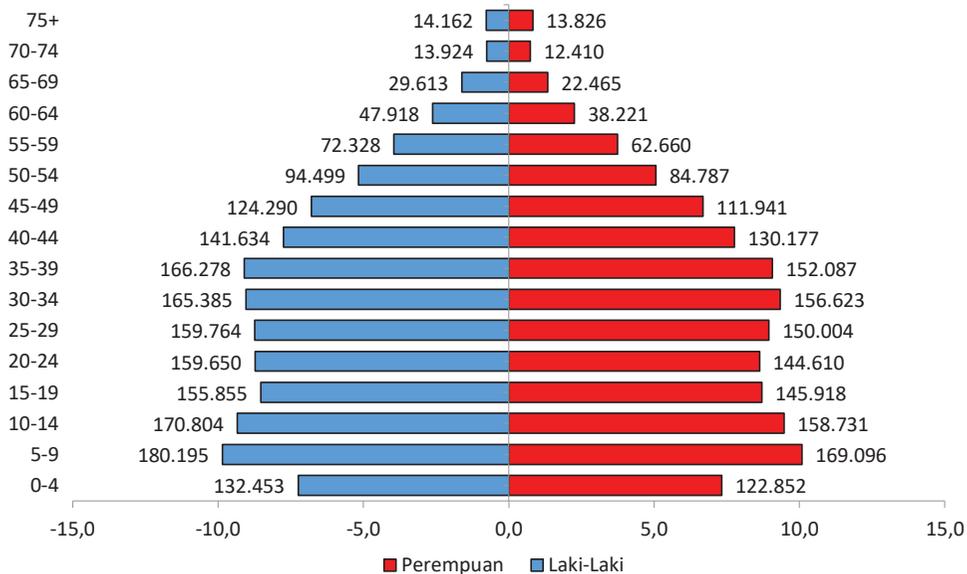
Tabel 2.3
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2014-2017) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	133.192	122.456	255.648	108,77	23,04	1,59
2	Kutai Barat	84.066	75.934	160.000	110,71	11,67	0,61
3	Kutai Kartanegara	353.323	321.436	674.759	109,92	25,96	0,85
4	Kutai Timur	227.826	190.799	418.625	119,41	13,48	0,36
5	Berau	118.392	103.444	221.836	114,45	10,21	1,68
6	Penajam Paser Utara	87.562	80.450	168.012	108,84	57,46	1,58
7	Balikpapan	323.614	309.582	633.196	104,53	1.236,11	1,44
8	Samarinda	394.435	375.197	769.632	105,13	1.074,11	1,41
9	Bontang	92.066	84.449	176.515	109,02	1.081,98	2,26
10	Mahakam Ulu	14.276	12.662	26.938	112,75	1,39	2,6
Kalimantan Timur		1.828.752	1.676.409	3.505.161	109,09	27,52	1,04

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Data sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk data diolah.

Dilihat dari struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun), sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65+). Namun pada tahun 2017 jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan dari sebesar 2,44 juta jiwa ditahun 2016, menjadi sebesar 2,5 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif meningkat dari sebesar 1,00 juta jiwa menjadi sebesar 1,04 juta jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, usia produktif di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sebesar 1,29 juta jiwa bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan usia produktif hanya sebesar 1,17 juta jiwa.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

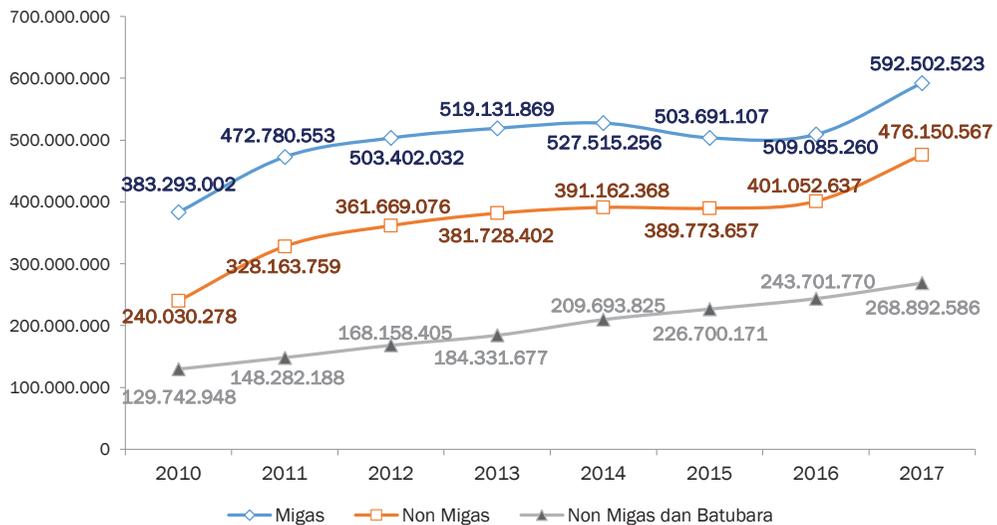
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan besaran output atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan akibat berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

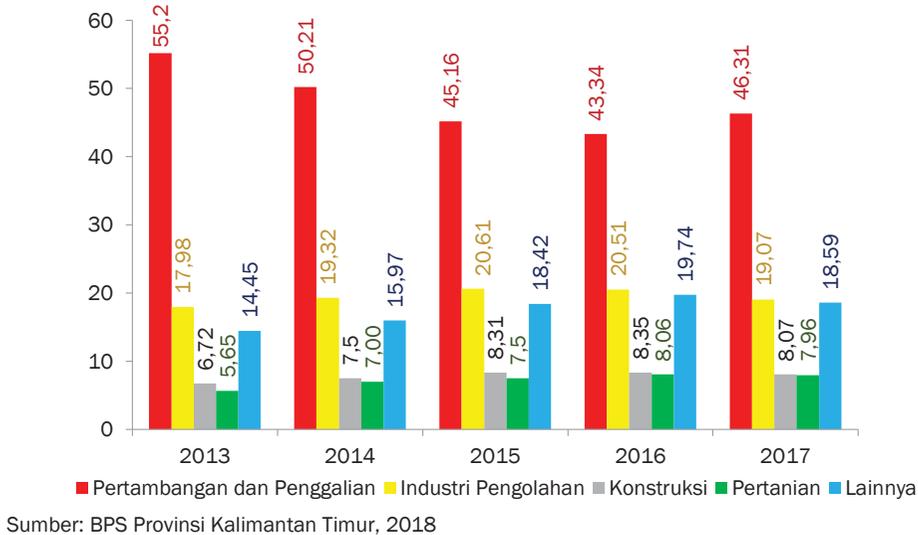


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503,69 triliun. Jika dilihat PDRB Kalimantan Timur non migas maupun PDRB non migas dan batubara pada periode yang sama (2010-2016) mengalami peningkatan. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan gambaran bahwa struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara. Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015.

Seiring membaiknya harga mineral di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 509,09 triliun dan Rp 592,50 triliun diikuti PDRB Kalimantan Timur non migas dan PDRB Kalimantan Timur non migas dan batubara dimana tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)



Berdasarkan grafik di atas, struktur PDRB Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang terlihat dari kontribusinya yang berada di atas 43 persen selama tahun 2013-2017. Di luar Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Lapangan Usaha yang memberi kontribusi cukup besar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertanian.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur. Mengingat migas dan batubara merupakan sumber daya yang akan habis jika dieksploitasi terus menerus, maka perlu adanya sektor lain yang dapat menggantikan perannya.

Dilihat dari kontribusinya, Lapangan Usaha Konstruksi dan Pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat perannya terhadap PDRB Kalimantan Timur.

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian yang cenderung meningkat menjadi harapan dalam mendukung transformasi ekonomi Kaltim. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

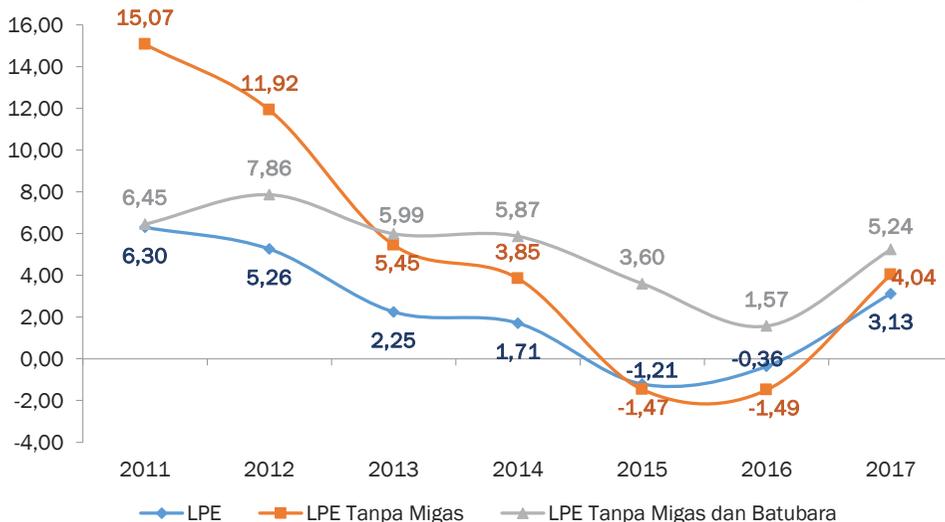
Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat turun di tahun 2015 namun dapat kembali meningkat ditahun selanjutnya. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendorong geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 5,30 persen.

Pembentukan perekonomian daerah masih didominasi oleh kelompok pertambangan dan penggalian yang mencapai 46,31 persen. Artinya, perekonomian Kaltim sangat bergantung pada sumber daya alam tak terbarui. Jika tidak dibarengi dengan pengelolaan perekonomian secara berkelanjutan, hal ini akan menimbulkan gejolak perekonomian di kemudian hari karena tingkat ketergantungan lapangan usaha lainnya juga cukup tinggi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Hal ini mengharuskan kondisi lapangan usaha pertambangan dan batubara harus stabil untuk dapat menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Meskipun harga migas dan batubara pada tahun 2016 mulai membaik, kinerja perekonomian Kalimantan Timur masih belum pulih, meski demikian kontraksi mengecil menjadi sebesar negatif 0,36 persen pada tahun 2016, Namun pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara melambat hanya sebesar 1,57 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas semakin turun menjadi sebesar negatif 1,49 persen. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat tajam menjadi sebesar 3,13 persen bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas sebesar 4,04 persen dan pertumbuhan ekonomi non migas dan no batubara sebesar 5,24 persen.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,78	4,55	0,46	5,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,40)	(4,89)	(3,52)	1,21
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,45	2,66	5,46	3,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	21,24	30,43	8,32	6,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56	6,57	9,05
F	Konstruksi	4,91	6,33	(0,94)	(3,41)	9,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	5,13	1,42	2,74	6,53
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,26	2,76	3,05	7,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,65	5,33	6,79	9,17
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,45	7,66	7,45	8,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05	1,83	(0,61)
L	Real Estate	8,23	8,29	3,59	(0,83)	3,35
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)	(4,25)	3,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	9,29	4,20	(3,25)	(0,23)
P	Jasa Pendidikan	18,74	12,23	9,88	7,33	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	9,03	10,53	9,31	7,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81	9,65	7,98
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,71	(1,21)	(0,36)	3,13

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada Lapangan Usaha utama, pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian selama tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan negatif, bahkan pada tahun 2015 pertumbuhannya turun hingga negatif 4,89 persen akibat anjloknya harga komoditas migas dan batubara yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kaltim. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perbaikan menjadi sebesar 1,21 persen seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas mineral di pasar internasional.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Sementara itu, Lapangan Usaha yang cenderung menurun pertumbuhannya pada tahun 2014-2017 ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Lapangan Usaha Perdagangan, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73.396.422	80.180.287	86.563.224	91.893.346	97.284.575
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.766.360	2.090.681	2.460.192	2.439.025	2.629.573
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.281.615	23.523.174	25.079.715	24.038.344	20.862.788
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.083.647	139.830.348	145.766.484	144.794.384	155.808.229
5	Perubahan Inventori	9.842.942	12.344.421	5.771.866	1.922.887	1.757.926
6	Ekspor Luar Negeri	371.841.805	350.299.172	256.979.357	197.483.435	240.954.920
7	Impor Luar Negeri	110.413.720	119.093.437	88.717.186	65.089.941	69.188.554
8	Net Ekspor Antar Daerah	23.332.798	38.340.611	69.787.455	111.603.781	142.393.061
PDRB		519.131.869	527.515.256	503.691.106	509.085.260	592.502.522

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2013-2014 terus meningkat. Namun pada tahun 2015 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur turun menjadi Rp 503,69 trilyun. Dimana pada tahun tersebut harga migas dan batubara yang menjadi komoditas utama ekspor Kalimantan Timur anjlok sehingga berdampak pada turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada Komponen Ekspor Luar Negeri, dari sebesar Rp 350,30 milyar pada tahun 2014 menjadi hanya sebesar Rp 256,98 milyar pada tahun 2015. Demikian pula nilai PDRB pada Komponen Impor Luar Negeri turun dari sebesar Rp 119,09 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 88,72 milyar pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2015 nilai PDRB pada beberapa komponen pengeluaran mengalami peningkatan seperti pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah.

Pada tahun 2017, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan harga migas dan batubara menjadi sebesar Rp 592,50 trilyun, dimana sebagian besar komponen pengeluaran mengalami peningkatan antara lain Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Komponen Pembentukan

Modal Tetap Bruto, Komponen Ekspor Luar Negeri, Komponen Impor, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Perubahan Inventori mengalami penurunan.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14,14	15,20	17,19	12,79	16,42
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,34	0,40	0,49	21,92	0,44
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,91	4,46	4,98	26,00	3,52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,87	26,51	28,94	12,79	26,30
5	Perubahan Inventori	1,90	2,34	1,15	21,92	0,30
6	Ekspor Luar Negeri	71,63	66,41	51,02	26,00	40,67
7	Impor Luar Negeri	21,27	22,58	17,61	12,79	11,68
8	Net Ekspor Antar Daerah	4,49	7,27	13,86	21,92	24,03
	Net Ekspor LN	50,36	43,83	33,41	26,00	28,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2017 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor Luar Negeri (Ekspor luar negeri dikurang impor luar negeri), disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Jika dilihat pada tabel tersebut, kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri pada tahun 2012-2016 terus menurun. Sementara kontribusi Komponen Net Ekspor Antar Daerah terus meningkat dalam kurun waktu yang sama.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebesar 92,73 persen adalah ekspor bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam). Maka, ketika harga komoditas global sedang berada dalam tren negatif PDRB Kalimantan Timur juga terkena dampaknya terutama pada tahun 2015. Selain itu, pada saat yang sama kuantitas produksi migas dan minerba juga tak bisa digenjut sesuka hati, tergantung permintaan pasar. Ketika permintaan pasar sedikit, penerimaan Kalimantan Timur jadi tidak maksimal.

Sementara itu, kontribusi Komponen Pengeluaran Rumah Tangga cenderung meningkat, namun sedikit menurun di tahun 2017. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan non makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar

negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Selain disribusinya, nilai PDRB pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga meningkat tanpa dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi Kalimantan Timur. Sehingga perilaku konsumsi Rumah Tangga dipandang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang sedang turun.

Perkembangan investasi fisik di Kalimantan Timur dapat diamati dari kontribusi Komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kalimantan Timur. Secara garis besar, kontribusinya semakin meningkat pada tahun 2013-2015, hanya saja pada tahun 2016 dan 2017 sedikit mengalami penurunan akibat turunnya PDRB Kalimantan Timur di tahun 2015. Adapun kontribusi komponen lainnya masih berada di bawah 5 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

No	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,00	5,21	3,63	1,28	0,84	2,54
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,95	25,61	10,90	8,30	-4,04	4,89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,83	9,77	0,17	-7,77	-13,44	(15,28)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,59	1,37	4,70	-1,47	-6,91	3,01
5	Perubahan Inventori	54,53	-18,11	29,35	-35,89	-65,19	(15,85)
6	Ekspor Luar Negeri	1,69	1,80	-7,71	-16,07	-9,88	2,55
7	Impor Luar Negeri	15,76	15,82	0,63	3,49	-12,70	2,51
8	Net Ekspor Antar Daerah	-54,04	-83,01	-	225,50	34,82	7,57
	PDRB	5,26	2,25	1,71	(1,21)	(0,38)	(3,13)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2016 berkontraksi sebesar negatif 0,38 persen, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2015 sebesar negatif 1,21 %. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berfluktuasi mengikuti tren harga migas dan batubara dipasar global, yang dalam hal ini terlihat pada pertumbuhan Komponen Net Ekspor Luar Negeri yang tumbuh negatif terutama pada tahun 2015.

Perbaikan harga komoditas migas dan batubara di tahun 2016 membawa perbaikan pada komponen ekspor luar negeri, namun justru komponen lainnya melambat dan tumbuh negatif. Meski demikian, pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur secara keseluruhan lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih negatif.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Pada tahun 2017, PDRB Provinsi Kalimantan Timur mampu menunjukkan tren positif sebesar 3,13 persen. Menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 7,57 persen, disusul Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,89 persen, Komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan komponen lainnya di bawah 3 persen. Sementara pertumbuhan negatif ditunjukkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar negatif 15,28 persen dan Komponen Perubahan Inventori sebesar negatif 15,85 persen.

Tabel 2.8
Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
1	Paser	35.093.422	36.916.267	39.250.901	38.249.407	37.191.462
2	Kutai Barat	21.500.739	21.956.103	21.442.756	21.316.264	21.989.397
3	Kutai Kartanegara	167.314.214	161.634.301	156.723.064	127.897.432	127.831.314
4	Kutai Timur	92.109.092	98.411.527	95.030.362	93.498.672	94.921.969
5	Berau	24.907.139	28.044.279	29.366.863	30.069.865	30.788.945
6	Penajam Paser Utara	6.437.387	6.981.002	7.589.459	7.423.760	7.557.111
7	Mahakam Ulu	1.526.012	1.573.480	1.778.452	1.948.281	2.105.999
8	Balikpapan	58.695.646	64.292.573	71.622.701	74.273.354	79.650.206
9	Samarinda	41.242.818	44.824.302	48.273.715	50.802.369	52.266.340
10	Bontang	54.511.514	56.278.079	59.055.313	58.502.703	53.935.808

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

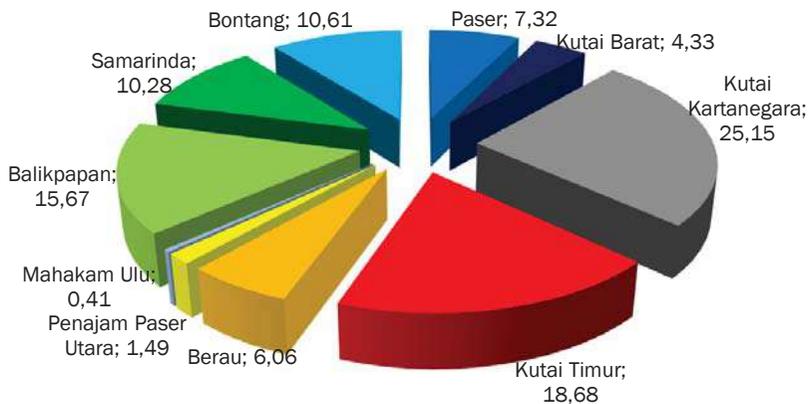
Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2016 menunjukkan grafik kenaikan adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sementara itu, nilai PDRB beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan terutama pada tahun 2015 yaitu Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang.

Meskipun pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2016 mulai membaik, namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang nilai PDRB nya menurun antara lain Kota Bontang, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya menunjukkan peningkatan PDRB yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, maka terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 25,15persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 18,68 persen, dan Kota Balikpapan sebesar 15,67persen. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada

PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen. Besarnya peranan ini berasal dari kekayaan SDA khususnya hasil pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara.

Gambar 2.8
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 18,68 persen yang dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara. Berikutnya Kota Balikpapan yang menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 15,67 persen, sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, meskipun tidak terjadi pergeseran posisi dari ketiga daerah terbesar penyumbang total PDRB Kalimantan Timur tersebut, namun secara besaran kontribusi terjadi penurunan, khususnya kabupaten Kutai Kertanegara pada tahun 2012 memiliki kontribusi cukup besar yaitu 33,24 persen sedang pada tahun 2016 hanya berkontribusi 25,15 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya produksi komoditas migas, dimana Kutai Kertanegara adalah penghasil migas terbesar di Kalimantan Timur. Penurunan produktifitas pertambangan batubara juga memberi dampak pada penurunan kontribusinya terhadap total kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sebagai dampak gejala ekonomi global seiring dengan penurunan yang cukup drastis akan harga komoditas energi (minyak bumi dan batubara).

Berdasarkan peranan kabupaten/kota menurut lima lapangan usaha utama di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada tahun 2016, kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai tambah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Timur adalah Kabupaten

Kutai Kertanegara(37,14 persen), Kabupaten Kutai Timur (33,78 persen), dan Kabupaten Paser (11,91 persen). Secara umum, peranan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terus menurun terhadap total perekonomian Kalimantan Timur, akibat semakin menurunnya produksi migas dari sumur yang sudah tua serta belum ada penambahan eksploitasi sumur-sumur baru. Selain itu, harga komoditas migas dan batubara yang fluktuatif dan tidak menentu memberikan dampak terhadap semakin melemahnya kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Kalimantan Timur.

2. Industri Pengolahan

Secara spasial, kontribusi industri tersebut didukung oleh dua kota yaitu Kota Bontang sebesar 44,91 persen, yang mengandalkan industri LNG dan industri pupuk kimia, serta Kota Balikpapan, sebagai pusat industri kilang minyak bumi, dengan besaran peranan mencapai 37,62 persen. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil, yaitu berada dibawah 5 persen. Namun jika diamati perkembangannya, terlihat bahwa kontribusi industri di beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren meningkat, seperti di kabupaten Kutai Kertanegara, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 4,23 persen menjadi 4,94 persen, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas industri CPO.

3. Konstruksi

Pada tahun 2016, lapangan usaha Konstruksi menyumbang sebesar 8,58 persen terhadap total perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Secara kewilayahan, kontribusi lapangan usaha ini masih didominasi lapangan usaha yang ada di wilayah kota serta wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Yang tertinggi adalah Konstruksi yang ada di Kota Balikpapan, memberikan kontribusisebesar 27,58 persen terhadap total nilai tambah Kontruksi Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh usaha Kontruksi di Kota Samarinda, yang berkontribusi sebesar 24,13 persen, dan Kutai Kertanegara sebesar 24,11 persen. Sedangkan peranan konstruksi di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil atau dibawah tujuh persen.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016, lapangan usaha Kontruksi menunjukkan perlambatan/penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan (realisasi) konstruksi baik oleh pemerintah, melalui belanja modal pembiayaan pembangunan infrastruktur umum, maupun oleh swasta dan masyarakat yang umumnya merupakan dampak ikutan dari penurunan aktivitas pertambangan batubara dan migas. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi yang paling rendah (terkoreksi) dialami oleh usaha Konstruksi di Kabupaten Berau, yang mengalami koreksi sebesar negatif 8,89 persen. Lapangan usaha konstruksi di Kabupaten Paser juga mengalami kontraksi sebesar 5,05 persen, sedangkan kota Samarinda terkoreksi sebesar negatif 3,94 persen. Namun demikian, aktivitas usaha Konstruksi di Kabupaten Mahakam Ulu mampu tumbuh sebesar 7,39 persen dan merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Sebagai wilayah pemekaran yang baru, pembangunan/pengembangan di pada wilayah tersebut masih terus dipacu, khususnya untuk

pembangunan infrastruktur umum, seperti gedung perkantoran, jalan dan lainnya, sehingga berdampak pada kinerja sektor konstruksi yang positif di wilayah tersebut. Usaha konstruksi di Kota Balikpapan juga mengalami laju pertumbuhan pada tahun 2016.

4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2016, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi sebesar 8,06 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Tiga daerah penyumbang terbesar terhadap pembentukan total PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 39,18 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 19,85 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 11,28 persen. Subkategori tanaman perkebunan menjadi penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha Pertanian, dengan produk utama berupa kelapa sawit dan produk tersebut cukup dominan di ketiga kabupaten tersebut. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan lapangan usaha pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit untuk mulai merubah struktur perekonomian dari yang didukung SDA tak terbaharukan menjadi SDA terbaharukan.

5. Perdagangan

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor umumnya identik dengan pusat perdagangan dan niaga yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pola umum persebaran usaha tersebut juga terlihat di Kalimantan Timur, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkonsentrasi di kota Samarinda dengan distribusi sebesar 28,98 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur. Peranan lapangan usaha Perdagangan di Kota Balikpapan juga cukup tinggi dalam menyumbang nilai tambah Perdagangan se-Kalimantan Timur, yaitu mencapai 24,10 persen. Usaha Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan peranan sebesar 16,80 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.9
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	71,31	Pertanian	12,56	Industri	4,51
Kubar	Pertambangan	46,95	Pertanian	15,20	Konstruksi	12,20
Kukar	Pertambangan	64,68	Pertanian	12,70	Konstruksi	8,23
Kutim	Pertambangan	79,23	Pertanian	8,67	Industri	2,98
Berau	Pertambangan	60,36	Pertanian	11,38	Transportasi	5,91
Penajam PU	Pertambangan	29,78	Pertanian	21,42	Industri	16,57
Mahulu	Pertanian	77,23	Pertambangan	7,68	Konstruksi	5,26
Balikpapan	Industri	47,62	Konstruksi	15,10	Transportasi	11,97
Samarinda	Konstruksi	20,14	Perdagangan	15,77	Pertambangan	12,45
Bontang	Industri	83,96	Konstruksi	4,80	Perdagangan	2,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Pada tahun 2016, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi andalan. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi perekonomian Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,23 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara. Peranan aktivitas tambang batubara di Kutai Timur memberikan kontribusi sebesar 71,58 persen terhadap total PDRB wilayah tersebut.

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 71,31 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara, hingga mencapai 66,06 persen dari total PDRB Kabupaten Paser. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,68 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya, dengan masing-masing kontribusi yang diberikan terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 32,95 persen, 28,98 persen, dan 2,75 persen.

Tabel 2.10
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,86	PMTB	18,40	K. Ruta	14,29
Kubar	PMTB	38,67	Net Ekspor	34,77	K. Ruta	16,65
Kukar	Net Ekspor	49,11	PMTB	34,33	K. Ruta	12,47
Kutim	Net Ekspor	70,79	PMTB	18,97	K. Ruta	7,12
Berau	Net Ekspor	58,79	PMTB	22,34	K. Ruta	13,36
Penajam PU	K. Ruta	42,58	PMTB	33,60	K. Pemerintah	13,26
Mahulu	Net Ekspor	40,24	PMTB	23,86	K. Ruta	22,55
Balikpapan	PMTB	41,31	K. Ruta	27,38	Net Ekspor	26,57
Samarinda	K. Ruta	47,68	PMTB	39,01	K. Pemerintah	14,85
Bontang	Net Ekspor	77,74	PMTB	10,74	K. Ruta	9,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, enam kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu dan Bontang. Sedangkan dua kabupaten lainnya didominasi oleh PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dua kabupaten lainnya Balikpapan dan Kutai Barat didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB.

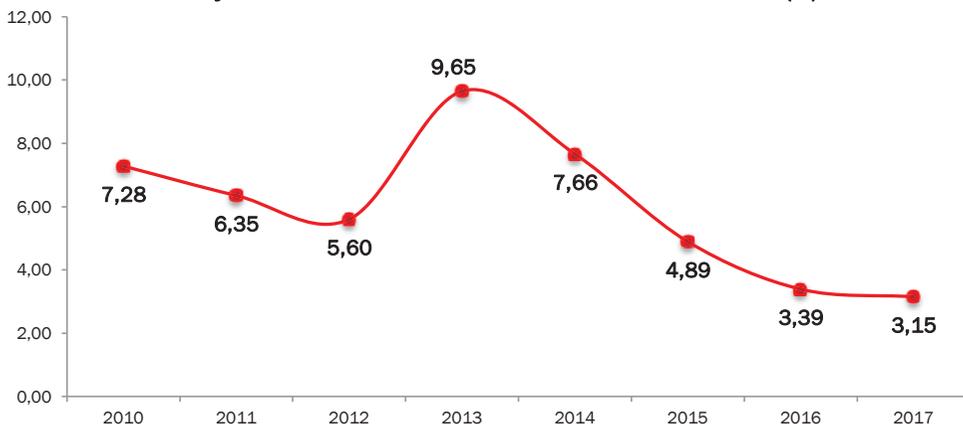
A. Laju Inflasi

Inflasi, dalam ilmu ekonomi, merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Gambar 2.9
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada tahun 2017 kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar negatif 0,24 persen terutama terjadi pada komoditas bumbu-bumbuan dengan deflasi negatif 23 persen, kacang-

kacangan negatif 3,99 persen, serta padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya yang juga mengalami penurunan harga hingga negatif 0,05 persen.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.11
Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2017 (persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02
2017	3,69	2,45	3,15	3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Kota Samarinda pada tahun 2017 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,69 persen, dan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Balikpapan sebesar 2,45 persen. Menariknya, jika dirinci berdasarkan komoditas barangnya maka Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur sama – sama mengalami deflasi cukup tinggi pada komoditas bumbu-bumbuan dan kacang-kacangan. Sehingga terdapat fenomena yang serupa pada kelompok ini. Distribusi barang dan jasa memegang peranan penting dalam hal ini, mengingat sebelumnya andil inflasi pada kelompok bahan makanan sangat tinggi pada kenaikan harga-harga komoditas lainnya. Dan tentunya hal ini akan berkaitan dengan pendapatan para petani di Kalimantan Timur jika harga komoditasnya turun maka akan berkurang pula pemasukan bagi mereka, sudah tentu ini akan berimbas pada kesejahteraan mereka.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur

sebanyak 324.800 orang (11,04%), tahun 2008 turun menjadi 286.440 orang (9,51%), pada tahun 2009 berjumlah 239.220 (7,73%) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 220.170 jiwa (6,19%) meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi akan tetapi dari sisi persentase terus mengalami penurunan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2015 – Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 15,7 persen, yaitu dari Rp 473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 548.094,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2017 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, empat komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras dan mie instan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

**Tabel 2.12
Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017**

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

**Tabel 2.13
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2017**

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	24,98	Beras	26,44
2	Rokok Kretek Filter	17,25	Rokok Kretek Filter	21,74
3	Telur ayam ras	5,79	Telur ayam ras	4,78
4	Daging ayam ras	4,99	Gula Pasir	4,29

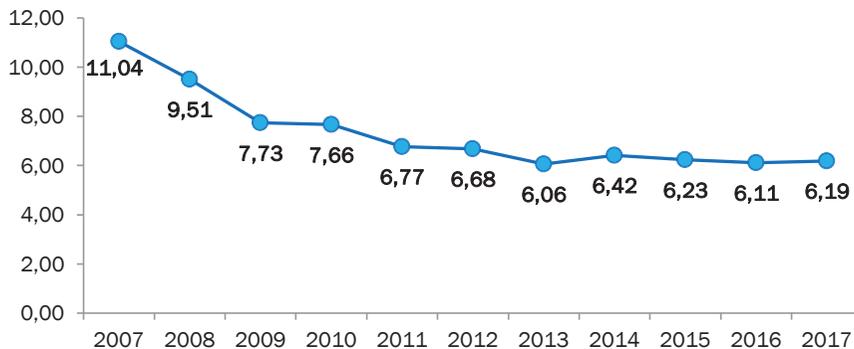


GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
5	Mie Instan	4,54	Daging ayam ras	4,03
6	Gula Pasir	3,68	Mie Instan	4,00
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,07	Cabe rawit	3,04
8	Kue basah	2,98	Kue Basah	2,84
9	Cabe Rawit	2,89	Bawang merah	2,72
10	Bawang merah	2,56	Tongkol/Tuna/Cakalang	1,88
11	Tempe	2,40	Tempe	1,82
12	Tahu	2,07	Roti	1,80
13	Bandeng	1,97	Bandeng	1,57
14	Susu Kental Manis	1,92	Tahu	1,51
15	Susu Bubuk	1,69	Kopi Bubuk & kopi instan (sachet)	1,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Gambar 2.10
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017 (persen)



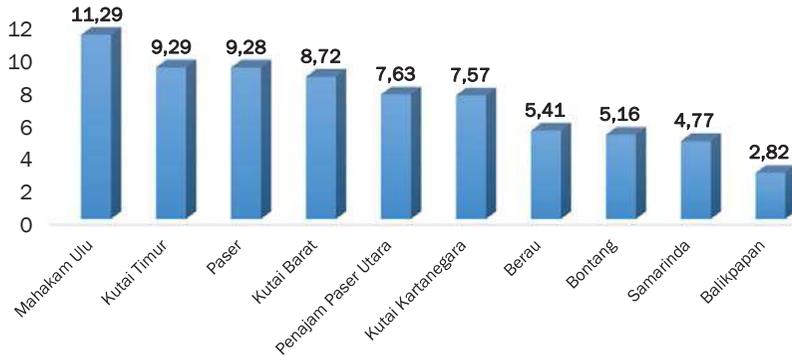
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Paser	9,48	7,91	7,64	7,94	7,87	8,64	8,68	9,28
2	Kutai Barat	9,9	8,25	8,28	7,7	7,53	8,13	8,65	8,72
3	Kutai Kartanegara	8,68	7,21	6,94	7,52	7,43	7,58	7,63	7,57
4	Kutai Timur	11,38	9,43	8,77	9,06	9,1	9,55	9,16	9,29
5	Berau	6,6	5,46	5,24	4,83	4,76	5,11	5,37	5,41
6	Penajam Paser Utara	10,46	8,67	8,57	7,7	7,56	7,62	7,49	7,63
7	Balikpapan	4,07	3,39	3,3	2,48	2,46	2,78	2,81	2,82
8	Samarinda	5,21	4,31	4,18	4,63	4,56	5,25	4,72	4,77
9	Bontang	6,67	5,40	5,2	5,16	5,1	5,74	5,18	5,16
10	Mahakam Ulu						9,9	10,65	11,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (persen)

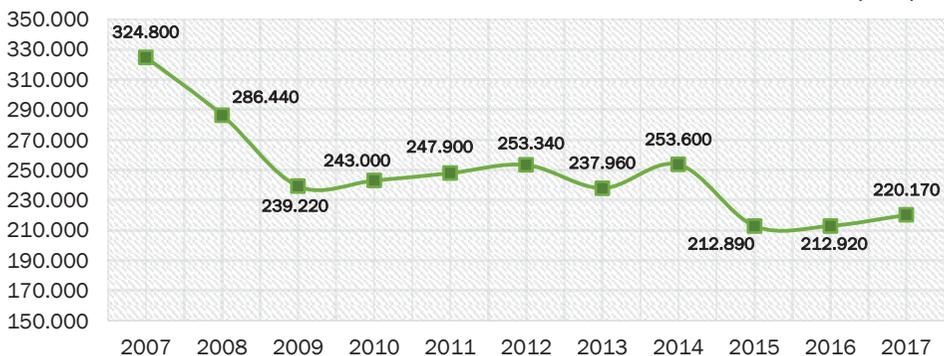


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada grafik dan tabel di atas terlihat bahwa di beberapa kabupaten/kota justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai angka 11,29 persen dan terendah berada di Kota Balikpapan dengan angka 2,82 persen. Walaupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 10,64 persen pada tahun 2017, namun dilihat menurut kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Permasalahan utama yang dihadapi kabupaten terkait kemiskinan adalah masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Secara absolut, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Paser meningkat 9,19 persen dari tahun 2017 dan Kabupaten Mahakam Ulu meningkat 6,60 persen dibanding tahun 2016.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (jiwa)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Paser	21.964	19.100	19.000	20.144	20.340	22.510	23.170	25.300
2	Kutai Barat	16.428	14.300	14.200	13.204	12.920	11.820	12.650	12.800
3	Kutai Kartanegara	54.400	47.300	47.100	52.143	52.530	54.100	55.820	56.570
4	Kutai Timur	28.916	25.300	25.200	27.174	28.300	30.320	30.170	31.950
5	Berau	11.847	10.300	10.300	9.690	9.770	10.760	11.470	11.860
6	Penajam Paser Utara	14.930	13.000	12.900	11.694	11.580	11.700	11.660	12.000
7	Balikpapan	22.746	19.800	19.700	14.918	15.020	17.100	17.550	17.860
8	Samarinda	37.847	32.900	32.800	36.605	36.650	42.800	38.950	40.010
9	Bontang	9.396	8.100	8.100	8.153	8.210	9.100	8.600	8.750
10	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	2.670	2.880	3.070

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

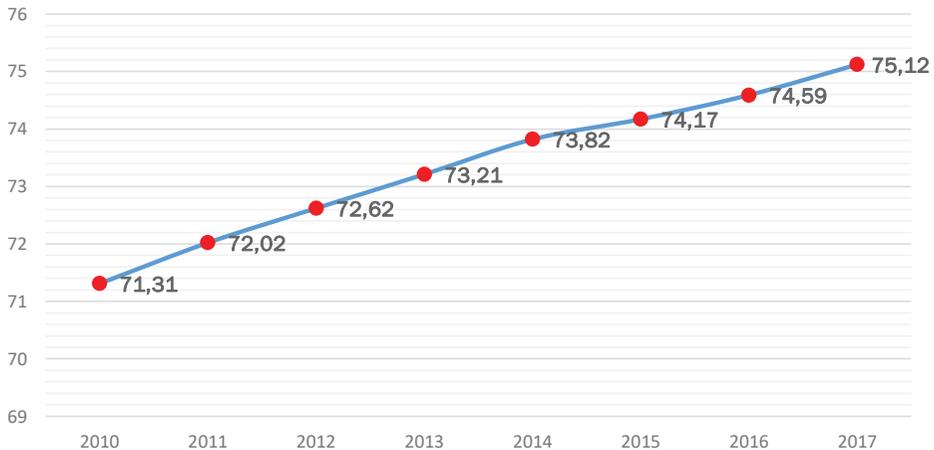
Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang

pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 75,12 pada tahun 2017. Selama periode 2010 hingga 2017 IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Walaupun pembangunan manusia di tahun 2017 berhasil mengalami percepatan, jika diamati sepanjang periode 2011-2015, terdapat kecenderungan perlambatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional.

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan dengan IPM tertinggi adalah di Kota Bontang yang mencapai 79,47, diikuti oleh Kota Samarinda dengan IPM 79,46, dan Kota Balikpapan ditempat ketiga (79,01). Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 73,56 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 66,09.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,05	12,98	8,20	10.280	71,16
2	Kutai Barat	72,37	12,82	8,06	9.532	70,18
3	Kutai Kartanegara	71,68	13,56	8,83	10.692	72,75
4	Kutai Timur	72,51	12,48	9,06	10.273	71,91
5	Berau	71,44	13,29	8,96	11.843	73,56
6	Penajam Paser Utara	70,82	12,53	7,95	11.126	70,59
7	Mahakam Ulu	71,25	12,47	7,68	7.364	66,09
8	Balikpapan	73,97	13,75	10,55	14.254	79,01
9	Samarinda	73,71	14,64	10,34	14.175	79,46
10	Bontang	73,72	12,88	10,70	16.271	79,47

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

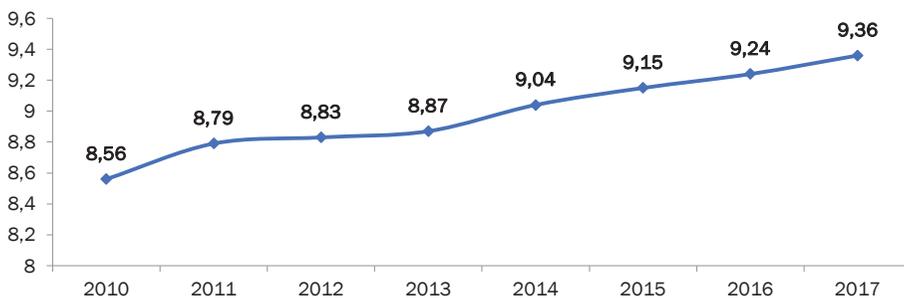
B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir (2017) mencapai 9,36 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

Gambar 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)



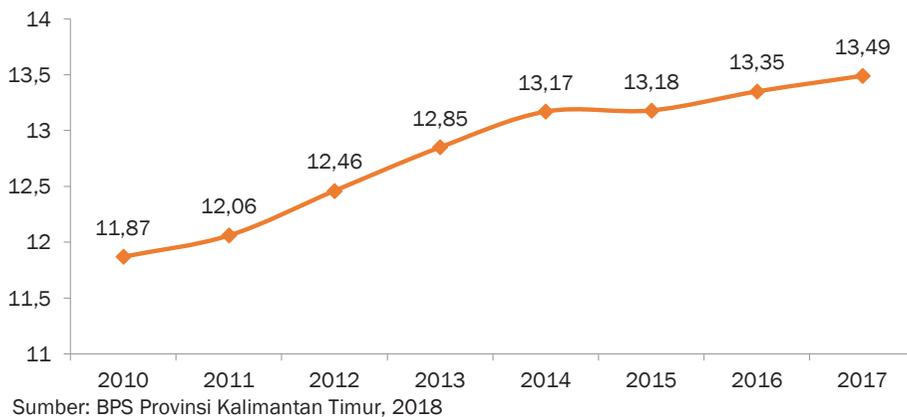
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,49 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Perguruan Tinggi Semester 3. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

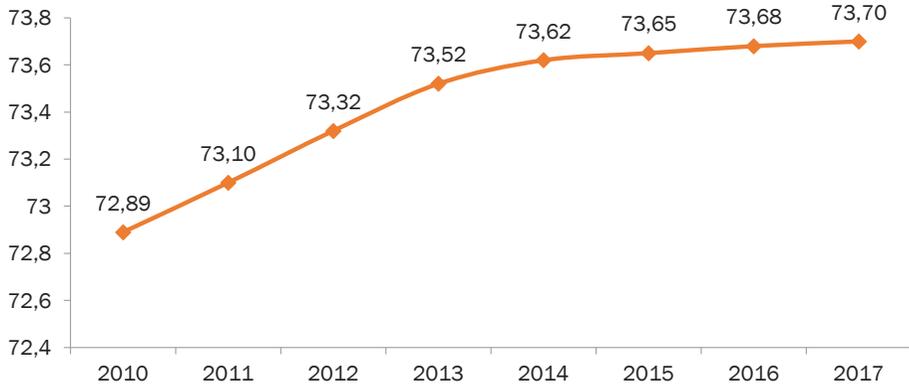
Gambar 2.15
Harapan Usia Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)



C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 mencapai 73,68 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 73,70 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2017 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami *trend* kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah						
Usia Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7-12	97,50	97,50	97,60	99,63	99,54	99,67
13-15	89,00	89,00	89,00	97,92	98,18	98,79
16-18	74,00	74,00	74,24	80,68	80,81	81,32
Angka Partisipasi Kasar						
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	107,76	107,57	111,04	112,61	113,76	108,07
SLTP	93,24	91,06	91,49	97,90	97,78	91,46
SLTA	80,08	82,21	85,54	90,31	87,93	99,51
Angka Partisipasi Murni						
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	94,37	95,91	96,70	97,00	97,13	97,43
SLTP	74,37	76,10	78,73	79,06	79,20	79,58
SLTA	59,75	62,22	67,03	67,78	67,92	68,23

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2017

1) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.18
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	358.727	20.424	17,56	217,02
Swasta	203	53.896	2.910	18,52	265,50
MI	122	23.122	1.419	16,29	189,52
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	426	126.158	7.424	16,99	296,15
Swasta	186	30.208	1.938	15,59	162,41
MTs	151	26.888	1.941	13,85	178,07
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	61.404	3.511	17,49	454,84
Swasta	75	10.880	746	14,58	145,07
MA	61	9.111	787	11,58	149,36
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	86	43.297	2.905	14,90	503,45
Swasta	130	27.649	1.783	15,51	212,68

Keterangan : *) Data tahun 2016

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim dan Kanwil Kemenag Wilayah Kaltim

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 perguruan tinggi dan 45 akademi, baik negeri maupun swasta, sebagai bagian dari sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa yang terdaftar di berbagai akademi dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 95.642 mahasiswa.

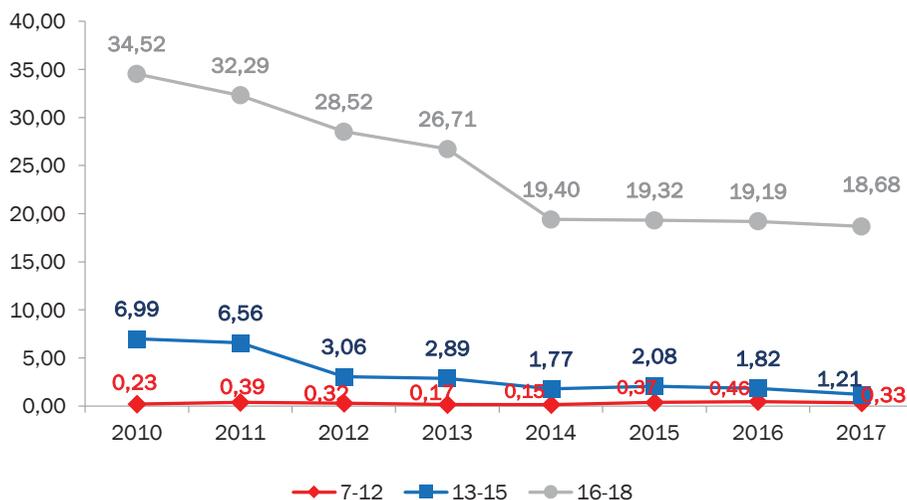
Tabel 2.19
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kategori	Jumlah PT/Akademi	Jumlah Fakultas/Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi			
Negeri	2	22	41.690
Swasta	7	11	24.882
Akademi			
Negeri	5	24	6.117
Swasta	40	0	22.953
Jumlah	54	57	95.642

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2017

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2016, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berhasil mencapai 0,18 persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 1,15 persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) mencapai 1,23 persen.

Gambar 2.17
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.20
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit	48	48	45	46	47	47
2	Tempat Tidur RS	4.538	4.538	4.745	4.873	6.154	
3	Rumah Sakit Swasta	14	16	20	16	16	16
4	Dokter Umum	794	1.007	908	1.113	1.035	1.114
5	Dokter Gigi	262	290	294	335	323	320
6	Dokter Spesialis	276	569	354	347	583	678
7	Tenaga Medis RS	471	1.341	1.195	1.189	1.186	
8	Perawat RS	1.627	3.791	3.027	6.893	7.178	6.662
9	RS Bersalin	13	14	18	10	10	10
10	Puskesmas	172	186	180	180	180	186
11	Pustu	568	576	661	689	669	714
12	Dokter Puskesmas	513	396	607	607	714	
13	Pedagang Besar Farmasi	41	44	46	44	45	47
14	Apotek	371	398	435	561	524	524
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	79,48	90,86	88,76	91,26	90,12	

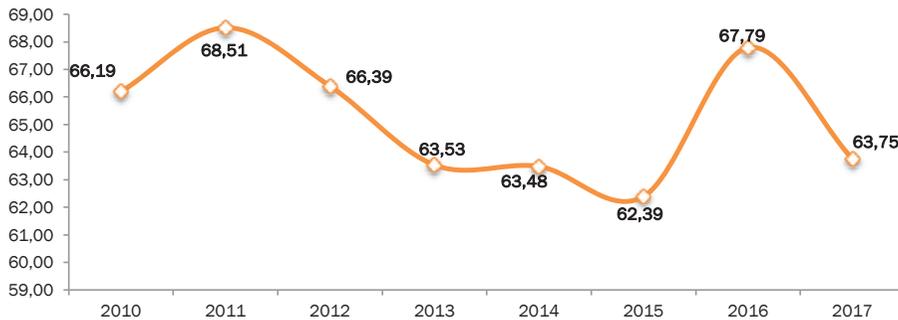
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan yang cukup

signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 63,75 persen pada tahun 2017. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Gambar 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Gambar 2.19
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (%)



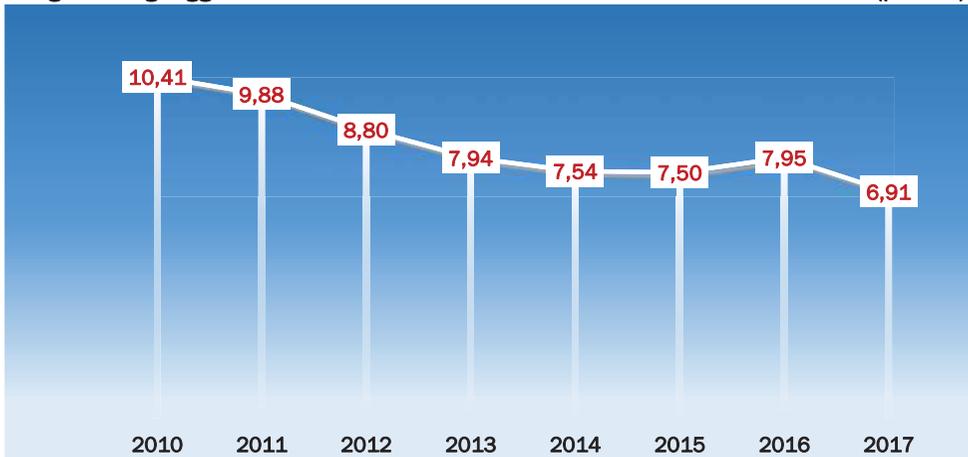
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Pada tahun 2017, hampir semua penduduk angkatan kerja memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 9 (sembilan) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran

mencapai 25,23 persen, diikuti oleh sektor pertanian yang mencapai 21,32 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Minum mencapai 0,43 persen.

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,91 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
1	Paser	6,82	8,41	10,18	9,25	6,69	9,06	5,54
2	Kutai Barat	7,97	9,11	8,23	8,03	6,84	11,7	5,87
3	Kutai Kartanegara	11,53	7,68	7,89	7,37	7,65	10,22	5,72
4	Kutai Timur	12,71	9,41	6,49	6,09	5,65	5,14	4,61
5	Berau	9,33	8,21	5,79	5,85	10,05	5,72	6,45
6	Penajam Paser Utara	9,78	8,44	7,53	7,97	7,52	7,28	4,75
7	Balikpapan	11,76	12,14	8,95	7,95	7,56	5,95	10,39
8	Samarinda	9,22	10,9	9,71	8,57	7,56	5,61	6,19
9	Bontang	12,77	12,44	14,32	11,19	9,38	12,07	12,44
10	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	4,75	9,05

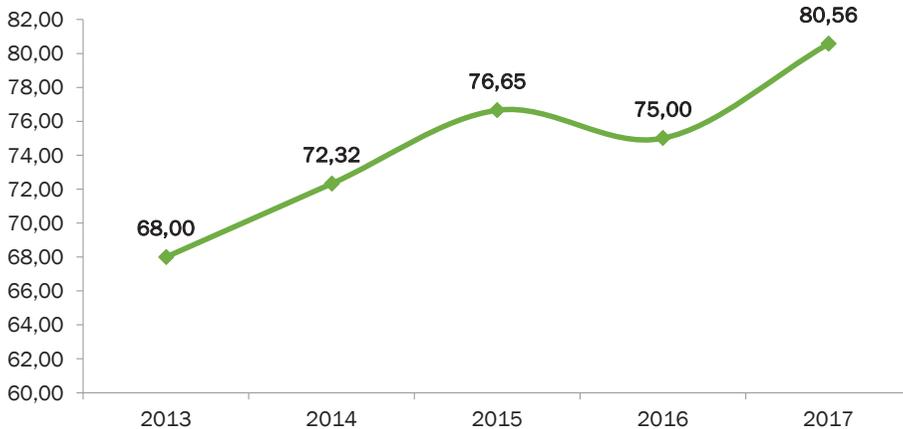
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.21
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

Pada tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 80,56 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (75,00). Meskipun begitu, secara series indeks ini mengalami kenaikan dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu dirumuskan kembali berbagai program dan kegiatan baru terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah di Kalimantan Timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan di berbagai bidang.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan 2016. Sempat terjadinya penurunan status opini BPS ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan

monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Produksi padi pada tahun 2017 mengalami kenaikan, baik itu secara luas panen maupun total produksi padi. Pada tahun 2017, total produksi padi mencapai 649.360 ton dengan luas panen 94.150 ha dan produktivitasnya 6,90 ton/ha.

Tabel 2.22
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2010	110.288	459.477	4,17
2011	100.826	425.505	4,22
2012	101.960	424.670	4,17
2013	102.912	439.439	4,27
2014	100.262	426.567	4,26
2015	99.209	408.782	4,12
2016	80.343	305.337	3,80
2017*)	94.394	400.040	4,24

*) Angka Ramalan I,

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim, 2017

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,17 juta ha dan memiliki produksi mencapai 5,77 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 58 ribu ton pada tahun 2016. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.23
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017*)

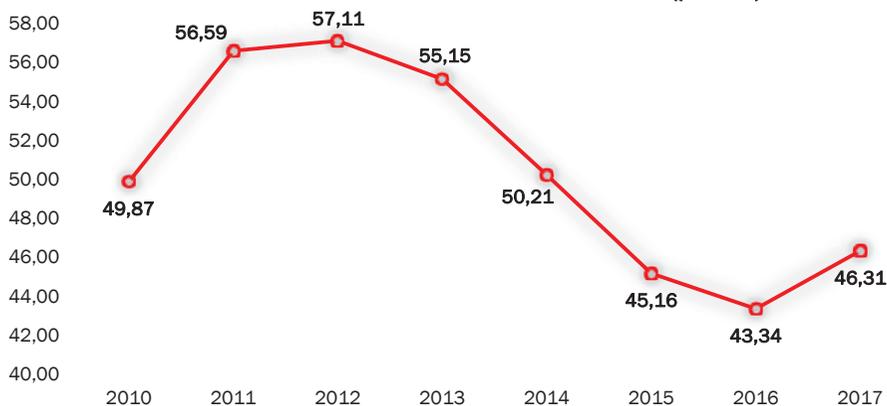
No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	116.542	37.861	0,77
2.	Kelapa	21.739	7.416	0,45
3.	Kopi	2.893	161	0,12
4.	Lada	9.055	1.753	0,27
5.	Kakao	7.902	1.146	0,23
6.	Kelapa Sawit	1.173.944	5.768.954	75,00

*) Angka Sementara; Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Perkebunan, 2017

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

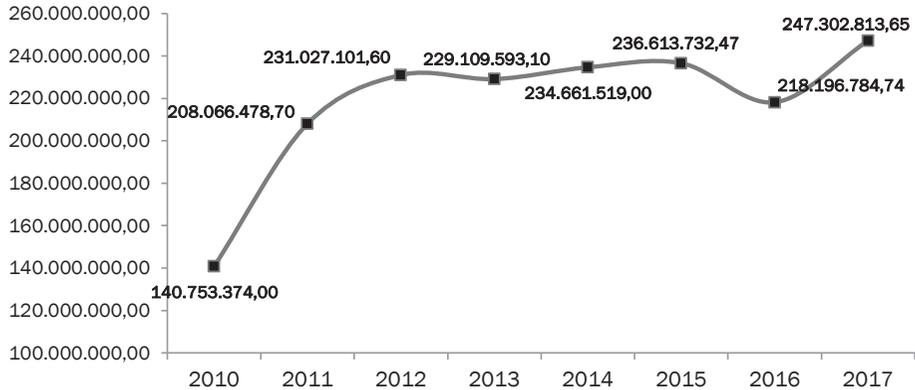
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga tahun 2016 kontribusi menurun hingga mencapai 43,34 persen. Nilai PDRB pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat. Kelesuan ini bisa jadi karena gejala perekonomian global sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. Kemudian, nilai PDRB pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2017, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali menunjukkan peningkatan mencapai 46,312 persen.

Gambar 2.22
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Gambar 2.23
Produksi Pertambangan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Ton)



Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

Tabel 2.24
Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Batubara (Ton)	Amoniak (Ton)	Urea (Ton)	Minyak Bumi (Ribuk Barrel)	Gas Bumi (Ribuk MMBTU)
2010	178.450.014,11	1.825.106,00	2.887.285,00	56.791,01	1.045.503,66
2011	208.066.478,72	1.745.336,00	2.793.766,00	53.023,68	911.529,96
2012	231.027.101,60	1.905.389,00	3.008.267,00	47.436,40	822.229,47
2013	229.109.593,05	1.939.081,00	3.007.632,00	42.983,64	713.549,85
2014	234.661.519,00	2.433.945,00	1.125.544,00	35.207,46	605.579,00
2015	236.613.732,47	1.087.077,00	3.019.349,00	36.605,80	609.744,52
2016	218.196.784,74			34.323,80	568.588,80
2017*)	247.302.813,65			8.083,25	137.643,43

Ket: *) Angka Sementara; Karena Pelimpahan Data Amoniak dan Urea dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Disperindagkop pada tahun 2016 sehingga data belum tersedia karena pelimpahan tersebut. Sumber : Sidata Kaltim; Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2017

C. Jumlah Investor Berskala Nasional Dan Internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.25
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	PMDN	PMA	Total
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160
2013	236	313	549



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Tahun	PMDN	PMA	Total
2014	48	54	102
2015	124	36	160
2016	317	43	360
2017	625	62	392

Sumber: DPMTSP Kalimantan Timur, 2017

D. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Internasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi baik dalam negeri maupun investor asing mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

	PMDN			
	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10
2016	317	56.221.706,80	243	6.885.124,60
2017	625	50.052.325,60	357	10.980.216,40
	PMA			
	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30
2016	43	7.876.807,30	471	1.181.859,20
2017	62	2.260.536,80	566	1.285.215,20

Sumber: DPMTSP Kalimantan Timur, 2017

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017

PMDN								
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825	29.023	9.236
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143	243	357
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6	119,44	25,87
PMA								
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230	22.204	15.508
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420	471	566
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69	47,14	27,40

Sumber: DPMPSTP Kalimantan Timur, 2017

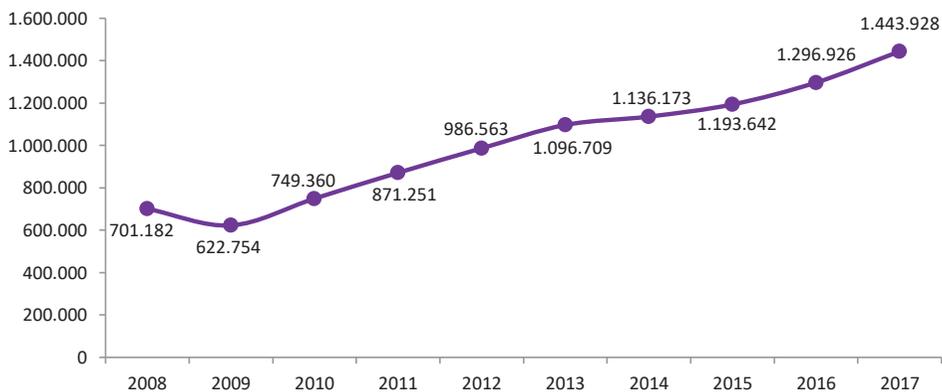
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Gambar 2.24
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2017 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

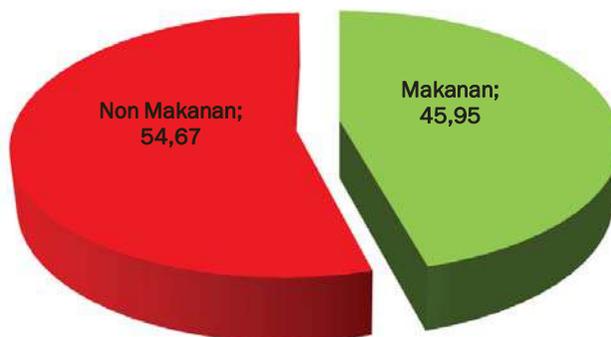
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.28
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	535.643	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,29	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Gambar 2.25
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.29
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117,00	120,03	121,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66	122,30	125,53
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 103,88 pada tahun 2017 turun jika dibandingkan tahun sebelumnya (104,78). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,45 dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (92,03).

Tabel 2.30
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2016	2017	
NTP Gabungan		98,14	97,60	-0,55
1.	Tanaman Pangan	96,61	95,18	-1,48
2.	Hortikultura	92,03	92,45	0,46
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	-2,75
4.	Peternakan	104,78	103,88	-0,86
5.	Perikanan	99,89	101,37	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Tabel 2.31
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

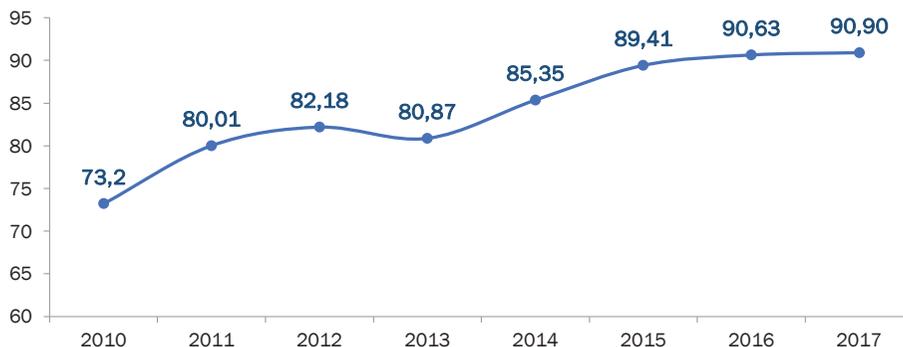
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai 90,90 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

Gambar 2.26
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

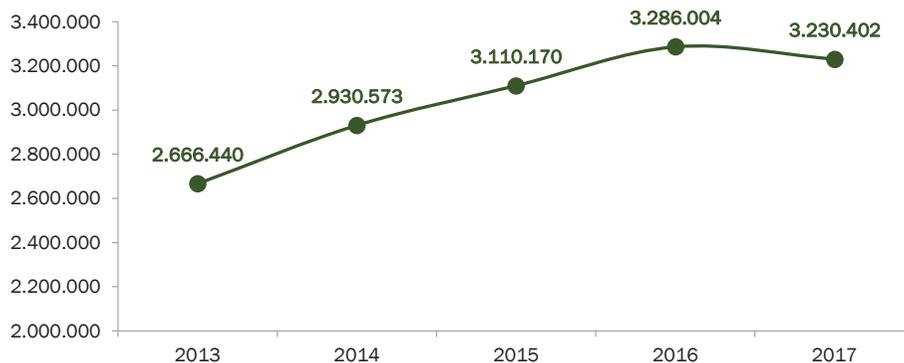
Tabel 2.32
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

Gambar 2.27
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Tabel 2.33
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	tangga yang terjual (MWh)					

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat - Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum untuk karakteristik infrastruktur perhubungan yakni jalan, baik yang berstatus Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	STATUS	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.490,49	0,00	4,30	216,11
2	Provinsi	831,03	106,30	52,53	191,59
3	Kabupaten/Kota*)	2.161,93	3.284,47	3.505,80	747,38
TOTAL		4.483,45	3.390,77	3.562,63	1.155,08

Catatan : *) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.35
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	81,59	1.529,65	65,41	34,26
2	Provinsi	521,59	41,90	288,71	246,14
3	Kabupaten/Kota*)	3.875,80	2.004,36	2.054,91	1.805,59
TOTAL		4.478,98	3.575,91	2.409,03	2.085,99

Catatan : *) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. "Pekerjaan Rumah" inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.36
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

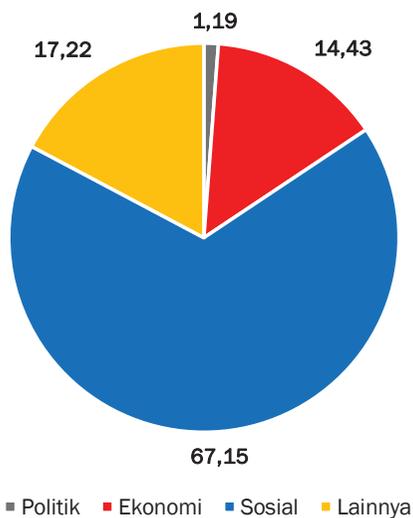
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

Sumber: Polda Kaltim 2017

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

Gambar 2.28
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

Tabel 2.37
Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

Tahun	Jenis Demo				Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	Lainnya	
2011	3	110	220	333	666
2012	3	149	254	406	812
2013	5	182	136	323	646
2014	19	224	189	432	864
2015	14	141	197	95	352
2016	9	109	507	130	755

Sumber: Polda Kaltim, 2017

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,24 pada tahun 2015. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Gambar 2.29
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

D. Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 238 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 9,96 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.793 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 397 proyek sebesar 0,97 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.335 orang.

Tabel 2.38
Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	238	9.955.629,80	5.793	397	970.414,70	13.335

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

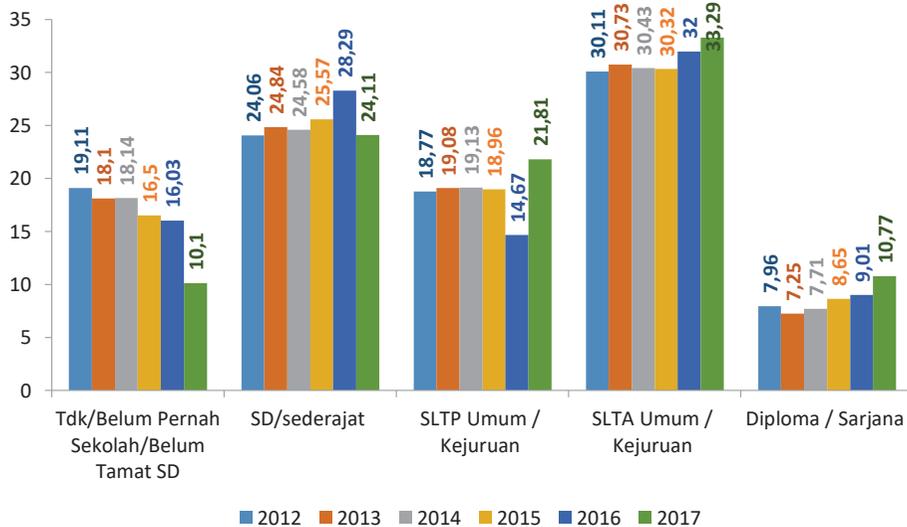
A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.30
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

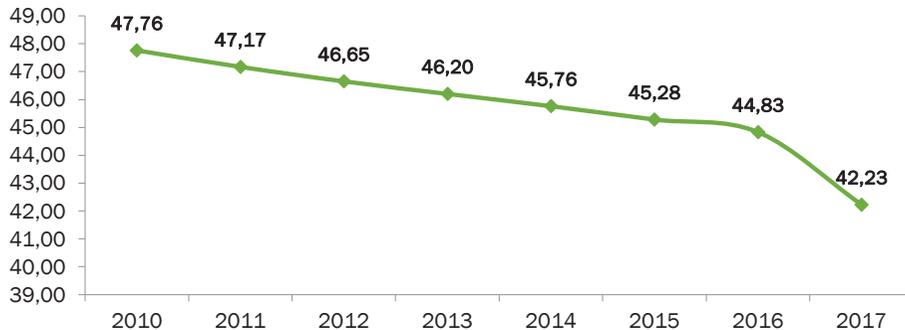


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.31
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam

evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 ini, evaluasi pembangunan masih menggunakan evaluasi RPJMD tahun ketiga yaitu tahun 2016. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2016 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Misi I, “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan pada evaluasi misi pembangunan ketiga (evaluasi RKPd 2016), dari 18 Program Prioritas dengan 30 indikator capaian kinerja, maka terdapat 5 (lima) indikator yang masih jauh dari harapan target pembangunan serta 3 (tiga) indikator yang mendekati target pembangunan (*on progress*) meskipun belum maksimal. Sementara 22 indikator lainnya telah menunjukkan pencapaian target (bahkan sebagian telah melebihi target yang ditetapkan). Jika ditinjau dari sisi implementasi programnya, dapat dikatakan bahwa 13 dari 18 Program Prioritas (atau 72,22%) telah mencapai target, dan hanya 11,11 persen dikatakan sedang menuju target dan selebihnya di bawah target. Penurunan anggaran (APBN dan APBD) serta kemampuan daerah mengatasi kendala geografis sangat penting untuk dipertimbangkan agar dapat menyempurnakan kinerja pembangunan berikutnya mengingat pada tahun ini masih banyak “pekerjaan rumah” yang belum rampung.

Misi II, “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan”, memiliki tantangan besar dalam pencapaiannya terlebih dengan upaya untuk mengupayakan target terbaru, yaitu sumber daya alam dan energi terbarukan. Misi kedua ini memiliki paling banyak program prioritas, yaitu mencapai 59 Program Prioritas yang harus dijalankan. Hasil evaluasi RKPd 2016 menunjukkan bahwa dari 61 indikator kinerja, ternyata 27 indikator diantaranya (44,26%) sudah menunjukkan pencapaian target, 14 indikator (22,95%) menuju target, dan sisanya 20 indikator (32,79%) belum mencapai target.

Ditinjau dari programnya, dapat disimpulkan bahwa dari 59 Program Prioritas terdapat 25 program telah mencapai target, 14 program menuju target, dan 20 program belum mencapai target. Namun demikian, dari beberapa angka capaian yang belum mencapai target masih bisa

berubah mengingat angka capaian definitif untuk triwulan ke-IV yang belum disampaikan. Penekanan pada misi kedua ini adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas atau keterampilan pelaku sektor pertanian (yang memiliki cakupan luas), pengembangan kewirausahaan dan ekonomi alternatif (a.l. melalui penggalan potensi kepariwisataan) layak dipertimbangkan karena sangat penting untuk meningkatkan kinerja perekonomian pembangunan di masa depan.

Misi III, “Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata”, merupakan misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan capaiannya, mengingat *output*-nya adalah infrastruktur fisik dan layanan jasa (a.l. transportasi dan komunikasi) yang sangat penting bagi kehidupan keseharian masyarakat.

Evaluasi RKPD 2016 terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja pembangunan untuk 14 Program Prioritas, sebanyak 6 indikator diantaranya (40,00%) mencapai target, 8 indikator (57,14%) di bawah target, dan 1 indikator tidak dianggarkan program kegiatannya. Cukup tingginya angka di bawah target pembangunan dikarenakan dua hal, yaitu:

- a. Persetujuan anggaran yang tidak memadai sehingga hanya sebagian kegiatan saja yang dapat dilaksanakan; dan
- b. Beberapa angka kinerja baru bisa diperoleh jika telah tuntas selama 4 triwulan.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya ditengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka telah direkomendasikan untuk lebih selektif dan realistik dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke kabupaten/kota.

Misi IV, “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik “, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat peran pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah pada berbagai tingkatan dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak optimal.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2016 khususnya misi keempat menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana dari 13 indikator kinerja capaian untuk 12 Program Prioritas, terdapat 11 indikator (84,61%) telah mencapai target sedangkan Program Prioritas yang belum mencapai target adalah program pengembangan data statistik dan spasial serta program peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Misi V, “Mewujudan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim”, merupakan bagian dari upaya mendukung program global dan membawa Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi pelopor program-program prioritas dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil dari evaluasi capaian kegiatan pembangunan misi kelima,

dari 16 indikator capaian kinerja (16 Program Prioritas) terdapat 13 indikator (81,25%) telah mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja program sedang proses, dan 1 (satu) indikator program belum mencapai target.

Program yang belum menunjukkan kinerja memuaskan adalah penanaman kembali/rehabilitasi mangrove dan program-program konservasi ekosistem bernilai konservasi tinggi. Berbagai program konservasi ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti partisipasi para pihak non-SKPD termasuk dalam hal pasokan data yang masih rendah serta masih tingginya angka konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan/tenurial lahan. Koordinasi lintas sektor juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang sering kali menjadi tupoksi dari lembaga yang berbeda.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memiliki 19 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Sasaran pembangunan daerah tersebut memiliki 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering disebut *impact indicators* yang memiliki fungsi sebagai sebuah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap tahapannya.

Evaluasi sasaran pembangunan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2016 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2016 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang valid dan *up-date* sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016, didapatkan 16 dari 24 indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang sesuai dengan target sasaran sebesar 66,67 persen.

Capaian pembangunan jangka menengah fase ketiga ini memiliki beberapa kendala yang dirasa cukup berdampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam era pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait kondisi perekonomian daerah yang bergejolak dikarenakan imbas dari isu global perekonomian internasional. Selain itu, permasalahan sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus utama. Hal ini terlihat dari masih minimnya capaian pembangunan, berupa: penurunan tingkat kemiskinan yang menjauh dari target, tingkat pengangguran yang belum optimal penanganannya, serta pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk pertimbangan kebijakan pembangunan kedepannya. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017:

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran		Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2017	Interpretasi
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	73,21	75.08	75.12	On Track
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	13.70	13.49	On Track
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,87	11.50	9.36	On Track
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	73.85	73.70	Melampaui Target
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6.10	6.19	On Track
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7.18	6.91	On Track
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.600	11.612	On Track
		Tingkat inflasi (%)	9,65	4+1	3,15	On Track
		Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	14,14	17,70	16,42	On Track
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,3341	0.320	0,330	On Track
		Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,25	0,5±1	3,13	On Track
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	1±1	4,04	On Track
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4±1	5,24	On Track
		Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	9	7,96	On Track
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44	4,87±1	5,70	Off Track
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	75	61,52	On Track
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	2	2,12	On Track



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Sasaran		Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2017	Interpretasi
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6.80	7,00	Melampaui Target
		Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5.80	5.56	Melampaui Target
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Melampaui Target
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 ,00 (baik)	83,00	80,56	Melampaui Target
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	BB (78.00)	BB (77.50)	Melampaui Target
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi	Tinggi	Melampaui Target
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	81.99	82,64	Melampaui Target
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1,800	1,515	On Track

Sumber: Evaluasi RPJMD tahun ketiga

Tabel 2.40
Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	1) Tingginya angka putus sekolah SMA/SMK/MA/SMA LB 2) Rendahnya rasio lulusan SMA/SMK/MA/SMA LB melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1) Rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja 2) Ketidaksiharian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada
3. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rendahnya sarana, prasarana dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah 3T
4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan	1) Tingginya beban masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan 2) Belum optimalnya prasarana pendukung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam berusaha
5. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha
	Persentase jalan dalam kondisi mantap	
	Rasio elektrifikasi	
	Persentase rumah tangga yang terlayani Air minum perpipaan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Kontribusi sektor industri pengolahan	Sarana dan prasarana pendukung menuju dan didalam industri pengolahan dan perdagangan masih belum memadai
	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran	
	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang terhubung (koneksi)	
	Kontribusi sub sektor perkebunan	
	Kontribusi sektor perikanan	
	Rasio pemenuhan daging sapi lokal	
	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras	
10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK	Masih tingginya angka emisi GRK
11. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	IKM	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
12. Terwujudnya Pemerintahan yang Terbuka, Bersih dan Bebas KKN	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Masih adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.41

Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.331.285	3.363.630	3.394.932	3.441.731	3.505.161	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,36	3,13	
1.3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27		
1.5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,60	41,06		
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,57	0,54	0,54	*		
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,06	6,42	6,23	6,11	6,19	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	6.686	6.722	4.199	9.138	8.622	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pendidikan							
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	98,96	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	9,24	9,36	
1.3	APK SD/MI	%	107,57	111,04	112,61	113,76	108,07	
1.4	APK SMP/MTs	%	91,06	91,49	97,90	97,78	91,46	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	82,21	85,54	90,31	87,93	99,51	
1.6	APM SD/ MI	%	95,91	96,70	97,00	97,13	97,43	
1.7	APM SMP/MTs	%	76,10	78,73	79,06	79,20	79,58	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	62,22	67,03	67,78	67,92	68,23	
2	Kesehatan							
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,70	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		177,21	157,22	177,00	135,00	*	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		21,00	20,00	21,00	21,00	*	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,90	3,70	3,70	0,10	*	
3	Ketenagakerjaan							
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,94	7,54	7,50	7,95	6,91	
Fokus Budaya dan Olahraga								
1	Kebudayaan							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	676	735	861	861	870	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	17	17	17	17	17	
2	Pemuda dan Olahraga							
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	55	97	97	101	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,46	99,33	99,63	99,54	99,67	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah							
	- SD Negeri	%	215,24	220,19	220,43	220,36	217,02	
	- SD Swasta	%	248,83	260,04	256,08	254,08	265,50	
	- MI	%	124,89	165,96	183,24	201,42	202,72	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru							
	- SD Negeri	%	14	16,48	16,46	16,42	17,56	
	- SD Swasta	%	14	15,95	16,19	16,11	18,52	
	- MI	%	14	12,33	10,96	15,91	16,29	
1.2	Pendidikan menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 13-15 tahun	%	96,62	97,99	97,92	98,18	98,79	
	- 16-18 tahun	%	73,10	80,50	80,68	80,81	81,32	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah							
	- SMP Negeri	%	285,97	299,71	303,78	298,05	296,15	
	- SMP Swasta	%	148,51	155,96	157,32	154,89	162,41	
	- MTs	%	153,11	164,54	155,98	185,00	178,07	
	- SMA Negeri	%	371,26	370,11	395,19	399,5	454,84	
	- SMA Swasta	%	112,76	111,29	120,87	121,01	145,07	
	- MA	%	120,18	121,60	123,92	134,35	149,36	
	- SMK	%	264,04	291,87	332,01	327,75	358,07	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru							
	- SMP Negeri	%	13	15,60	16,51	16,22	16,99	
	- SMP Swasta	%	11	11,23	13,70	13,42	15,59	
	- MTs	%	11	9,63	10,18	12,20	13,85	
	- SMA Negeri	%	14	13,95	14,99	15,08	17,49	
	- SMA Swasta	%	8	7,38	10,72	10,71	14,58	
	- MA	%	8	6,69	7,27	9,24	11,58	
	- SMK	%	12	11,21	16,36	14,22	15,21	
1.3	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,17	0,15	0,00	0,00	0,13	
	- SMP/MTs	%	2,89	1,77	1,74	1,82	1,21	
	- SMA/SMK/MA	%	26,71	19,40	19,27	19,19	18,68	
1.4	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	%	99,72	100,00	100,00	99,99	99,90	
	- SMA/SMK/MA	%	99,63	99,96	100,00	99,93	99,98	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	*	65,30	65,30	65,00	66,00	
2	Kesehatan							
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.38	4.097	4.036	4.124	3.895	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,40	34,33	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,40	3,39	4,03	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	20,89	
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	10,5	
2.8	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	176,87	
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.584,13	1.181,45	
3.1.1	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	68,24	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	50,20	54,95	55,46	42,43	35,69	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	12.825	15.839,5	9.206	5.477	6.231	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	91,09	76,19	*	*	*	
3.5	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	282	944	1.314	1.405,14	2.571,96	
4	Perumahan							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih	%	80,87	85,35	87,36	90,63	90,90	
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%	*	78,48	78,13	92,25	22,70*)	Tdk termasuk air kemasan /air isi ulang
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	91,09	76,19	61,3	69,9	*	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	96,13	96,57	98,73	98,67	99,14	
4.5	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	unit	1000	350	365	150	2.689	APBD = 62 Unit APBN = 2.627 Unit
5	Penataan Ruang							
5.1	Penyelenggaraan tata ruang	Skor	64,83	67,83	69,14	72,14	73,44	
6	Perhubungan							
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.094	1.228	867	667	602	
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7,81	7,09	7,12	6,89	6,51	
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3.642.539	3.791.629	3.945.625	4.025.784	4.216.892	
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.593.269	3.955.136	3.693.028	*	*	
7	Lingkungan Hidup							
7.1	Indeks kualitas air sungai		7,59	3,04	2	3	*	
7.2	Penegakan hukum lingkungan	%	86,21	86,36	100	100	100	
7.3	Persentase sampah terangkut per hari	%	64,61	90,33	66,43	87,51	88,21	
8	Kependudukan dan Catatan Sipil							
8.1	Kepemilikan KTP	Orang	1.425.905	1.092.011	1.148.718	2.373.545	2.238.884	Semester 1 2017
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.351.261	695.301	1.071.135	3.441.731	1.511.591	Semester 1 2017
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	12,87	13,35	12,93	14,75	16,77	
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39,95	42,26	48,93	47,69	42,33	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.978	30.927	30.927	11.511	*	
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	67,46	70,29	65,51	69,86	70,61	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	70.336	76.76	59.807	70.832	71.027	
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	22,81	24,02	65,35	64,44	60,86	
11	Sosial							
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	
11.2	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7.368	7.296	7.296	7.256	5.469	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	
12	Ketenagakerjaan							
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	
12.2	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,70	57,71	62,40	59,35	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
13	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah							
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.847	5.546	5.184	Angka sementara
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	360.733	423.267	445.682	452.309	452.309	Angka Sementara
14	Penanaman Modal							
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18.441.377	12.983.049	9.611.313	6.885.124	10.980.216	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197	2.145.665	2.381.442	1.181.859	1.285.215	
15	Kebudayaan							
15.1	Jumlah event budaya	Event	56	55	60	60	70	
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	161	162	165	165	165	
15.3	Jumlah museum	Unit	12	12	14	14	14	
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	1	2	2	2	2	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	6	6	12	14	14	
16	Keperemudaan							
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.322	1.251	1.251	*	*	
17	Ketahanan Pangan							
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	74,43	68,89	67,62	75	77,56	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
18.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masy. yang aktif	Unit	1.018	1.145	1.146	1.032	1.032	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	826	161	*	*	*	
19	Statistik							
19.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika							
20.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95,34	96,27	97,12	100	*	
21	Perpustakaan							
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.743	1.819	1.830	2.014		
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.235	7.163	7.234	6.525	11.566	
22.2	Opini BPK		WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		68,00	72,32	76,65	75,00	80,56	
Fokus Urusan Pilihan								
1	Pertanian							
1.1	Produksi padi	Ton	439.439	426.567	408.782	305.337	400.040	Aram I
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	42,70	42,55	41,20	32,05	43,22	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,62	7,00	7,50	8,22	7,96	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,23	0,24	0,20	0,25	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,55	3,75	3,77	4,26	4,27	
2	Kehutanan							
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,13	1,16	1,33	1,34	1,40	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,15	50,21	45,16	43,17	46,31	
4	Pariwisata							
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.912.661	3.941.979	4.320.025	5.547.435	7.244.659	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,72	0,84	0,91	0,93	
5	Kelautan dan Perikanan							
5.1	Produksi Perikanan	Ton	214.651,1	430.171	239.959,5	248.005	233.592	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,19	1,30	1,50	1,55	1,49	
6	Perdagangan							
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,13	5,53	5,30	
6.2	Nilai ekspor	000 US	31.003.083	25.825.021	17.483.270	13.841.060	17.480.900	
6.3	Nilai impor	000 US	9.512.101	8.471.495	5.506.230	3.713.820	3.230.970	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	21.490.982	17.353.526	11.977.040	10.127.240	14.249.930	
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,96	19,32	20,61	20,62	19,07	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	5,96	6,33	7,34	7,78	8,02	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508.706	508.801	549.351	587.920	663.485	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	143,92	145,86	146,46	144,83		
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27		
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.287	5.004	5.184	
2	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani	%	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan							
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M	7,81	7,09	7,12	6,89		
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
2.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	587	611	678	689	
2.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	542	349	667	695	698	
2.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	134	716	153	162	177	
3	Lingkungan Hidup							
3.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	90,90	
4	Komunikasi dan Informatika							
4.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.666.440	2.930.573	3.110.170	3.286.004	3.230.402	
4.2	Jumlah pelanggan listrik	Titik	663.582	736.594	791.553	842.003	904.937	
Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	30.892.361	37.872.765	39.379.342	24.403.200	28.202.100	
Fokus Sumber Daya Manusia								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63,12	53,74	55,96	*	*	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,69	84,75	85,07	*		
1.4	Rasio ketergantungan		46,20	45,76	45,28	44,83	42,23	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah)

* : Data Tidak Tersedia

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, dan hasil MUSRENBANG Provinsi Tahun 2018, maka isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur ditandai oleh rasio tamat sekolah yang dimiliki oleh warga Kalimantan Timur. Jumlah penduduk yang tamat Perguruan tinggi sebesar 9,01%, yang tamat SLTA 32%, tamat SD 28,29%, dan yang belum tamat SD sebesar 16,03%. Rendahnya daya saing SDM Kalimantan Timur menjadi salah satu indikator kondisi daya saing daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumberdaya Manusia yang tinggi masih didominasi wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah kabupaten masih rendah. Ada 3 kabupaten yang masih memiliki IPM di bawah angka 70,0 yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan berapa lama seorang siswa/i mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana pada tahun terakhir (2016) mencapai 9,24 tahun atau telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Mereka masuk dalam kategori lulusan SMP. Sedangkan dari sisi Harapan Lama Sekolah, pada 2016 telah mencapai angka 13,35 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai bekal memasuki dunia usaha.

Masih rendahnya daya serap tenaga kerja masyarakat Kalimantan Timur menjadikan indikasi bahwa belum terjadi sinkronisasi lulusan sekolah dengan pangsa pasar yang dibutuhkan. Dengan kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi oleh sector penggalian, industrialisasi, pertanian dalam areti luas dan sector usaha lainnya, maka sudah sepatutnya Pemerintah provinsi Kalimantan Timur menyiapkan tenaga didik dari vokasi untuk menjembatani kebutuhan pangsa kerja di Kalimantan Timur, sekaligus untuk mengurangi pengangguran terbuka di Kalimantan Timur.

Lulusan yang siap mengisi berbagai kegiatan ekonomi khususnya penciptaan industri kreatif dan berbasis teknologi maupun kerakyatan sangat diharapkan karena Kalimantan Timur memiliki potensi pengembangan yang tinggi tanpa harus bergantung pada kegiatan ekonomi dasar yang bersifat ekstraktif sumber daya alam. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan situasi daerah dan kreasi di berbagai bidang, termasuk bidang usaha pariwisata, penemuan dan peningkatan produksi energi baru dan terbarukan, konservasi dan pengembangan jasa lingkungan, dapat mendorong pembangunan dan perekonomian daerah dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan dan bidang ekonomi sangat kuat dan perlu kajian pengembangan pendidikan vokasional yang tepat dan berdaya guna. Selain peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pencegahan maupun pengobatan penyakit dan mendorong pola hidup sehat juga menjadi salah satu hal penting untuk



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

dilakukan oleh Pemerintah Kaltim. Sebagaimana dijabarkan bahwa jumlah dan sebaran tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum tersedia secara merata dan maksimal di Kalimantan Timur. Untuk itu peningkatan kualitas pelayanan sejak bayi hingga lahir dan berkembang menjadi manusia dewasa sangat diperlukan, juga untuk meningkatkan angka harapan hidup, kesehatan ibu dan anak. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan promosi pemberdayaan masyarakat menuju hidup sehat serta standarisasi kualitas layanan kesehatan merupakan hal yang secara cepat harus dilakukan. Minimnya ketersediaan data di bidang kesehatan menyebabkan sulitnya untuk menentukan kebutuhan spesifik per daerah, termasuk ketersediaan data penyakit yang ditimbulkan akibat terjadinya gangguan lingkungan.

2. Transformasi Ekonomi Belum Sepenuhnya Berjalan Dengan Baik

Komposisi PDRB Kaltim tahun 2016 di sektor tambang sebesar 43,34%, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 20,51%. Untuk Kabupaten/Kota kontribusi sektor tambang terbesar berada di kabupaten Kutai Timur sebesar 79,23% dan Paser sebesar 71,31%. Sedangkan untuk industri pengolahan terbesar berada di wilayah Bontang 83,96%, dan Balikpapan sebesar 47,62%. Rendahnya nilai industrialisasi dan pengolahan menjadi indikasi belum berprosesnya hilirisasi baik dari sektor tambang maupun dari sector pertanian kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Hilirisasi sebagai bagian dari produk tranformasi ekonomi di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong ekonomi Kalimantan Timur dengan pengendalian tingkat inflasi pada tingkat yang memadai. Pertumbuhan investasi di sector hilirisasi diharapkan mampu memicu hilirisasi ini.

Koperasi dan UMKM merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang terbukti memiliki ketahanan yang lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi. Penciptaan model ekonomi kreatif sangat diperlukan, diikuti dengan penyiapan SDM yang tepat. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah dapat ditingkatkan melalui bantuan peningkatan produktivitas, penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung, hilirisasi dan pemasaran pasca produksi. Demikian pula dengan berbagai program peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian guna mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau.

3. Infrastruktur Belum Optimal

Kebutuhan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat perputaran arus barang dan jasa serta perputaran manusia. Panjang jalan di Kalimantan Timur meningkat 62,06% sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dengan kondisi jalan 59% baik, 17,8% rusak sedang, 14,9% rusak, dan 8% rusak berat. Hampir semua jalan beraspal. Penambahan jalan Kabupaten/Kota mencapai prosentase tertinggi yaitu 24,53%, diikuti jalan negara 14,54%, dan jalan provinsi 2,37%.

Infrastruktur yang optimal terutama untuk mendorong sector-sector yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi diharapkan mampu mendorong arus ekonomi dari desa ke kota dan sebaliknya dan dari dalam Kaltim dan keluar Kaltim. Konektivitas menjadi salah satu bentuk dampak dari keterbukaan keterisolasian dan penghubung system ekonomi dalam rangka upaya pemerataan pendapatan antar kabupaten/kota yang dapat menggerakkan sector lain seperti Pendidikan, kesehatan, dan migrasi.

4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Salah satu isu nasional dan global saat ini adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehingga tidak mampu menyajikan pelayanan prima. Kondisi sedemikian ini pada gilirannya dapat melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat termasuk buruknya kualitas (pengelolaan) kebijakan publik yang selaras dengan prioritas daerah.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Tingginya kegiatan pembangunan ekonomi ekstraktif di Kalimantan Timur menyisakan pekerjaan di sector lingkungan hidup yang cukup besar. Pembangunan di kawasan rendah karbon perlu dikembangkan sehingga emisi karbon dapat dicegah. Hutan sebagai icon Kalimantan Timur perlu dijaga kelestariannya dengan upaya-upaya pengurangan degradasi, deforestasi, dan mencegah illegal logging. Upaya-upaya ditingkat social dengan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan termasuk pemberdayaan perempuan juga dapat dilakukan dalam upaya pelestarian hutan di Kalimantan Timur. Pengendalian didaerah hulu dapat mencegah terjadinya kerusakan dihilir. Salah satu cara dalam mencegah banjir, tanah longsor, penyebaran penyakit, dan pengendalian sumber daya air adalah dengan cara menjaga kelestarian hutan.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal yang meliputi analisa perkembangan ekonomi daerah serta faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Disamping itu untuk menjamin integrasi dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi pada RKP Tahun 2019.

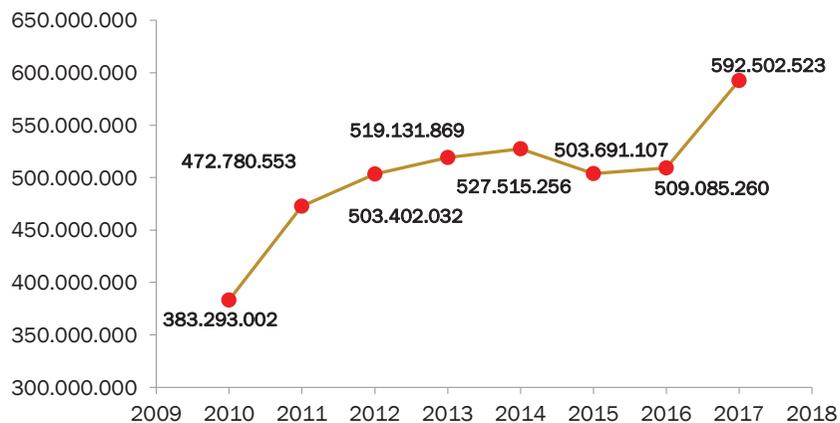
3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2019

A. Kinerja Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503,69 trilyun. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan adalah sektor migas dan batubara.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

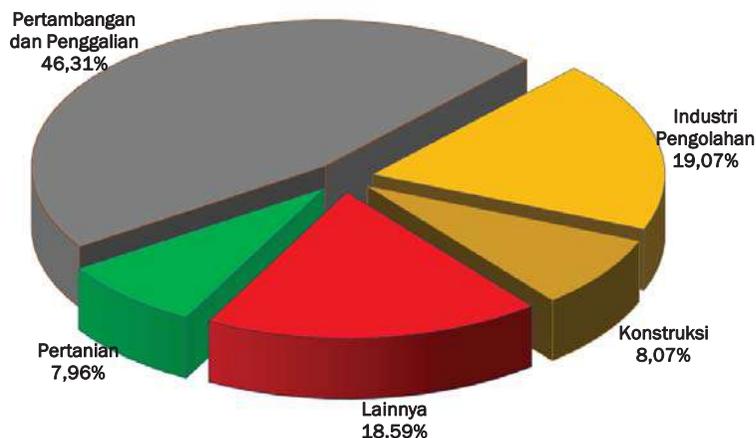
Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Seiring membaiknya harga mineral di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 507,07 triliun dan Rp 592,50 triliun.

Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2017 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 46,31 persen dan industri pengolahan sebesar 19,07 persen. Peranan Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pada tahun ini mengingat selama tiga tahun sebelumnya mengalami penurunan secara berkala.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2017 memiliki kontribusi perekonomian wilayah sebesar 7,96 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)
Tahun 2017 (Tahun Dasar 2010)



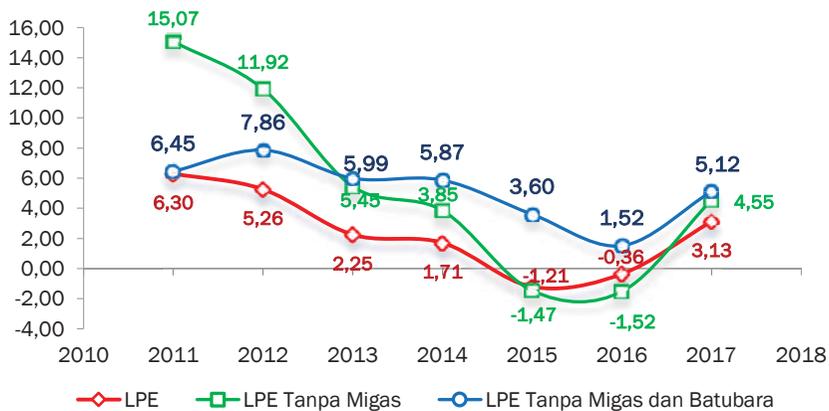
Sumber : BPS PProvinsi Kalimantan Timur, 2018

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2015 terus mengalami perlambatan di setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen, akibat menurunnya harga migas dan batubara dunia. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,47 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,60 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen. Hal ini tidak lepas dari tingginya share Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada struktur PDRB Kalimantan Timur terutama pada sektor migas dan batubara.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017 (%)



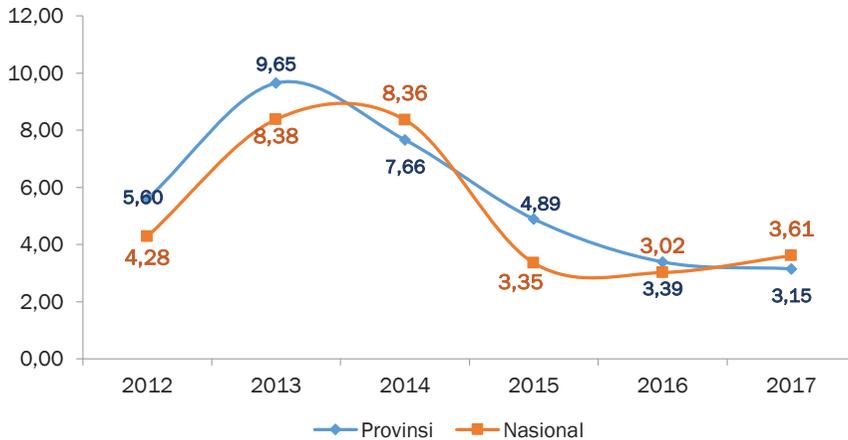
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan.

Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Prov. Kaltim dan Nasional Tahun 2012-2017



B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara tujuan utama ekspor komoditi utama Kalimantan Timur dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
2. Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara tujuan utama ekspor komoditi Kalimantan Timur. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan Eropa yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global, serta risiko adanya kebijakan negara China dan Jepang pada penggunaan energi yang ramah lingkungan.
3. Pertambahan nonmigas mendapatkan risiko tekanan dari negara mitra dagang utama yang terus melakukan *shifting* ke arah sumber energi terbarukan. Kebijakan *green economy* di Tiongkok dan Korea Selatan akan berdampak pada permintaan batubara Kaltim. Serta adanya larangan impor batubara pada beberapa pelabuhan kecil Tiongkok. Kemudian kondisi oversupply batubara di India juga akan berdampak pada kinerja ekspor batubara ke India.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

4. Berakhirnya *long term contract* industri LNG dengan Jepang akan berpengaruh terhadap kinerja industri Kaltim secara umum akibat beroperasinya beberapa reaktor nuklir Jepang sehingga berdampak pada turunnya impor LNG.
5. Harga Batubara-Australia pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan sedikit menurun sehingga lebih rendah dari harga batubara pada tahun 2017.
6. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta dan masyarakat. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan merupakan indikasi aktivitas sektor swasta dan masyarakat yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan dan operasionalisasi kawasan-kawasan industri masih belum optimal/berjalan.
7. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2018 dan 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Dari dalam negeri, Refinery Development Masterplan Refinery Unit V yang saat ini tengah dilakukan oleh PT. Pertamina (persero) dan Pembukaan pabrik baru di KEK Maloy dan Kawasan Industri Kariangau diperkirakan akan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019 khususnya pada sektor industri, perkebunan, konstruksi dan PMTB. Disamping itu, dengan beroperasinya Bandara Samarinda Baru dan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dapat memacu pergerakan perputaran perekonomian di Kalimantan Timur. Disisi lain, APBD tahun 2018 provinsi Kalimantan Timur mengalami sedikit peningkatan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya terutama diperkirakan akibat peningkatan pendapatan dari *Participation Interest* Blok Mahakam dan alokasi dana desa. Peran regional investor relation unit yang telah dibentuk sejak akhir tahun 2015, diharapkan dapat menciptakan persepsi positif bagi calon investor untuk selanjutnya dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.

Dari sisi eksternal, ekonomi negara mitra dagang Kalimantan Timur di tahun 2018 dan 2019 tumbuh positif. Salah satunya diperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan CPO dari Tiongkok (Biodiesel Mandatory-B9).

Kemudian didukung lagi dengan indeks harga ekspor (IHEX) Kalimantan Timur dimana berdasarkan hasil perhitungan Bank Indonesia, harga komoditas ekspor (secara keseluruhan) tahun 2018 dan 2019 akan meningkat. IHEX Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2018 dan 2019 yang didorong oleh perbaikan harga komoditas migas.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2019

Tema pembangunan tahunan nasional pada RKP tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Pada RKP tahun 2019, Kalimantan Timur diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,01 %. Target pertumbuhan ini cukup realistis mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih sangat tergantung pada stabilitas ekonomi global yang masih rentan oleh perubahan harga komoditas internasional. Memperhatikan hal tersebut, maka target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ditargetkan sebesar 1,5 – 3,5% dengan kontribusi terhadap regional Kalimantan sebesar 51,06% dan sebesar 4,13% terhadap nasional. Adapun sektor yang menjadi kontributor utama adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan konstruksi. Didukung dengan pengembangan sektor lainnya seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi, disertai pengembangan potensi pertanian.

Untuk mencapai target ekonomi tersebut, selanjutnya dalam RKP tahun 2019 dijabarkan arah pengembangan wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.
2. Sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan akan diarahkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
3. Sektor industri pengolahan ditopang dengan mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi.
4. Kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan Timur antara lain KEK Maloy (industri pengolahan CPO) dan Kawasan Industri Kariangau (industri pengolahan kayu, dan lainnya).
5. Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan.

Arah kebijakan ekonomi nasional di Kalimantan Timur dalam RKP 2019 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana, dengan Program Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian;

2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah insutri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai dan pemanfaatan inovasi, dengan Program Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan;
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antaralain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan, dengan Program Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif;
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan dengan Program Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja ;
5. Mengembangkan IPTEK dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDP IPTEK, pengembangan Litbang keilmuan strategis dan pengembangan teknologi *frontier* dengan Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.

3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Sasaran

Pada tahun 2019, ekonomi Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

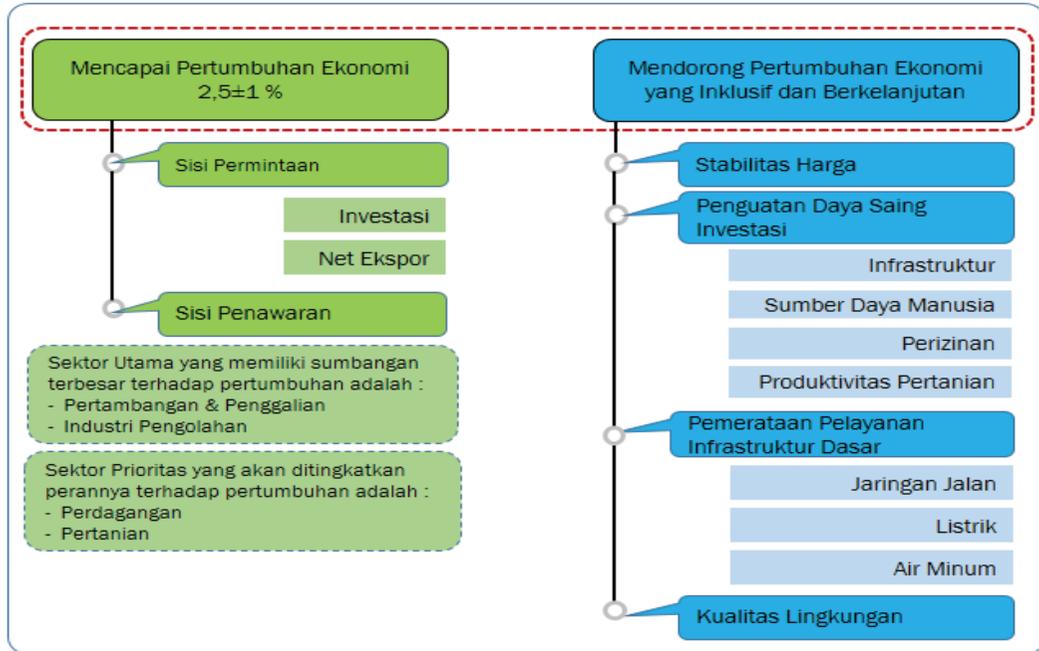
Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		Capaian 2017	Target 2019
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13	2.5±1
2	Investasi (trilyun Rp)	28,20	42
3	Inflasi	3,15	4±1
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,12	75,30
5	Indeks Gini	0,330	0,329
6	Indeks Williamson	0,48	0,45
7	Tingkat Kemiskinan	6,19	6,00
8	Tingkat Pengangguran	6,91	6,54

Sumber : Hasil analisa dan Perhitungan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2019 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 3.5
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2019



1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 2,5±1 Persen

Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5±1 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 2,5±1 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui Investasi dan Net Ekspor Antar Daerah. Kontribusi investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 29,16 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2019. Dimana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Untuk itu diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan dalam hal ini yang mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Sedangkan Net Ekspor diharapkan mampu memberikan kontribusi di atas 30 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2019. Dalam rangka mendukung transformasi

ekonomi melalui hilirisasi industri, Untuk menopang ini, selain masih mengandalkan ekspor migas dan batubara, disamping ekspor luar negeri perlu didorong pula net ekspor antar daerah yang mengindikasikan adanya peningkatan pada perdagangan domestik Kalimantan Timur. Dimana aktivitasnya diarahkan pada ekspor pada produk perikanan dan perkebunan, untuk itu perlu didukung dengan kegiatan pengembangan produktivitas perikanan dan perkebunan, dan juga pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. **Sektor utama yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.** Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar mencapai 46,31 % pada tahun 2017. Sektor ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global karena mencakup tingkat harga minerba di pasar internasional yang rentan akan guncangan. Pada tahun 2019 sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 42 % sedikit menurun dengan catatan peningkatan kontribusi pada sektor lainnya yang cukup potensial atau dengan kata lain diharapkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang berbasis pertambangan kepada struktur ekonomi berbasis non pertambangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tidak bisa diturunkan secara signifikan mengingat multiplier effect yang ditimbulkan jika terjadi penurunan tajam pada sektor ini. Maka salah satu caranya adalah bukan menurunkan kinerja sektor pertambangan dan penggalian tapi memberikan dorongan dan suntikan pada sektor lain untuk tumbuh dan berkontribusi tinggi.

Disamping sektor pertambangan dan penggalian, sektor utama lainnya adalah industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 19,07 %, sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Keinginan Kalimantan Timur untuk mempercepat hilirisasi industri tentunya akan memacu pertumbuhan dan pengembangan berbagai aspek pada industri pengolahan. Dimana pada tahun 2019 diharapkan sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 21,88% guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mendatang. Sektor industri pengolahan merupakan alternatif sumber pertumbuhan baru untuk transformasi ekonomi Kalimantan Timur dan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan program – program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program peningkatan dan pengembangan industri, program peningkatan produktivitas perkebunan, dan pembangunan jalan dan jembatan untuk akses menuju lokasi industri atau outlet.

Sektor potensial yang dijadikan prioritas menuju transformasi ekonomi di Kalimantan Timur adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 7,96 % terhadap PDRB Kalimantan Timur. Sektor pertanian akan menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru, meskipun perannya masih kecil jika dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Namun, jika melihat *long term* dan potensi wilayah di Kalimantan Timur, sektor ini mempunyai nilai strategis terutama dalam perdagangan domestik. Tahun 2019 sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 9,76 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur, tentunya perlu didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan, dalam mendukung peningkatan produktivitas produk pertanian, perikanan dan peternakan.

Pada sektor perdagangan dianggap memiliki potensi sebagai salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena dianggap mampu bertahan ditengah kontraksi ekonomi global. Kontribusi sektor perdagangan di Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,30 %. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur sektor ini merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Pada tahun 2019 sektor perdagangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 6,77 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dibarengi dengan transformasi ekonomi dan relevansi terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Namun dalam hal ini diperlukan dorongan dari pemerintah berupa pelaksanaan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah, Program pengembangan perdagangan dalam negeri dan Program pengembangan kawasan industri.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Untuk menjamin tercapainya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, maka dibutuhkan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan beberapa dimensi yang harus dijaga, diantaranya stabilitas harga, peningkatan daya saing investasi, pemerataan pelayanan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan.

- 1) **Stabilitas harga** akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Stabilitas harga akan menjaga daya beli masyarakat serta berujung pada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga merupakan prasyarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gejolak dan tingginya inflasi secara langsung dapat mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat besarnya dampak inflasi bagi masyarakat, Pemerintah beserta semua *stakeholders* perlu mengupayakan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas harga. Target inflasi

Kalimantan Timur di tahun 2019 sebesar $4\pm 1\%$, untuk menjaga inflasi pada posisi ini maka diarahkan pada pengendalian komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Untuk itu perlu juga didukung dengan peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; penyediaan produk olahan oleh industri pangan; penguatan infrastruktur logistik pangan, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; penguatan kerjasama antardaerah, serta edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok.

- 2) **Peningkatan daya saing investasi** di Kalimantan Timur mencakup penyediaan infrastruktur, tersedianya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang sesuai dan berkualitas, kemudahan izin berusaha, dan peningkatan produktifitas pertanian. Pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing investasi antralain pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk penyediaan SDM yang berkualitas dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan keterampilan tenaga kerja. Penyediaan informasi potensi daerah dan penyederhanaan perijinan berusaha harus dilakukan untuk meningkatkan minat investor. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjamin keberlanjutan/kepastian supplay raw material komoditi pertanian yang menjadi bahan dasar industri pengolahan.
- 3) **Pemerataan pelayanan infrastruktur dasar** akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi ketersediaan jaringan jalan, listrik dan air minum secara merata di Kalimantan Timur. Untuk itu program yang didorong adalah Pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka aksesibilitas, pemantapan infrastuktur penyedia air bersih dan air baku, Perbaikan jaringan distribusi Listrik, pengadaan akses untuk daerah-daerah remote, dan melistriki daerah-daerah terpencil.
- 4) **Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan** sifatnya berkelanjutan, maka dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur harus tetap memperhatikan aspek lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat dicapai jika aspek lingkungan mendapat porsi perhatian yang sama dengan sektor lainnya. Diantaranya dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan, meningkatnya indeks tutupan hutan, dan menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca.

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2017;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
 - a. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b. Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - c. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - d. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - e. Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
 - a. Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - b. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan leasing.
 - c. Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - d. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - e. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - f. Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
 - a. Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d. Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e. Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
 - a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:**
- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
 - 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyeteroran.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2017 s/d proyeksi Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut dimana perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dilihat. Dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan -5,31%. Ini menunjukkan turunnya pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.588.752.896.230	4.281.264.186.000	4.684.546.971.000
1.1.1	Pajak Daerah	3.505.578.072.170	3.320.000.000.000	3.629.350000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	16.659.010.036	25.838.100.000	19,713,590,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	208.807.497.552	217.297.204.481	244,861,640,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	857.708.316.470	718.128.881.519	790,621,741,000
1.2	Dana Perimbangan	3.533.009.585.813	1.339.620.357.000	2,908,010,000,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	1.710.695.086.821	2,019,620,357,000	2,148,010,000,000
1.2.2	DAU	714.906.576.000	767.682.423.000	760.000.000.000
1.2.3	DAK	1.107.407.922.992	1.117.790.605.000	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		865.320.605.000	-
1.3	Lain-Lain PAD yang sah	32.986.523.875	36.733.000.000	9.443.029.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.437.936.000	11.982.312.125	9.443.029.000
1.3.2	Dana Penyesuaian	7.500.000.000		-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	15.048.587.875	24,750,687,875	-
Jumlah Pendapatan Daerah		8.154.749.005.918	8.366.250.000.000	7.602.000.000.000

3.2.2. Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.3.
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2019
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,498,442,670,625
1	Belanja Pegawai	1,871,179,951,456
2	Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2019	2,002,746,750,000
3	Kurang Salur Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2018	268,847,369,169
4	Bankeu Parpol	7,454,400,000
5	Bantuan Sosial Wajib	5,500,000,000
6	Belanja Hibah	117,714,200,000
	a. Belanja Hibah Umum (KONI)	50,000,000,000
	b. Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	67,714,200,000
	- BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta	39,914,100,000
	- TPP PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Swasta	15,325,200,000
	- TPP PNS dan Non PNS serta BOSDA SMA Negeri dan Swasta	12,474,900,000
7	Belanja Tak Terduga	25,000,000,000
8	Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota	200,000,000,000
II	BELANJA LANGSUNG	1,532,256,010,534
1	BLUD	685,600,000,000
2	Dana Reboisasi	81,200,000,000
3	Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%)	4,060,000,000
4	Belanja Wajib Tenaga Pendidik dan Kependidikan	166,362,200,000
5	Belanja Beasiswa	44,559,000,000
6	Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Pajak Rokok	30,555,000,000
7	Operasional Perangkat Daerah (PAP, Pemeliharaan, Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi)	413,053,076,659
8	BL BOSDA	106,866,733,875
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		6,030,698,681,159

3.2.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2019 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada

sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2019 seperti tabel berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2019
1	Pendapatan	7.602.000.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total Penerimaan	7.602.000.000.000
Dikurangi		
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	6.030.698.681.159
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		1.571.301.318.841

3.2.4. Belanja Daerah

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, diperlukan penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Pada RKPD 2019 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 5,2 %. Berdasarkan tema pembangunan RKPD tahun 2019, arah kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing investasi daerah. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- (1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.
- (3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain mendukung program penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR; dan meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, perbaikan mutu layanan kesehatan;
- (4) Terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;

(5) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota, diarahkan meningkatkan kualitas layanan publik (SPM) di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penetapan APBD 2018 dan proyeksi 2019 Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3.5.
Realisasi dan Target Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2019

NO	Uraian	2017	2018	2019
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.186.380.718.311	5.193.673.675.886	4.504.595.301.456
2.1.1	Belanja Pegawai	1.453.137.226.055	1.672.792.329.286	1.871.179.951.456
2.1.2	Belanja Hibah	947.492.734.000	1.055.451.599.600	117.714.200.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	4.187.500.000	5.500.000.000	5.500.000.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.072.374.423.000	1.890.570.835.000	2.002.746.750.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	709.171.909.856	551.858.912.000	275.000.000.000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	16.925.400	17.500.000.000	207.454.400.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.053.286.350.781	3.372.576.324.114	3.102.557.329.375
2.2.1	Belanja Pegawai	221.171.866.620	215.026.293.328	237.509.512.652
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.893.779.099.403	1.629.786.519.852	1.688.642.522.023
2.2.3	Belanja Modal	938.335.384.758	1.527.763.510.934	1.176.405.294.700
Total Jumlah Belanja		8.239.667.069.093	8.566.250.000.000	7.602.000.000.000

3.2.5. Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan pada:

- (1) pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- (2) investasi pemerintah melalui penyertaan modal kepada BUMD diutamakan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah kepada BUMD yang memiliki kinerja yang baik;



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

- (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas;
- (4) mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah maka Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen cetak biru (blue print) Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan Provinsi Kalimantan Timur 2018-2019.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, maka RKPd tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang berada pada tahapan transisi, dimana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018 sedangkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPd Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV (Tahun 2019-2023) dengan tujuan utama pembangunan adalah **“Mewujudkan Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Di Segenap Wilayah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tujuan utama tersebut Kalimantan Timur yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2018, telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam RPJPD Tahap IV (Tahun 2018-2023) Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan melalui sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi;
4. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakkan hukum.

Gambar 4.1
Aspek Utama Tujuan Pembangunan RPJPD Tahap IV Kalimantan Timur





GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Selanjutnya berdasarkan sasaran pokok RPJD Tahap IV (Tahun 2018-2023) Provinsi Kalimantan Timur tersebut diinterpretasikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode 2018-2023 dibawah ini, yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Tabel 4.1
Interpretasi/Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Periode 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Sasaran Pokok RPJD Tahap IV

SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE-IV	INTERPRETASI/ARAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023	INTERPRETASI/ARAHAN SASARAN PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023
		1 Meningkatkan kualitas pendidikan
		2 Meningkatnya daya saing tenaga kerja
		3 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		4 Menurunnya tingkat kemiskinan
		5 Menurunnya tingkat pengangguran
		6 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
		7 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan
		8 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
		9 Meningkatnya kemandirian pangan
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Sasaran pokok ini dijabarkan pada tujuan Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran pembangunan Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	
		11 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public
		12 Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN

4.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 ini selain harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2019 yang mengusung tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2019, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2019 sebagai berikut:

1. **Prioritas 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.**

Sasaran umum nasional yang diakomodir dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2019 untuk mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar antaralain bantuan pendidikan, subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi tuberkulosis, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, presentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV, akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan kepemilikan akte kelahiran.

2. **Prioritas 2: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.**

Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dilakukan melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, beberapa sasaran umum nasional dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2019 mencakup pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, pembangunan jalan baru, pengembangan jalan tol, persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.

3. **Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.**

Untuk mendukung pencapaian prioritas ini maka program yang dilakukan mencakup peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian, percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan, peningkatan nilai tambah jasa produktif, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, dan pengembangan lptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

4. **Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.**

Program prioritas yang dilakukan di daerah mencakup peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sumber daya air, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan, pemantapan regulasi dan penguatan kelembagaan energi, pangan dan sumber daya air.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Demi menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas nasional maka program prioritas mencakup Kamtibmas dan Keamanan siber, kesuksesan pemilu, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi, dan efektivitas diplomasi.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan di atas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki maka besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target RKP Tahun 2019 di Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target	
		2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	≤1 %	3,01
2	Tingkat Kemiskinan	≤6%	≤5%
3	Tingkat Pengangguran	≤8%	≤8%

Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara, baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh.

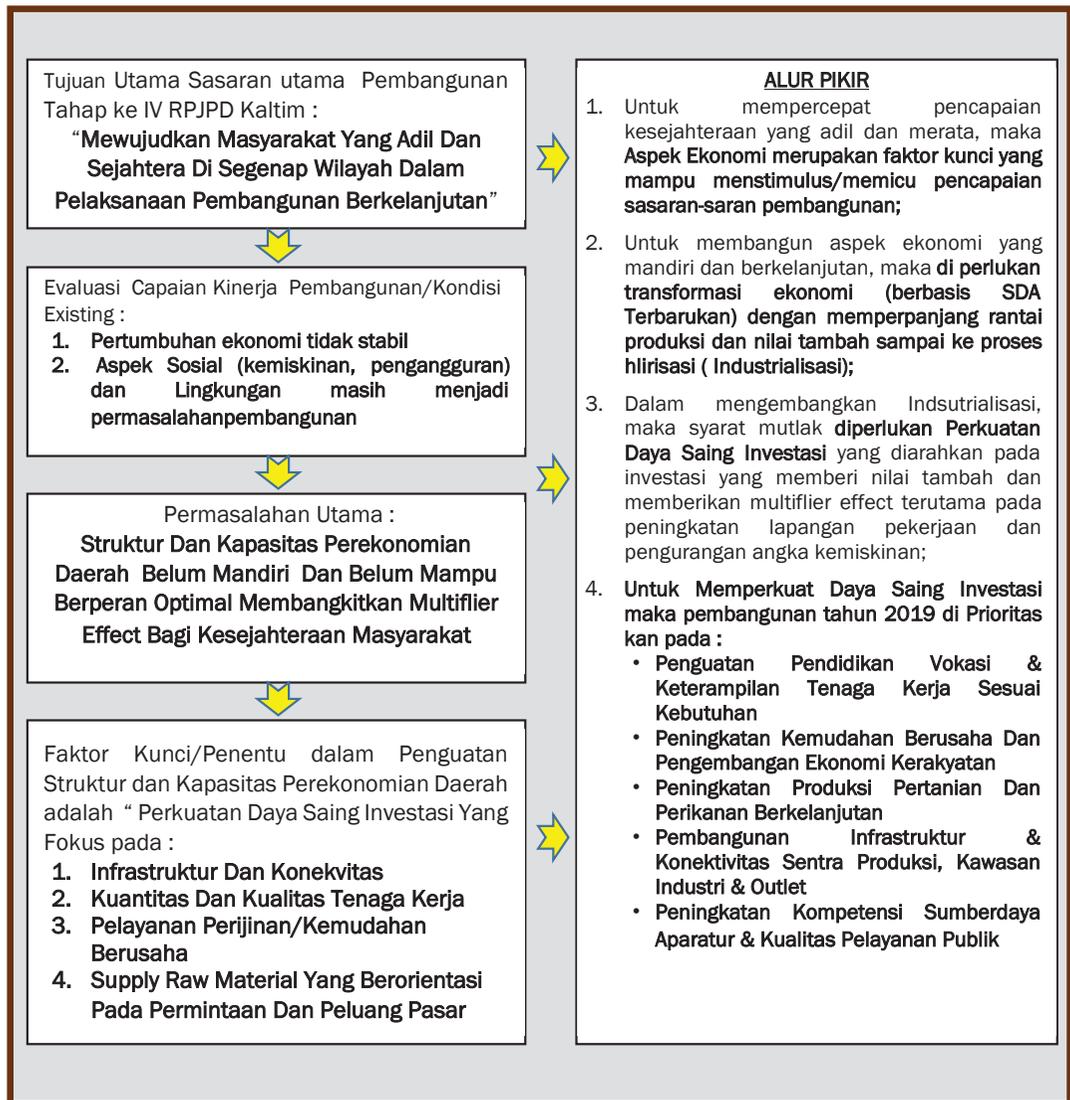
4.1.3 Tema dan Strategi Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD, RKP, evaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, maka tema yang diangkat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah ***“Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”***. Analisa dan perumusan Tema RKPD tahun 2019 didasarkan pada apa yang menjadi tujuan utama pembangunan yang direncanakan pada RPJPD tahap IV. Selanjutnya dari pemahaman terhadap apa yang menjadi tujuan utama pembangunan tahap IV RPJPD, di analisa capaian kinerja pembangunan pada masing-masing indikator kinerja saat ini.

Tujuan Utama RPJPD Kalimantan Timur Tahap IV adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Di Segenap Wilayah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan”***. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja disimpulkan bahwa Aspek Ekonomi yang merupakan aspek kunci belum mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan evaluasi dan analisa aspek yang menjadi faktor kunci, maka aspek ekonomi merupakan aspek yang menjadi fokus dalam pembangunan tahun 2019.

Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Secara spesifik Tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri merupakan kata kunci dalam upaya mewujudkan cita-cita transformasi struktur ekonomi Kalimantan Timur menuju kemandirian ekonomi;
2. Untuk mewujudkan hilirisasi industry, maka perlu didorong percepatan pengembangan dan pertumbuhan dunia usaha dan ekonomi kreatif yang berbasis sumberdaya alam yang terbarukan;
3. Untuk mempercepat pengembangan dan pertumbuhan dunia usaha dan ekonomi kreatif, maka perlu perkuatan daya saing investasi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap daya saing investasi Kalimantan Timur di simpulkan bahwa daya saing investasi perlu di dukung oleh factor-faktor kunci daya saing investasi yaitu : menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, meningkatkan pelayanan perijinan usaha melalui penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja serta peningkatan kepastian dan potensi produksi pertanian sebagai bahan baku industrialisasi yang berorientasi pada permintaan pasar baik pasar domestic maupun pasar global;
4. Disamping faktor utama pengungkit daya saing investasi di atas, tema RKPD 2019 juga mengarusutamakan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang ditekankan pada aspek :
 - **Lingkungan** : Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
 - **Kemiskinan** : salah satu arget Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - **Kesempatan Kerja/Pengangguran** : Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
5. Untuk pencapaian target pembangunan, maka salah factor kunci keberhasilan adalah adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu maka perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayan public yang berkualitas terutama pada pelayanan jaringan jalan, listrik

dan air bersih. Pelayanan jaringan jalan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pada daerah-daerah yang memiliki aksesibilitas yang rendah (daerah 3T).

4.1.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

A. Sasaran RKPD 2019

Memperhatikan dan mempedomani sasaran pembangunan pada RKP tahun 2019 dan RPJPD tahap IV, maka sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3
Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2019
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,5±1
		Investasi (Triliun Rp)	42
		Tingkat Inflasi (%)	4±1
2	Meningkatnya daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	75,30
		Indeks Gini	0,329
		Indeks Williamson	0,45
4	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12
5	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,5
6	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,02
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,54
		Jalan dalam kondisi mantap (%)	56,89
		Rasio Elektrifikasi (%)	80,50
		Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	20,30
		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	5,00
		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang terhubung (koneksi)	2
		Kontribusi Sub sektor perkebunan (%)	4,50
		Kontribusi Sub sektor perikanan (%)	1,60
		Rasio pemenuhan daging sapi lokal (%)	27,60
		Rasio pemenuhan kebutuhan beras (%)	65
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ton CO2Eq)	12,16
14	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	IKM	85
15	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2019. Sesuai dengan Tema RKPD 2019 “**Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri**”, maka kata kunci pada tema tersebut adalah Daya Saing Investasi. Dengan memahami permasalahan pada daya saing investasi di Kalimantan Timur maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah :

1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan;
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan;
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet;
5. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 juga disusun dengan mempedomani pada prioritas nasional pada RKP tahun 2019. Beberapa prioritas nasional dan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2019 memiliki keterkaitan dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional. Namun ada beberapa prioritas nasional yang tidak masuk dalam prioritas pembanguana Kalimantan Timur seperti Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, namun dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sudah terdapat unsur yang mendukung penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti pembangunan jalan dan jembatan pada daerah 3T. Demikian pula pada Priotitas Nasional Stabilitas kemandirian nasional dan kesuksesan pemilu.

Gambar 4.3
Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019





GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan pada tabel diatas merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPd tahun 2019 yang tersusun sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Pembangunan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
RKPd Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS		
				1	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	1	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa
				2	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	1	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)
						2	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi
				3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
						2	Pengembangan mutu dan kualitas tenaga pendidik kejuruan
						3	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)
				4	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	Penyelenggaraan paket C setara SMU
						2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
						3	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
						4	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA
						5	Pengadaan Meubelair
						6	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
						7	Pembangunan Laboratorium
						8	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri
				5		1	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah
						2	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah
						3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
					4 Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan
					5 Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
				6	1 pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
					2 Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan
					3 peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan
					4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
					1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
					2 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
					3 Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan
				8	1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
					2 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
				9	1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
					2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
			Pembentukan kelompok usaha masyarakat miskin		3 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya
				10	1 Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Permukiman
					2 Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh
					3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh
		Penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kerja yang padat karya	11	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif
				12	1 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja
					2 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
				3	1 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS		
	pelayanan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	Kawasan Industri dan Outlet	lintas di ruas jalan provinsi		2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	
					3	Peningkatan Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	
			Revitalisasi Terminal Penumpang tipe B	14	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	1	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I
						2	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II
				15		1	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
						2	Pembangunan Jalan
						3	Pembangunan Jembatan
				16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	1	Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut
						2	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDP
						3	Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran
			Pengendalian Daya Rusak Air	17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1	Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Daya Rusak Air
						2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
						3	Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pemenuhan kebutuhan air minum	18	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan	1	Pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung
						2	Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Layak
						3	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan
			Pengembangan pelayanan listrik di daerah 3T	19	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	1	Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah
						2	Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
						3	Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
20	Program Diversifikasi energi	1			Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan		
		2			Pengembangan Bioenergi		
3	Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air						
		Fasilitasi pemanfaatan KEK MBTK oleh perusahaan industry	21	Program penataan struktur industri	1	Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS		
	pengolahan dan perdagangan	pengembangan ekonomi kerakyatan			2 Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah		
			Pengembangan sarana dan prasarana pada KEK MBTK	22	Program Pembangunan Sarana Prasarana KEK MBTK	1 Pembangunan Tangki Timbun KEK MBTK	
						1 Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut	
						2 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDP	
						3 Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran	
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut	
						2 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDP	
					3 Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran		
				Penyediaan air baku kawasan industry	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Daya Rusak Air	
						2 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	
						3 Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air	
					23		1 Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal
							2 Penyusunan informasi penanaman modal
							3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi
			24		1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		
					2 Pengembangan pasar lelang daerah		
					3 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		
					4 Kontak Dagang		
			25		1 Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan		
					2 Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)		
			26		1 Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan		
					2 Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan		
			27	Program Pengembangan perikanan tangkap	1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan		
					2 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
					3 Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
				28	1 Peningkatan Kualitas Mutu Benih
					2 Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang
					3 Operasional pembenihan di Balai perikanan dan Hatchery Skala Rumah Tangga
					4 Rehab sarana dan prasarana perbenihan
					5 Peningkatan SDM Perbenihan
				29	1 Pengembangan Mini Ranch Sapi Potong
					2 Pengembangan Agribisnis Peternakan
					3 Pengembangan Informasi Peternakan
			Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	30 Program Peningkatan Produksi Peternakan	1 Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan
					2 Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
					3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak
			Peningkatan varietas benih padi lokal unggulan	31 Program peningkatan produksi benih tanaman pangan	1 Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Padi dan Palawija
				32	1 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
					2 Pengembangan Sentra Produksi Padi
					3 Pengelolaan Database Produksi Tanaman Pangan
			Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Daya Rusak Air
					2 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
					3 Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air
				33	1 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
					2 Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
					3 Perencanaan dan Tata Hutan
					4 Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
				34	Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan
						2 Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan
						3 Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah
				35		1 Efisiensi penggunaan bahan bakar
						2 Penggunaan Bahan Bakar Energi Baru Terbarukan
				36		1 Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat
						2 Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik
			Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			3 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN		peningkatan integritas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	37	Program pengembangan zona integritas	1 Penerapan Zona Integritas pada Perangkat Daerah

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka pengembangan kabupaten/kota akan ditujukan pada peningkatan daya saing investasi untuk memacu percepatan hilirisasi komoditi pada tiap kabupaten/kota. Peningkatan daya saing investasi pada tiap kabupaten/kota diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2019 melalui peningkatan produktivitas/kontribusi sektor yang menjadi potensi/keunggulan masing-masing kabupaten/kota. Peningkatan produktivitas/kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi *main prime mover* (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan/Jasa, Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Dari sisi hilirisasi industri, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat investasi sektor pengolahan/industrialisasi melalui peningkatan infrastruktur pendukung dan kemudahan berusaha. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK dan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung serta mempercepat beroperasinya proyek-proyek strategis Nasional di Balikpapan dan Bontang. Pengembangan kewilayahan didasarkan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sasaran pembangunan kabupaten/kota tahun 2019 ditujukan pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peran sektor/lapangan usaha potensial pada masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 5.1.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Usaha Potensial
pada Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	SHARE PDRB	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2019 (%)	LAPANGAN USAHA POTENSIAL
1	Kutai Kartanegara	19,85	2.15	Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan Perdagangan
2	Kutai Timur	18,45	4.19	Pertanian dan Perdagangan
3	Balikpapan	19,03	4±1	Industri Pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

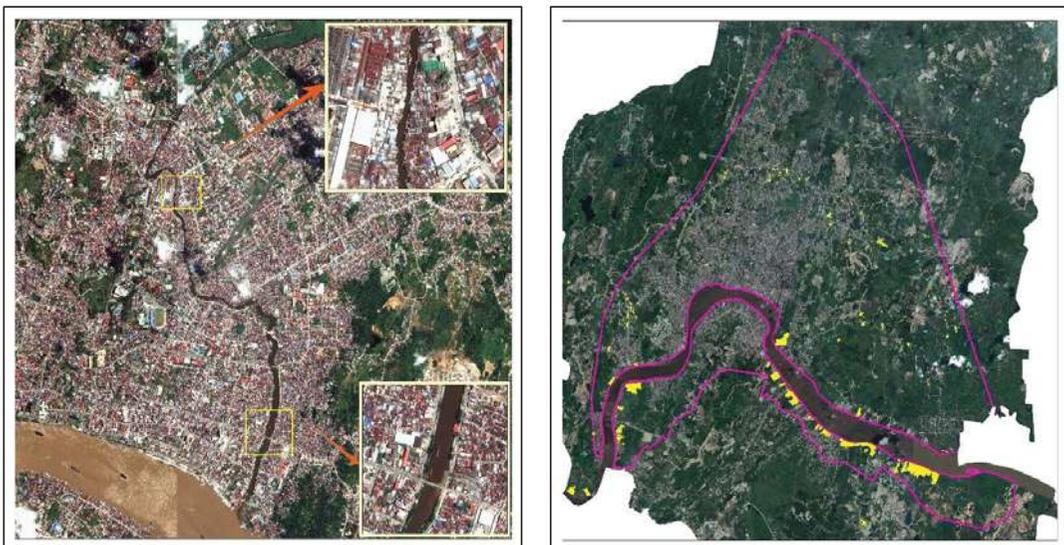
NO	KABUPATEN/KOTA	SHARE PDRB	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2019 (%)	LAPANGAN USAHA POTENSIAL
4	Bontang	10,17	2±1	Industri Pengolahan, Perdagangan, Sektor Perikanan
5	Samarinda	11,87	3±1	Perdagangan dan Jasa serta Industri Pengolahan
6	Paser	7,38	0±1	Pertanian, Perikanan, Pengolahan dan Perdagangan
7	Berau	6,86	4.83	Pertanian, Perikanan, Transportasi dan Perdagangan serta Pariwisata
8	Kutai Barat	4,25	4.45	Perdagangan dan Industri Pengolahan
9	Penajam Paser Utara	1,62	3.01	Pertanian dan Industri Pengolahan
10	Mahulu	0,51	5.89	Pertanian pada sektor perkebunan, Perdagangan didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang baik

5.1.1 Arah Pengembangan Kota Samarinda

Peran Kota Samarinda pada tahun 2019 terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat. Pada tahun 2019, Kota Samarinda diharapkan dapat berkontribusi sebesar 11,87% dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 3%. Pembangunan Kota Samarinda diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah.

Gambar 5.1.

Lokus Penanganan Banjir di Sekitar Sungai Karang Mumus (kiri) dan Deliniasi Areal Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

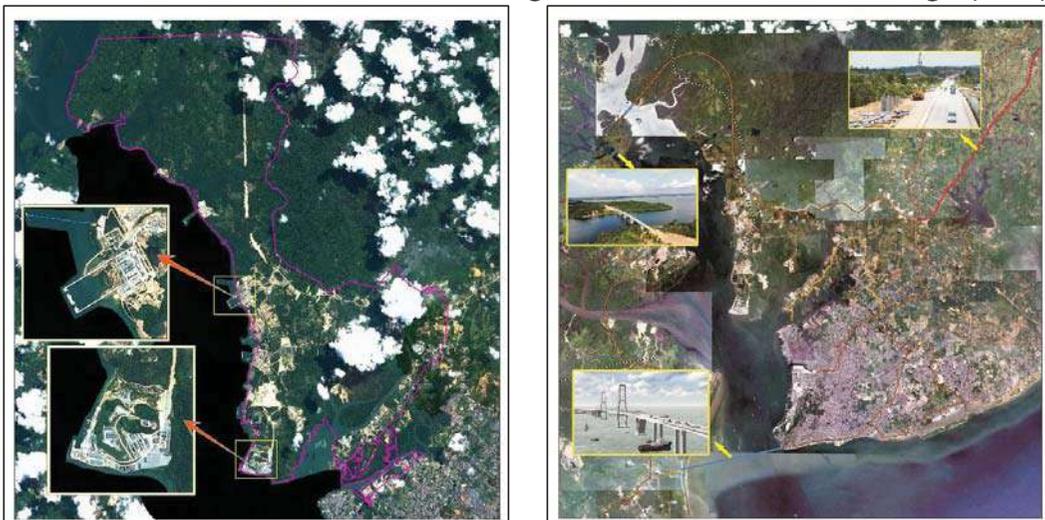
Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya penanggulangan permasalahan banjir yang menghambat optimalisasi peluang sektor Perdagangan dan Jasa serta Industri Pengolahan dengan menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan terutama pada daerah aliran sungai Karang Mumus serta kawasan-kawasan yang rawan tergenang banjir. Kota Samarinda mempunyai potensi besar pada sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Pengembangan sentra perdagangan dan jasa dilakukan dengan konsep pengembangan sentra perdagangan dan jasa baru dengan memperhatikan keterkaitan terhadap daerah sekitar serta memperhatikan factor daya dukung dan dampak lingkungan terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, Kota Samarinda juga diarahkan untuk sebagai salah satu daerah untuk pengembangan sektor industri pengolahan, antara lain industri kimia dasar, industri pangan dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di Kota Samarinda didukung oleh pengembangan kawasan Samarinda Utara sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa baru. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antar pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan keterkaitan antar wilayah serta efisiensi ekonomi.

5.1.2 Arah Pengembangan Kota Balikpapan

Peran Kota Balikpapan terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan daerah pada potensi dan keunggulan Kota Balikpapan. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya pengembangan Kawasan Industri Kariangau, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas dari dan menuju Kawasan Industri Kariangau.

Gambar 5.2.

Pengembangan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan (kiri) dan Pengembangan Jaringan Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Mendukung Konektivitas Kawasan Industri Kariangau (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pada tahun 2019, Kota Balikpapan diharapkan dapat berkontribusi sebesar 19,03% terhadap PDRB Kalimantan Timur dengan pertumbuhan sebesar 4%. Kinerja beberapa Lapangan Usaha yang mendominasi di Kota Balikpapan antarlain Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan cukup baik. Melihat kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan difokuskan kepada peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung industri pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di sisi sektor industri pengolahan, Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak melalui rencana pembangunan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan dan diharapkan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 30.000 tenaga kerja baru. Disamping itu, pengembangan kawasan Industri Kariangau diharapkan dan memberikan peran terhadap perekonomian Kalimantan Timur didorong melalui percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung. Pada sektor transportasi dan pergudangan, arah pembangunan difokuskan pada optimalisasi Pelabuhan Kariangau sebagai outlet maupun inlet pemasaran produk-produk perdagangan dari dan menuju Kalimantan Timur.

5.1.3 Arah Pengembangan Kota Bontang

Pada tahun 2019, peran Kota Bontang terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi daerah lain seperti Kota Balikpapan dan Samarinda, namun perekonomian Kota Bontang tetap tumbuh positif diperkirakan sebesar 2%.

Gambar 5.3.
Pengembangan Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL (kiri) dan
Kawasan Peruntukkan Perikanan di Kota Bontang (kanan)



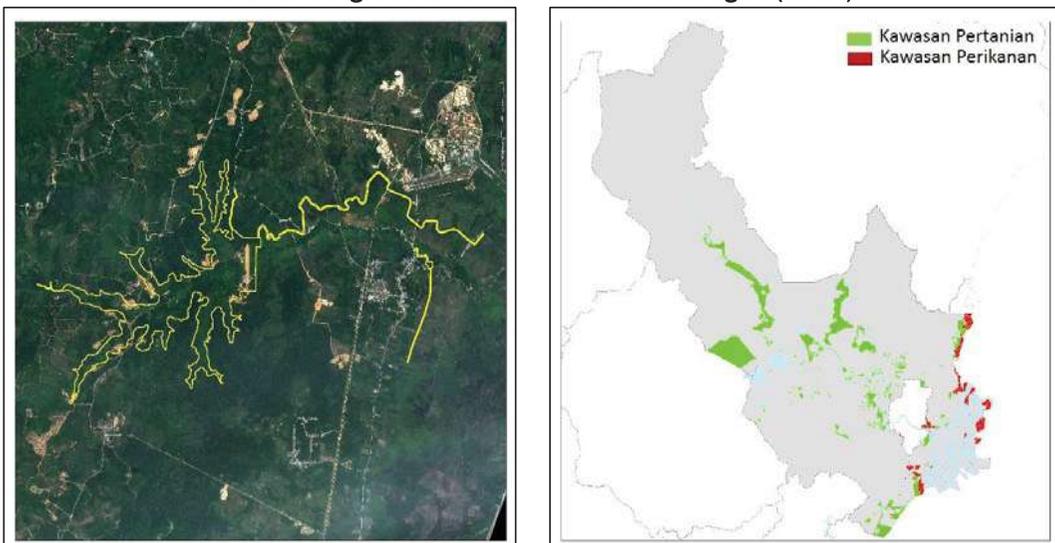
UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pengembangan Kota Bontang diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan Kota Bontang. Arah pembangunan Kota Bontang dalam RKPD 2019 diarahkan pada percepatan Pembangunan Kilang Refinery pada Kawasan Industri PT. Badak dan Pembangunan NPK Cluster pada Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim. Sebagai penggerak ekonomi Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan salah satu pusat dari kegiatan industri pengolahan berbasis minyak dan gas bumi. Meski demikian Kota Bontang tidak hanya fokus pada pengembangan industri pengolahan namun juga pada sektor lainnya yang memerlukan perhatian khusus seperti perdagangan dan perikanan. Strategi pengembangan Kota Bontang pada sektor perdagangan, diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan untuk mendukung perdagangan antar daerah yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Sedangkan pengembangan sektor perikanan, diarahkan pada peningkatan produksi dan membangun jaringan *supply* produksi perikanan terutama untuk meningkatkan daya saing investasi hilirisasi produk perikanan dan kelautan yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.

5.1.4 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Peran Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan menurun seiring dengan meningkatnya peran kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2019, kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan sebesar 19,85% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,15%. Pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah.

Gambar 5.4.
Lokus Bendungan dan Jaringan Irigasi Marangkayu (kiri) dan Kawasan Peruntukkan Pertanian
Tanaman Pangan serta Perikanan di Kutai Kartanegara (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar terutama pada wilayah Hulu dan Pesisir terkait konektivitas dan penyediaan energi dan air bersih. Salah satu proyek strategis yang menjadi focus pada RKPD 2019 adalah percepatan pembangunan Bendungan Marangkayu yang diharapkan untuk menambah penyediaan air baku, pengendalian banjir dan irigasi pertanian. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi besar pada sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pengembangan sektor pertanian untuk komoditi Jagung, Karet, Sawit dan Lada diarahkan pada peningkatan produksi melalui pengembangan areal tanam. Disamping itu juga didorong kemudahan berinvestasi pada untuk meningkatkan produksi pengembangan industri pengolahan komoditi yang memiliki prospek guna meningkatkan nilai tambahnya.

Pada sektor perikanan yang berlokasi di Kota Bangun, Muara Badak, Anggana, dan Muara Jawa diarahkan untuk pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan (Kota Bangun dan Samboja), pembangunan cold storage, pembangunan industri rumput laut serta pembangunan SMK Perikanan di Muara Jawa. Disamping itu, pembangunan aksesibilitas di daerah Samboja juga diharapkan guna meningkatkan arus barang dan jasa.

5.1.5 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Kutai Timur terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan menurun akibat peningkatan kontribusi pada kabupaten/kota lainnya. Dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Gambar 5.5.
Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (kiri) dan Pengembangan Sarana Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas KEK MBTK di Kutai Timur (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

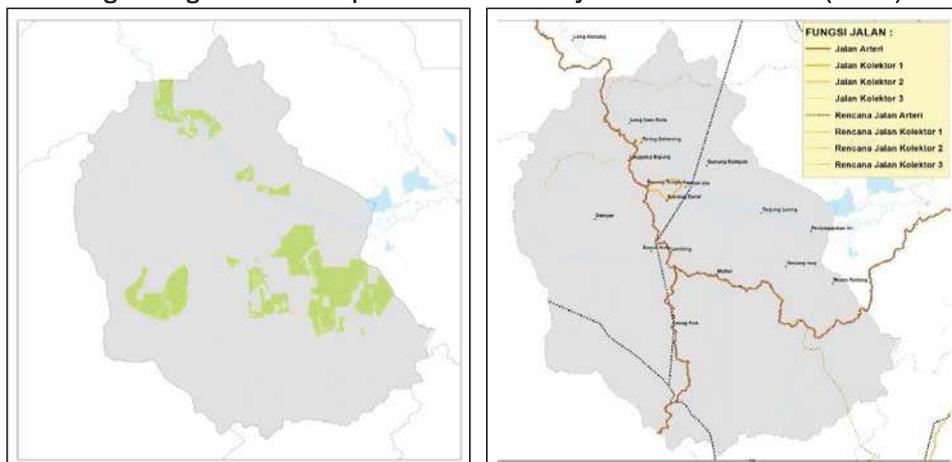
Arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam RKPd 2019 diarahkan pada percepatan beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pusat Outlet produksi CPO yang bersumber dari PKS di sekitar KEK MBTK. Percepatan beroperasinya KEK MBTK ditopang dengan membangun jaringan transportasi dari lokasi PKS menuju KEK MBTK serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada lokasi KEK MBTK seperti pembangunan Tangki Timbun CPO dan prasarana pelabuhan. Pembangunan jaringan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPd 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan terutama di Muara Wahau dan Sangkulirang. Disamping itu juga perlu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk mengisi pada aktivitas ekonomi pada KEK MBTK.

Pada tahun 2019, dengan beroperasinya Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri pengolahan yang selama ini memiliki kontribusi kecil di Kutai Timur, dimana KEK MBTK merupakan sentra hilirisasi industri, berbasis kelapa sawit (*oleokimia*). Dengan demikian Kutai Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 18,45% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan rata pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,19% di tahun 2019.

5.1.6 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Barat

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Kutai Barat terhadap perekonomian Kalimantan Timur tergolong stabil dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kutai Barat. Pada tahun 2019, Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 4,25% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45% persen di tahun 2019.

Gambar 5.6.
Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan di Kutai Barat (kiri) dan
Pengembangan Akses Transportasi Dari dan Menuju Pusat-Pusat Produksi (kanan)



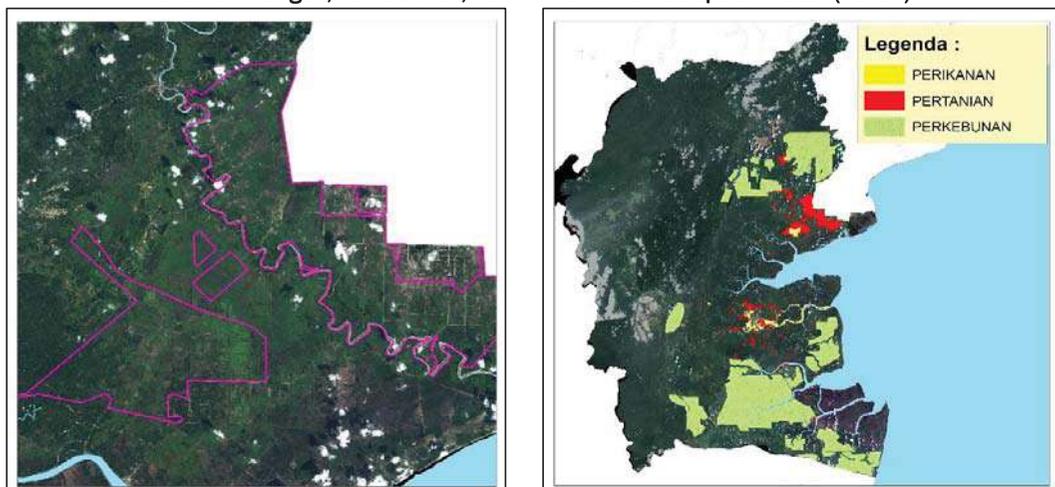
UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada pengembangan pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Hal ini dalam rangka meningkatkan peran sektor lain di luar pertambangan dan penggalian. Peningkatan peran sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produksi perkebunan terutama karet dan kakao melalui revitalisasi perkebunan yang sudah tidak produktif dan pemberian benih karet yang berkualitas kepada petani. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi juga dilakukan peningkatan akses transportasi darat dari dan menuju pusat-pusat produksi pertanian. Disamping itu, didorong untuk adanya pengolahan produk pertanian melalui peningkatan daya saing investasi dengan melalui penguatan rantai produksi dari kulu ke hilir.

5.1.7 Arah Pengembangan Kabupaten Paser

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Paser terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada pengembangan pertanian *food estate* sebagai upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan padi (swasembada pangan) di Kalimantan Timur.

Gambar 5.7.
Areal Pengembangan Food Estate di Kabupaten Paser (kiri) dan Peruntukkan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Perikanan di Kabupaten Paser (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pada tahun 2019, Kabupaten Paser diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 7,38% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi 1% pada tahun 2019. Mengingat dominannya peran sektor pertambangan dan penggalian di Paser, mengakibatkan perekonomian lemah akan guncangan ekonomi global. Maka berdasarkan pengembangan potensi kewilayahan, Kabupaten Paser diarahkan untuk melakukan pengembangan pada sektor

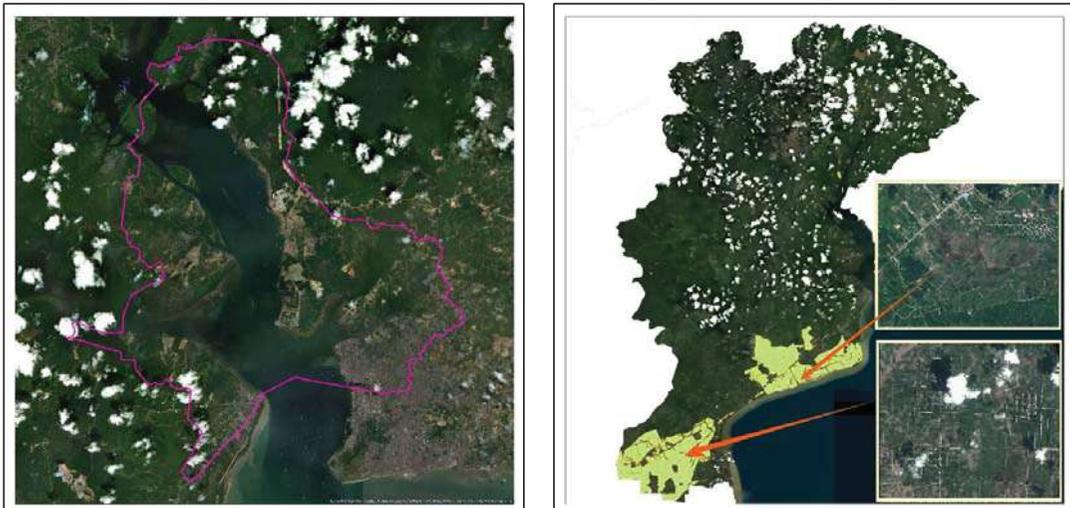
pertanian tanaman pangan (padi dan jagung), perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada), peternakan (sapi dan kambing), perikanan, industri pengolahan dan perdagangan.

5.1.8 Arah Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Peran wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pembangunan jembatan tol PPU-Balikpapan, serta peningkatan akses pada kawasan industri dan pelabuhan.

Pada tahun 2019, Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,62% terhadap perekonomian Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,01%. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan. Industri Pengolahan di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Kawasan Industri Buluminung serta Industri Migas pada Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam. Tentunya perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan energi, dan air bersih.

Gambar 5.8.
Pengembangan Kawasan Industri Buluminung (kiri) dan Areal Pengembangan Food Estate di Kabupaten Penajam Paser Utara (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pada pengembangan Lapangan Usaha Pertanian berkaitan dengan pengembangan food estate yang menjadi proyek strategis nasional terutama dalam pemenuhan kebutuhan padi. Bukan hanya itu, perlu juga diarahkan untuk pengembangan pada subsektor perikanan (tangkap dan

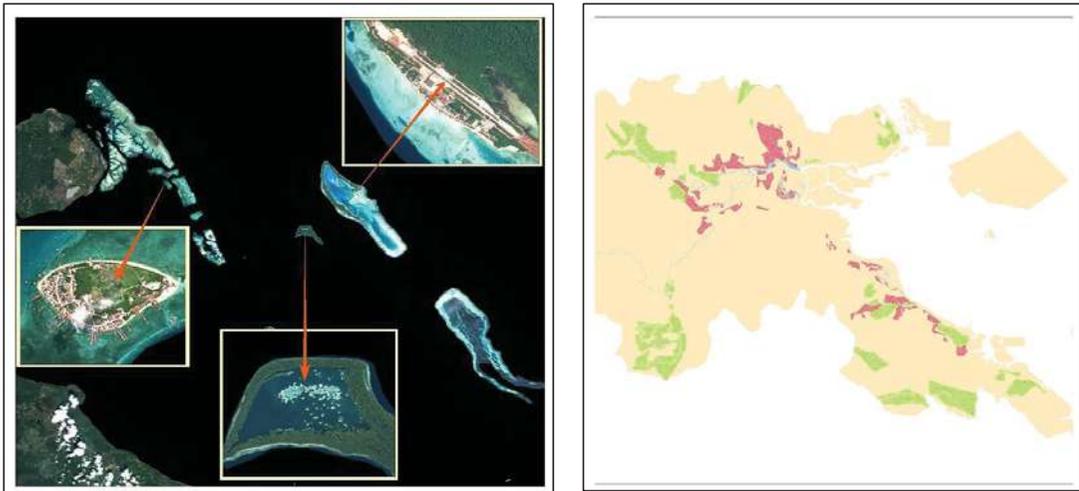
budidaya) dan peternakan. Hal ini tentunya akan membantu mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Paser.

5.1.9 Arah Pengembangan Kabupaten Berau

Peran Kabupaten Berau terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan.

Pada tahun 2019, Kabupaten Berau diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 6,86% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,83%. Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata. Dengan beroperasinya Bandara Maratua diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas pariwisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Gambar 5.9.
Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya (kiri) dan Areal Pengembangan Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Berau (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

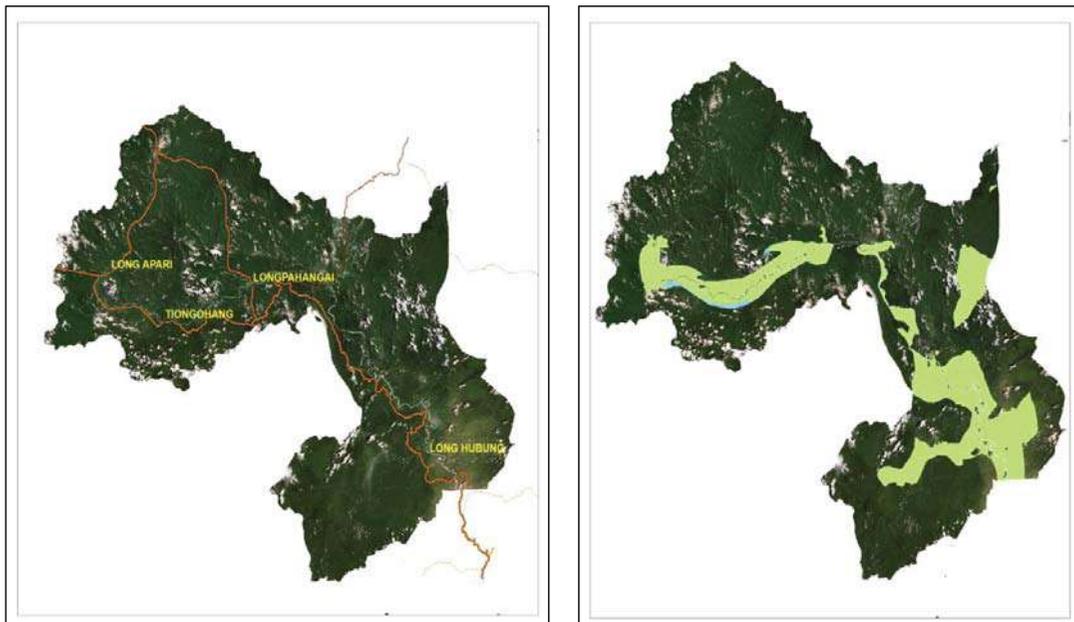
Untuk memaksimalkan potensi wilayah, maka arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Berau diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, Transportasi dan Perdagangan serta Pariwisata. Pada Lapangan Usaha Pertanian, untuk sektor tanaman pangan pada komoditas padi, sektor perkebunan pada komoditas kelapa sawit, kakao dan lada. Tentunya ini dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Berau. Pariwisata masih perlu dioptimalkan untuk benar-benar berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan destinasi wisata yang ada di tempat lain seperti Gili dan Raja Ampat.

5.1.10 Arah Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu

Pada tahun 2019, peran wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah yang masih sulit dijangkau, terutama daerah yang tidak dapat diakses melalui jalan darat. Penyediaan sumberdaya energi listrik dan air bersih.

Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 0,51% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,89%. Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi daerah yang masih belum dimaksimalkan, sehingga jika ditilik lebih jauh Mahakam Ulu masih memiliki modal alam yang masih asri untuk dijadikan modal pembangunan dan diupayakan kelestariannya.

Gambar 5.10.
Pembangunan Akses Jalan di Kawasan Perbatasan (kiri) dan Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Mahulu (kanan)



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Maka, arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian pada sektor perkebunan (komoditas karet dan kakao), serta Lapangan Usaha Perdagangan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang baik. Kedepan, dengan akan terbangunnya Jalan Paralel Perbatasan (Batas Kalbar – Tiong Ohang –



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Long Pahangai – Long Boh) 243 Km dan Jalan Akses menuju Paralel Perbatasan (Tering – Long Bagun – Long Pahangai) 250 Km akan membuka akses wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Pahangai dan Long Apari dari keterisolasian.

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2019 adalah **“Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”** Melalui penetapan fokus/tema pembangunan 2019 yang berorientasi kepada peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri agar mampu mendukung hilirisasi industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas. Sejalan dengan fokus/tema tersebut, dalam pengimplementasian program dan kegiatan prioritas pembangunan, berbagai aspek prioritas lain tetap menjadi unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini harus melibatkan *stakeholder* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Lebih lanjut, agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya

harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2019, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/OPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan OPD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 terlampir pada lampiran 6.1

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.311.100.049.375
1.01	Pendidikan				399.666.075.875
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				399.666.075.875
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				399.666.075.875
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12%		181.395.842.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	kk, smd	181.395.842.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	200 Unit		510.000.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	4 Unit	smd	100.000.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah gedung kantor skpd dan unit kerja internal skpd yang dipelihara	4 Unit	smd	410.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95 Orang		2.750.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	50 Kali	smd	1.750.000.000
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih	550 Orang	smd	1.000.000.000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Tahunan	12 Laporan		500.000.000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	250.000.000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	12 Laporan	smd	250.000.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa	95 Orang		2.204.744.875
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1220 Orang	smd	1.304.744.875
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB	200 Orang	smd	900.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 Bulan		11.400.000.000
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	500 Orang	smd	3.000.000.000
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas tenaga pendidik kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	250 Orang	smd	900.000.000
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	1500 Orang	smd	7.500.000.000
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	12 Bulan		3.295.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	40 Laporan	bru, ktm, kkr, smd, kbr, mah	2.225.000.000
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	3 Kegiatan	smd	220.000.000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 Laporan	smd	350.000.000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	10 Kab/kota	smd	500.000.000
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	98%		23.234.000.000
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	40000 Orang	smd	23.234.000.000
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah	95%		3.000.000.000
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	415 Orang	smd	1.500.000.000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang	smd	1.500.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	85%		75.123.092.000
1.01.39.02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU	100 Orang	smd	264.000.000
1.01.39.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	10 Kab/kota	smd	110.000.000
1.01.39.05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	10 kab/kota	smd	17.100.000.000
1.01.39.06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab / Kota	smd	880.000.000
1.01.39.08	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	10 Kab/kota	smd	119.900.000
1.01.39.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	25 sekolah	smd	-
1.01.39.23	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Atas	1 Sekolah	smd	-
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	10 Kab/Kota		56.649.192.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	95%		95.263.397.000
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	600.600.000
1.01.40.02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	9.000.000.000
1.01.40.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	100 Paket	smd	30.000.000.000
1.01.40.04	Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	30 Ruang	smd	6.750.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	42998 Orang		48.912.797.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	125 Orang		990.000.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10 Kab/Kota		550.000.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	10 Kab / Kota		220.000.000
2.16.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	10 Kab/Kota		220.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.02	Kesehatan				757.016.971.000
1.02.01	Dinas Kesehatan				44.545.271.000
1.02.01.01	Dinas Kesehatan				39.045.271.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		5.602.300.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	5.602.300.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	85%		4.848.779.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5 unit	smd	2.744.806.132
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5 unit	smd	2.103.972.868
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		2.414.884.200
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	60 Kali	smd	2.056.884.200
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 Kali		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12 Bulan		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	25 Orang	ktm, bpn, smd, kbr	358.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan & anggaran yang sesuai dengan standar	100%		547.750.000
		Persentase laporan akuntabilitas yang dilaporkan	100%		
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	11 Dokumen	smd	489.750.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	13 dokumen	smd	58.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	95%		2.851.838.868
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	95%	smd	2.851.838.868
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	92%		2.851.021.000
		Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	19.50%		
		Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	30%		
		Persentase puskesmas santun lansia	35%		
1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kab/kota yang melaporkan hasil PSG	100%	smd	883.580.000
		Persentase bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	95%		
		Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	90%		
		Persentase bumil mendapat TTD selama kehamilan	98%		
		Persentase remaja putri yang mendapat TTD	30%		
1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase instalasi farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	82%	btg, bpn, smd	357.871.000
		Persentase instalasi farmasi provinsi dan kab/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan BMHP	70%		
		Jumlah produk alkes dan PKRT yang disampling	39 produk		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah sarana produksi alkes dan PKRT dan sarana penyalur alkes yang dilakukan inspeksi	29 Sarana		
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan inspeksi sarana surveillance produk dan pengendalian perizinan sarana	30 orang		
1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	95%	smd	1.118.170.000
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kunjungan Neonatal pertama (KN1)	97.10%		
		Persentase sekolah yg mendapatkan pelayanan penjangkaran kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	70%		
		persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun Lansia	60%		
		persentase puskesmas yang mampu tatalaksana korban kekerasan rumah tangga	40%		
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pasar sehat yang diawasi	10 pasar	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	491.400.000
		Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	2000 unit		
		Jumlah sarana air minum yang diawasi	1124 unit		
		Jumlah desa/kel yang melaksanakan STBM	506 desa/kel		
		jumlah kab/kota sehat	9 kab/kota		
		jumlah desa yang ODF	281 desa		
		jumlah RSUD yang melaksanakan pengelolaan limbah B3	15 RSUD		
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terakses pelayanan kesehatan	100%		5.000.000.000
1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	persentase penduduk miskin yang mempunyai akses layanan kesehatan	100%	smd	5.000.000.000
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang mensosialisasikan kampanye gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat	100%		1.053.650.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kab/ kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye Germas hidup sehat	10 kab/kota	smd	1.053.650.000
		Persentase RT ber PHBS	70%		
		Persentase posyandu aktif	58.90%		
		Persentase desa yang mengalokasikan dana utk UKBM	16.96%		
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	89%		1.344.663.000
		Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kejadian luar biasa KLB untuk mencegah terjadinya KLB	82%		
		Persentase kab/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	100%		
		Case Notification Rate	70%		
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Succes Rate (SR)	90%	bru, btg, ktm, bpn, kkr, psr	233.785.000
		Case Notification Rate (CNR)	70%		
		Annual Paracite Incident (API)	1 per miles		
		Persentase orang yang minum obat filariasis	85%		
		Persentase anak yang minum obat cacing	90%		
		Jumlah kab/kota yang 50% puskesmas melaksanakan tatalak ISPA sesuai standar	8 kab/kota		
		Persentase kab/kota yang eliminasi kusta	100%		
		Persentase ODHA yang diobati	90%		
		Persentase kab kota melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis pada ibu hamil	80%		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Persentase kasus Gigitan Hewan Penular Rabies yang diberikan Vaksin Anti Rabies	92%		
1.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase kab/kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap min 90%	89%	bru, ktm, kkr, smd, kbr, psr	1.110.878.000
		Penemuan kasus APF non polio (0/00)	2 per milles		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	80%		
		Penemuan kasus discarded campak (2/100) penduduk	2 per seratus		
		Persentase Pelayanan kesehatan bagi daerah terdampak atau pada kondidi KLB/wabah/krisis kesehatan/bencana	82%		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi	180 Puskesmas		7.645.480.932
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, terluar dan terdepan	2 kab/kota	bpn, smd, kbr	692.770.000
		Jumlah puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alkes sesuai standar	150 puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS-PK	186 puskesmas		
		Jumlah puskesmas akreditasi sesuai road map	186 puskesmas		
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RS pemerintah yang terakreditasi	9 kab/kota	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	6.776.230.932
		Jumlah RSUD yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) edisi I	3 RSUD		
1.02.23.11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan/membina kesehatan tradisional	140 puskesmas	smd	176.480.000
		Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	10 RSUD		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	90%		1.891.720.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	30 unit	smd	1.889.320.000
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/Balai yang diadakan	2 unit	smd	2.400.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	90%		679.750.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana prasarana dan alkes yang dipelihara (maintenance)	15 unit	smd	679.750.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	80%		1.937.654.000
		Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	80%		
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang mendapat sertifikasi pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi	60%	smd	1.937.654.000
		Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	80%		
		Jumlah orang yang mengikuti uji kompetensi Jafung	500 orang		
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM	30%		375.780.000
1.02.59.01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase kab/kota yang min 50% desa /kel melaksanakan Posbindu	40%	smd	375.780.000
		Persentase kab/kota yang min 50% sekolahnya sudah implementasi KTR	30%		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Persentase IPWL aktif di wilayah Kaltim	10%		
		Persentase kab/kota yang 20% puskesmasnya melaksanakan pelayanan kes jiwa dan Nafza	40%		
1.02.01.02	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5.500.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan laboratorium sesuai standar	100%		5.500.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya tenaga teknis BLUD	12 Bulan	smd	5.500.000.000
		Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan		
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				464.000.000.000
1.02.02.01	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				10.000.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%		652.000.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah	3 laporan	smd	652.000.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	100%		9.348.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara	3 Paket	smd	9.348.000.000
1.02.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)				454.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan dasar masyarakat	100%		454.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	smd	454.000.000.000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				218.100.000.000
1.02.03.01	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				10.000.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100%		-
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pasien kasus KDRT dan kasus lainnya	12 Orang	bpn	-
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasi Pelayanan RSKD	100%		-
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Akreditasi	1 Sertifikat		-
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 Gedung		10.000.000.000
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Tersedianya Gedung Isolasi	1 Gedung	bpn	10.000.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	30 Unit		-
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	100%		-
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	300 Unit	bpn	-
1.02.03.02	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				208.100.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	100%		208.100.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Beserta Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	3 Belanja	bpn	208.100.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				30.371.700.000
1.02.04.01	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				12.371.700.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Adminstrasi Perkantoran	100%		7.639.292.600
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	7.639.292.600
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	80%		221.706.400
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	smd	119.451.400
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit	smd	102.255.000
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan dan Perizinan	16 Unit		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	95%		105.200.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Narkoba bagi Masyarakat	20 Kali	smd	105.200.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana/prasarana penunjang sesuai standart	100%		4.236.801.000
		Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	4 Jenis		
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	4 Jenis	smd	259.201.000
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Pasien yang diadakan	273750 Porsi/Tahun	smd	3.977.600.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	3 Jenis		168.700.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang layak pakai dan berfungsi baik	3 Jenis	smd	168.700.000
1.02.04.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				18.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat`	95%		18.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	10 Jenis	smd	18.000.000.000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.122.609.350.000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.122.609.350.000
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.122.609.350.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal OPD Terlayani Administrasi	4 Unit Kerja		13.768.658.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, ktm, bpn, smd	13.768.658.000
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%		
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal OPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana	4 Unit Kerja		9.260.057.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	13 Unit	bru, ktm, smd	2.982.970.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	bru, ktm, smd	6.277.087.000
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	100 m2		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		4.308.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	bru, ktm, bpn, smd	3.833.000.000
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	bru, ktm, smd	475.000.000
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKjLP)	75%		982.000.000
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	616.500.000
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	365.500.000
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi yang sesuai dengan spesifikasi fungsi jalan kolektor primer 2 dan 3	60 Km		697.553.297.000
1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	smd	30.000.000.000
1.03.15.02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	148 Km	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, mah	617.553.297.000
1.03.15.03	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah jembatan yang dibangun	7 Jembatan Bailey	ktm, kkr, mah	50.000.000.000
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6 Titik		
		Panjang saluran drainase yang dibangun	10000 Meter		
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	0 L/detik		179.033.451.000
		Luas Lahan Pertanian Pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1100 Ha		
		Luas areal yang terlindungi dari abrasi pantai	67.82 Ha		
		Luas Genangan Banjir	41 Ha		
1.03.16.01	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	1.11 Kilometer	btg, bpn, ppu, smd	157.315.051.000
		Jumlah lokasi banjir yang ditangani	4 lokasi		
		Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun	0 Unit		
1.03.16.02	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	20.5 Kilometer	bru, kkr	8.000.000.000
		Jumlah bendung yang dibangun	1 unit		
1.03.16.03	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Prasarana SDA yang direncanakan	0 Unit	bru, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	13.718.400.000
		Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan	0 Pergub		
		Jumlah Pembangunan Prasarana SDA yang Diawasi	0 Unit		
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Kapasitas Air Bersih	310 Liter/Detik		41.900.000.000
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	71.32%		
		Cakupan Pelayanan Persampahan	77.16%		
1.03.17.01	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi	1 Bangunan Gedung	smd, luarPrv	25.700.000.000
1.03.17.02	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	1 Unit	bpn, smd	10.500.000.000
1.03.17.03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Jumlah Gedung yang disusun perencanaannya (unit)	0 Unit	bru, ktm, smd, luarPrv	5.700.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun Perencanannya (unit)	5 Unit		
		Jumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pengawasan (Unit)	3 Unit		
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat	200 Orang		2.300.000.000
1.03.18.01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Perda dan Pergub pengaturan jasa konstruksi	1 Perda/Pergub	smd	1.200.000.000
1.03.18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	200 Orang	smd	700.000.000
1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pengawasan	10 Kab/Kota	smd	400.000.000
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah I	100%		46.855.467.000
1.03.19.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Panjang Jalan yang Dipelihara di Wilayah I	100 Km	bpn	36.855.467.000
1.03.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I	Jumlah Prasarana SDA yang Dipelihara di Wilayah II	0 Buah		10.000.000.000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Terpeliharanya sarana dan prasarana daerah irigasi, jalan dan jembatan serta terjaganya umur teknis dan ekonomis daerah irigasi, jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD PIPU Wilayah II	100%		49.075.064.000
1.03.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara efektif	10 Km	kk, smd, kbr, mah	39.075.064.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	5 Buah		
1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Terpeliharanya saluran pembawa, saluran pembuang, saluran primer, saluran sekunder dan bangunan bagi/sadap serta rumah jaga	100%	smd	10.000.000.000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah III	100%		48.777.606.000
1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III	405 KM	ktm	38.777.606.000
1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Jumlah Prasarana SDA yang Dipelihara di Wilayah III	0 Buah	bru, ktm	10.000.000.000
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor Penyelenggaraan Penataan Ruang	74.28%		5.540.750.000
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Prosentase Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi	0%	smd	3.067.500.000
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang	2 Kabupaten/Kota	smd	1.114.150.000
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	150 Lokasi	smd	1.359.100.000
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh	3 Kawasan		23.255.000.000
1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yg mendapat bantuan perbaikan Rumah (Kepala Keluarga)	150 KK	btg, smd, ppu, kkr, bpn	7.155.000.000
		Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah (Kepala Keluarga)	0 KK		
		Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)	1 Unit		
		Jumlah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah	0 KK		
1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani	3.77 ha	bpn, smd	15.000.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang direncanakan	2 Unit	bpn, smd, ppu, kkr	1.100.000.000
		Jumlah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pengawasan	6 Unit		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				15.707.652.500
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				7.875.852.500
1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				7.875.852.500
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.504.662.200
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	3.504.662.200
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		720.808.500
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	302.108.500
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	60 unit	smd	418.700.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		409.965.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 kegiatan	smd, luarPrv	298.825.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	28 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian dinas	3 stel	smd, luarPrv	111.140.000
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	22 orang		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	75%		142.747.500
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 dokumen	smd	4.500.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 dokumen	bpn, smd	138.247.500
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	85%		1.095.204.000
1.05.60.02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada	5 dokumen	smd	580.692.500
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada	5 dokumen		
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada	10 dokumen		
1.05.60.04	Penyelenggaran Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim	5 dokumen	smd	514.511.500
		Rapat Koordinasi teknis PPNS	2 dokumen		
		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim	10 dokumen		
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim	10 dokumen		
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli	80%		622.326.800
1.05.63.01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Melakukan Patroli	150 dokumen	smd	138.426.800
		Melakukan pengendalian massa	18 dokumen		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Pelaksanaan Pengamanan tindakan Non Yustisi dan Yustisi	15 dokumen		
1.05.63.02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokoler	Melakukan Pengawasan dan Pengamanan Protokoler	20 dokumen	smd	483.900.000
		Pengamanan Aset Pemprov. Kaltim	20 dokumen		
		Melakukan Pengamanan Khusus	12 dokumen		
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat	80%		753.975.500
1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim	10 dokumen	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd	392.070.000
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim	2 dokumen		
		FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen		
1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen	smd	361.905.500
		Monitoring Operasional Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak	10 dokumen		
		Apel Siaga Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak	1 dokumen		
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran	90%		626.163.000
1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim	10 dokumen	smd	429.710.000
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran	24 dokumen		
		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim	10 dokumen		
1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim	2 dokumen	smd	196.453.000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim	4 dokumen		
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4.586.400.000
1.05.02.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4.586.400.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%		573.186.000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	573.186.000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	12 Bulan		88.214.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	88.214.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		680.000.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25 Kali	smd	680.000.000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25 Kali		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	62%		45.000.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	4 Dokumen		22.500.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Laporan	6 Dokumen		22.500.000
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik	104 Konflik		800.000.000
1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Rakor dan Peserta Rakor FKDM	300 Orang	smd	386.440.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah	20 Orang		
1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Revitalisasi	70 Orang		188.160.000
1.05.15.26	Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan	Jumlah raker dan Peserta Raker Timdu PKS	150 Orang		225.400.000
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa	100%		600.000.000
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	285 Orang	smd	300.000.000
		Tersedianya data informasi perkembangan FPK di Daerah	1 Dokumen		
		Terlatihnya peserta yang mengikuti Kegiatan Pambauran Kebangsaan	100 Orang		
1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2000 Orang	smd	300.000.000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	77.50%		1.100.000.000
		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	74%		
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pileg/Pilpres 2019	77.50%		667.740.000
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Terseleenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	100 Orang		219.355.000
1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik	Terseleenggaranya kegiatan dan tersusunnya data parpol	80 Orang		212.905.000
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	1 Tahun		700.000.000
1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang		156.150.000
1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS	100%	smd	193.850.000
		Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas	1 Tim		
1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bahan Pokok ke 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		350.000.000
		Aparatur Kesbangpol yang bebas Narkoba	54 Orang		
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.245.400.000
1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.245.400.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran	100 Persen		1.688.350.000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.688.350.000
		Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini	84 O/B		
		Jumlah satuan tenaga penanggulangan bencana	14 O/B		
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		207.252.400
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	90 Bulan	smd	207.252.400
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	85 Persen		477.277.600
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	24 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	477.277.600
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	71 Kegiatan		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek	3 orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	160 Orang		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	75 Persen		117.500.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	53.500.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	64.000.000
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian	10 Kabupaten/Kota		
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	85 Kali		355.020.000
1.05.49.12	Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelenggaraan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	100 Persen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	355.020.000
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6 Desa/Kelurahan		225.000.000
		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dilakukan pembinaan lanjutan	2 Desa/Kelurahan		
		Persentase Pendataan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kaltim	20 Persen		
		Jumlah kab/kota yang terpasang alat peringatan dini (ESW)	1 Kab/Kota		
1.05.51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	30 Orang	smd, kbr, luarPrv	112.500.000
		Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana	30 Orang		
1.05.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	8 Kabupaten/Kota	bru, psr, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	112.500.000
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	5 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	100 Orang		
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5 Persen		175.000.000
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	10 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	175.000.000
1.06	Sosial				16.100.000.000
1.06.01	Dinas Sosial				16.100.000.000
1.06.01.01	Dinas Sosial				16.100.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	12 bulan		4.779.987.500
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.779.987.500
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	12 bulan		781.704.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	3 100 Unit	smd	60.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	smd	721.704.000
1.06.09	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan		1.880.873.500
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	smd	1.880.873.500
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	55 Dokumen		261.100.000
1.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun	7 Dokumen	bpn, smd	236.600.000
1.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas	4 Laporan	bpn, smd	24.500.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	75 Orang		353.300.000
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlarang, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	15 Orang	smd	353.300.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1600 Orang		877.050.000
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	60 Orang	smd	756.300.000
1.06.17.03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial	200 Orang	smd	120.750.000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	160 Orang		247.900.000
1.06.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan	32 Orang	bpn, smd	247.900.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	15 Panti		4.850.250.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	3 Panti	smd	4.763.750.000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Panti	smd	86.500.000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	225 Orang		170.025.000
1.06.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	45 Orang	bpn, smd	170.025.000
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	20 Lembaga		926.860.000
1.06.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	3 Lembaga	smd	427.910.000
1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	2 Kegiatan	smd	150.450.000
1.06.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	2 Kegiatan	smd	348.500.000
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	6150 Orang		970.950.000
1.06.23.01	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan	430 Orang	bru, btg, bpn, smd, mah	689.250.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.06.23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial	50 KPM	smd	52.250.000
1.06.23.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan	100 Orang	smd, kbr	229.450.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				311.621.508.000
2.01	Tenaga Kerja				22.390.000.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				22.390.000.000
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				22.390.000.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		4.125.900.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	4.125.900.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		574.750.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg, bpn, smd	574.750.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	75%		640.500.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kegiatan	btg, bpn, smd	610.500.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 Orang	smd	30.000.000
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	75%		35.900.000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	10.000.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	25.900.000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	70%		11.071.100.000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	500 Orang	smd	5.000.000.000
2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	smd	5.000.000.000
2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih	50 Orang	smd	1.000.000.000
2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi	1 LSP	smd	71.100.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%		128.900.000
2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja	2 Dokumen	smd	64.750.000
2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan	1 Dokumen	smd	8.350.000
2.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan	1 Dokumen	smd	46.300.000
2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara	93 Orang	smd	9.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%		272.710.000
2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	150 Perusahaan	smd	43.100.000
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur Tentang UMP	3 Dokumen	smd	229.610.000
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	20%		223.790.000
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	120 Orang	smd	223.790.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi	190 Perusahaan		1.087.740.000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	60 Perusahaan	smd	1.002.490.000
2.01.27.07	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	40 Perusahaan	smd	85.250.000
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%		162.710.000
2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80 Orang	smd	162.710.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih dan terserap di pasar kerja (penempatan tenaga kerja)	45%		2.253.500.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	3 Jurusan	bpn	1.000.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja	528 Orang	btg, bpn	1.253.500.000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	4 Kimtrans		1.812.500.000
3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain	3 Dokumen	smd	50.000.000
3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans	smd	157.500.000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans	bru, smd, mah, psr	1.605.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.326.050.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.326.050.000
2.02.01.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.326.050.000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	target kinerja	100%		1.226.100.000
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	smd	1.226.100.000
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya fungsi sarana dan prasarana	100%		357.002.500
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana dan prasarana kantor	47 Unit	smd	357.002.500
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatkan kapasitas aparatur	100%		518.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	presentase capaian target kinerja	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	450.000.000
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	diklat yang diikuti pegawai	4 diklat	smd, luarPrv	68.500.000
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya capaian kinerja	100%		105.000.000
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan capaian kinerja	5 dokumen	bpn, smd, luarPrv	105.000.000
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%		294.900.000
2.02.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik	1 kebijakan	smd	46.000.000
2.02.15.05	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak	1 rekomendasi	ppu, smd	248.900.000
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	100%		197.500.000
2.02.16.02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	85%	smd	197.500.000
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pengecahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	90%		124.000.000
2.02.17.05	Advokasi Perlindungan Perempuan	meningkatnya jumlah lembaga pelayanan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak	2 jumlah	kkp, ppu, smd, luarPrv	124.000.000
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	100%		452.255.000
2.02.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	jumlah kajian pembangunan berbasis gender	1 kajian	bpn, smd	119.525.000
2.02.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	12 kelompok	smd	70.030.000
2.02.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	220 orang	bpn, luarPrv	262.700.000
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif	100%		158.900.000
2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	70 orang	smd, luarPrv	158.900.000
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	pemenuhan kebutuhan hak anak	1 dokumen		354.392.500
2.02.21.01	Advokasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	jumlah kab/kota menuju kota layak anak	1 kab/kota	smd, luarPrv	200.392.500
2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	pemetaan hak anak di bidang pendidikan	1 dokumen	kkp, smd, luarPrv	154.000.000
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	100%		47.500.000
2.02.22.04	Penyuluhan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi	pembinaan Desa PRIMA(Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	10 kelompok	smd	47.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	1 kebijakan		60.900.000
2.02.23.02	Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Indikator nilai-nilai terkait pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur	1 rekomendasi	kkp	60.900.000
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	100%		110.900.000
2.02.26.01	Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak	presentase data pilah yang ada	50%	ktm, bpn, smd, luarPrv	110.900.000
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	100%		240.800.000
		terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	100%		
2.08.15.06	Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	seminar peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka hari ibu	110 orang	smd	240.800.000
		pelayanan KIE dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	110 orang		
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	100 orang		77.400.000
2.08.20.02	Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, edukasi)	100 orang	smd	77.400.000
2.03	Pangan				38.182.677.000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				38.182.677.000
2.03.01.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				38.182.677.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		7.654.356.600
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	kkp, smd	7.654.356.600
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		1.973.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah ISO 9001:2015 yang diaudit eksternal	5 Kegiatan	kkp, smd	261.500.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kkp, smd	1.711.500.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1.432.500.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1.335.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6 Kegiatan		
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	8 Orang	kkp, smd, luarPrv	97.500.000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%		937.000.000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	448.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	489.000.000
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	1015 Orang		4.750.000.000
2.03.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah penyuluh, petani dan pelaku agribisnis yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dan mengikuti PEDDA/PENAS	1000 Orang	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	4.590.000.000
2.03.15.03	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	60 Orang	smd	160.000.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	98 Poin		1.476.650.000
2.03.25.01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	13 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	276.200.000
2.03.25.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan beras provinsi	200 Ton	bru, btg, ktm, kkr, smd	991.050.000
2.03.25.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia	1 Laporan	mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, psr	209.400.000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.7 Poin		1.100.000.000
2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi	1 Laporan	smd	100.000.000
2.03.27.02	Pengembangan Pangan Lokal	Promosi pangan lokal	1 Kali	smd	400.000.000
2.03.27.03	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi mutu pangan segar	10 Kab/Kota	smd	600.000.000
3.03.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan	120 Siswa		4.500.000.000
3.03.28.07	Peningkatan Mutu Siswa	Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu SDM di bidang pertanian	356 Siswa	smd	4.500.000.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Buah	191758 Ton		2.888.900.000
3.03.41.01	Peningkatan Produksi Hortikultura	Jumlah bibit buah untuk kawasan hortikultura	32000 Pohon	kk, smd	1.548.900.000
3.03.41.02	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah promosi/peningkatan nilai tambah produk hortikultura	2 Kali	smd	590.000.000
3.03.41.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura	Jumlah prasarana dan sarana pertanian hortikultura	2 Jenis	smd	750.000.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura yang bersertifikat	Tersedianya Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	80%		1.575.690.400
3.03.46.01	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Benih Tanaman Pangan	30 Ton	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, luarPrv	889.000.400
3.03.46.03	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Jumlah Produksi Benih Hortikultura	5000 Batang	kk	686.690.000
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	23000 Ha		270.000.000
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah gerakan pengendalian OPT	10 Kali	smd	215.000.000
3.03.48.03	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan	Jumlah produksi agens hayati dan pestisida ramah lingkungan	2 Jenis	smd	55.000.000
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilayani kegiatan sertifikasi	150 Ha		250.000.000
3.03.49.01	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian	Jumlah benih unggul yang bersertifikat	5000 Label	smd	99.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.03.49.03	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	20 Rekomendasi	smd	151.000.000
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	510000 Ton		9.374.580.000
3.03.51.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas pengembangan sentra produksi padi	23000 Ha	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	8.387.980.000
3.03.51.04	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah promosi/peningkatan mutu hasil tanaman pangan	2 Kali	smd	522.000.000
3.03.51.05	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan	2 Jenis	smd	464.600.000
2.05	Lingkungan Hidup				16.000.000.000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				16.000.000.000
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup				16.000.000.000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran	100 Persentase		3.285.210.000
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.285.210.000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persentase		849.640.000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	849.640.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100 Persentase		1.210.000.000
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	925.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35 Kali		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih	15 orang	bpn, smd, luarPrv	285.000.000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	90 Persentase		1.205.000.000
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup	7 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	740.500.000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM	4 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	464.500.000
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	65 Persentase		826.400.000
2.05.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Penanganan Sampah	75 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	137.700.000
2.05.15.14	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kebijakan dan Strategi Provinsi kaltim dalam pengelolaan Sampah	1 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	99.200.000
2.05.15.15	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	9 Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	193.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.05.15.16	Pelaksanaan Seksi Limbah B3	Inventarisasi data dan pembinaan Perusahaan Pengelola Limbah B3	75 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	396.000.000
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75 Indeks		1.805.100.000
2.05.26.02	Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	Penurunan Beban Pencemar	5 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	246.400.000
2.05.26.03	Pemantauan Lingkungan Air Sungai , Air Laut, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air	75 Indeks	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1.259.700.000
		Indeks Kualitas Udara	80 Indeks		
		Indeks Kualitas Tanah	70 Indeks		
2.05.26.04	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Terlaksananya Upaya Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	10 Kab/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	299.000.000
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	7 Dokumen		1.470.000.000
2.05.27.01	Penyusunan Evaluasi dan Verifikasi Dokumen RPPLH, Penyusunan DDDTLH dan KLHS Prov. Kaltim	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan kajian LH	3 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	997.000.000
2.05.27.02	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH)	Pelayanan Informasi LH & Instrumen Ekonomi LH	100 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	225.000.000
2.05.27.03	Penyusunan Dokumen Status Informasi Lingkungan Hidup (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penyusunan dokumen DIKPLH/SLHD dan Dokumen IKLH	2 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	248.000.000
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	100 Persentase		870.000.000
2.05.28.01	Pembinaan Pelaksanaan Manajemen Komisi Penilai Amdal dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL/UPL pada DLH	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan komisi penilai Amdal se-Kaltim (Kab/Kota) & Provinsi	11 Komisi Penilai Amdal	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	455.000.000
2.05.28.02	Kajian Dampak Lingkungan (Monitoring dan Evaluasi Perubahan Izin Lingkungan oleh DLH Kab, Kota, Perusahaan yang Merupakan Kewenangan Pemprov. Kaltim)	Pelaksanaan pelayanan izin lingkungan/perubahan izin lingkungan & Penilaian/Pemeriksaan Dokumen LH	100 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	415.000.000
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225 225		936.000.000
2.05.29.01	Pemantauan kualitas udara ambien	Jumlah Perusahaan yang dinilai mendapatkan peringkat hijau	25 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	936.000.000
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100%		446.250.000
2.05.31.01	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Presentase Kasus yang diselesaikan	100 Presentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	446.250.000
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	20 Perusahaan		295.000.000
2.05.32.01	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan dan menerapkan sanksi serta penegakan hukum	15 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	295.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
				kk, bpn, ktm, btg, luarPrv	
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	4 Penghargaan		1.094.400.000
2.05.53.02	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Orang/Masyarakat yang dilakukan pembinaan dalam pengelolaan LH	100 Orang	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	348.500.000
2.05.53.03	Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Pendampingan Penilaian/Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	50 Sekolah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	350.000.000
		Pendampingan Penilaian/Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	2 Tokoh Kalpataru		
		Pendampingan Penilaian/ Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	4 Kab/Kota Adipura		
2.05.53.04	Identifikasi, verifikasi dan validasi serta Penetapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	Terverifikasi, teridentifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat	2 Wilayah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	238.000.000
2.05.53.06	Inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat di Kaltim	Terverifikasinya jumlah kampung iklim	5 Wilayah/Desa	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	157.900.000
		Terlaksananya pendampingan penilaian kampung iklim	5 Wilayah/Desa		
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	10 Juta Ton CO2eq		1.072.000.000
2.05.56.04	Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK	Terlaksananya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	462.000.000
2.05.56.05	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Laporan PEP MRV RAD GRK	1 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	610.000.000
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	200 Ribu Hektare		635.000.000
2.05.57.01	Identifikasi dan pemantauan kawasan hutan yang dilindungi dan kawasan non hutan yang bernilai penting bagi konservasi	Data HCV di Sektor Pertambangan, HPH-HTI,& Perkebunan	1 Data Kuantitatif	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	350.000.000
2.05.57.02	Perlindungan kawasan KARST	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang - Mangkalihat	1 Dokumen	bru, ktm, smd, luarPrv	285.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				5.869.000.000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				5.869.000.000
2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				5.869.000.000
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	98%		1.762.500.000
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.762.500.000
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	98%		331.000.000
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	331.000.000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	80%		946.800.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	bru, smd	946.800.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		100.000.000
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	psr	60.000.000
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	40.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Desa Mandiri	40 Desa		350.000.000
2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	100.000.000
		Jumlah PKK yang dibina	10 Kabupaten/Kota		
		Jumlah LPM yang dibina	10 Kota		
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	70%	smd	50.000.000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina	150 Orang	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	76.000.000
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	5 MHA	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	124.000.000
		Jumlah Posyandu yang dibina	6 Posyandu		
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Unit		92.850.000
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdesa yang Terbentuk	15 unit	smd	92.850.000
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program/ Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	80%		83.254.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev	80%	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	83.254.000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	80%		270.030.000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1 Kali	bru, bpn, smd	270.030.000
		Jumlah kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota		
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	meningkatnya kualitas lembaga pos pelayanan teknologi	18 unit		208.000.000
2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif	18 unit	ktm	172.100.000
2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Air Bersih	10 Unit	smd	35.900.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Sanitasi	10 Unit		
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Terwujudny Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%		1.100.000.000
2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	130 Orang	mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, psr	875.000.000
2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih	150 Orang	smd	85.000.000
2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	160 Orang	smd	75.000.000
2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	300 Orang	smd	65.000.000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Posyantek Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	10 Posyantek		24.566.000
2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina	10 Posyantek	ktm	24.566.000
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	80%		300.000.000
2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data aparatur Desa/kelurahan dan badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	41.800.000
2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa	7 Kabupaten	bru, ktm, kkr, ppu, kbr, mah, psr	41.800.000
2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	216.400.000
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan berbasis Pemberdayaan yang Optimal	80%		300.000.000
2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina	5 Kabupaten	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	100.000.000
		Pendamping Desa yang dibina	50 Orang		
2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	1 Laporan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	100.000.000
2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	1 kali	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	100.000.000
2.09	Perhubungan				77.390.650.000
2.09.01	Dinas Perhubungan				77.390.650.000
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				77.390.650.000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	0%		4.102.250.000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm, bpn, smd	4.102.250.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif	100%		3.489.200.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Komputer, Notebook, Server, Printer, UPS, Rak Server & Arsip, Lampu PJU dan Mobil Operasional	55 Unit	smd	1.930.000.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Videotron, PABX, Perbaikan Ruang Arsip dan Pantry	5 Paket	smd	1.559.200.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100%		2.672.850.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	12 Bulan	smd	2.209.850.000
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan	40%	smd	463.000.000
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	100%		908.700.000
2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA	5 Dokumen	smd	616.700.000
2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	4 Dokumen	smd	292.000.000
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	660 Kasus		21.618.900.000
2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan	120 km	smd, luarPrv	16.551.400.000
2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	25 Badan Usaha	smd, luarPrv	4.117.500.000
2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi	42.50%	bpn, smd, luarPrv	950.000.000
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah kecelakaan angkutan perairan	4 Kasus		33.944.250.000
2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah Luas lahan yang disediakan untuk sisi darat pelabuhan multipurpose yang menghubungkan ke PKS-Maloy	1 Hektar	ktm	32.673.900.000
2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar	80%	ktm, bpn	1.086.450.000
2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina	100 Badan Usaha	smd	183.900.000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	2 Simpul		2.954.150.000
2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	1 Lintasan	smd	307.800.000
2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan	2 Perencanaan	smd	1.176.050.000
2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda	3 Perencanaan	smd	1.470.300.000
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	650000 Penumpang		7.700.350.000
2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	2 Terminal	bru, btg, smd	5.545.800.000
2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	1 Terminal	kkp, ppu, smd, kbr, psr	2.154.550.000
2.1	Komunikasi dan Informatika				7.763.200.000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				7.763.200.000
2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				7.763.200.000
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran	12 Bulan		3.778.730.000
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3.778.730.000
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		735.900.000
2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	51 Unit	smd	235.800.000
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	500.100.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah	12 Bulan		1.767.520.000
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Paket	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	1.767.520.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	1 Paket		
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100 Persen		1.481.050.000
2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Penggunaan Cloud Computing	58 OPD	smd	1.481.050.000
		Jumlah Penggunaan Aplikasi MOD	58 OPD		
		Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	58 OPD		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				98.867.946.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				98.867.946.000
2.11.01.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				98.867.946.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%		5.202.900.000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	5.202.900.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		33.520.050.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	50 unit	smd	31.647.900.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	1.872.150.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	100%		2.556.596.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	198 kegiatan	smd	1.690.846.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 orang	smd	865.750.000
		Jumlah Seragam Pegawai	189 orang		
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	79%		939.900.000
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd, kbr	718.600.000
2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	221.300.000
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	100 UKM		750.000.000
2.11.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi kebijakan pengembangan UKM	200 UKM	smd	750.000.000
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	100 Wirausaha Baru		750.000.000
2.11.16.09	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri yang mendapatkan fasilitasi produksi pemasaran dan pembiayaan	100 WUB	smd	750.000.000
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	100 Koperasi		650.000.000
2.11.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	1000 Koperasi	smd	300.000.000
2.11.18.03	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	100 Koperasi	smd	350.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	5 pelatihan		800.000.000
2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	1 dokumen	smd	524.220.000
2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	5 pelatihan	smd	275.780.000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0.50%		1.500.000.000
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang Beredar Yang Wajib Diawasi	10 Produk	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1.500.000.000
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	3 bulan		895.100.000
3.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar murah/bazar yang dilaksanakan	40 kali	smd	292.600.000
3.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah Pasar lelang yang dilaksanakan	0 kali	smd	-
3.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi stok dan harga barang pokok dan barang strategis yang tersedia setiap hari	64 jenis komoditas	btg, ppu, smd	602.500.000
3.06.18.13	Kontak Dagang	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan Kontak Dagang	0 Pelaku usaha	smd	-
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	11 Pelaku usaha/nilai transaksi		1.171.300.000
3.06.32.01	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan	Jumlah UKM yang melakukan Promosi	0 UKM	bru, btg, bpn, smd	1.171.300.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	15%		1.050.000.000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Ruang lingkup Akreditasi Laboratorium yang dipelihara dan dipertahankan	2 ruang	smd	528.000.000
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	jumlah Presentase Penerimaan Retribusi	15%	smd	522.000.000
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	100 miliar rupiah		1.000.000.000
3.07.32.02	Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir	Jumlah Perusahaan pada lokasi KEK MBTK	3 Perusahaan	smd	500.000.000
3.07.32.03	Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah	Persentase ketersediaan layanan data dan informasi yang di upload	100%	smd	500.000.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	2%		1.025.000.000
3.07.33.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	Jumlah Koordinasi Penumbuhan Industri	10 Kali	smd	725.000.000
3.07.33.02	Peningkatan Pelayanan Ijin usaha industri	Jumlah hari terbitnya ijin rekomendasi usaha industri	12 Hari	smd	300.000.000
3.07.34	Program Pembangunan Sarana Prasarana KEK MBTK	Jumlah Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang menggunakan Maloy sebagai outlet	10 Perusahaan Kelapa Sawit (PKS)		47.057.100.000
3.07.34.01	Pembangunan Tangki Timbun KEK MBTK	Jumlah tangki timbun dan jaringan pipa yang dibangun	4 unit	ktm	47.057.100.000
2.12	Penanaman Modal				7.874.535.000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7.874.535.000
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7.874.535.000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.314.535.000
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.314.535.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTSP Prov. Kaltim	100%		2.095.000.000
2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTSP Prov. Kaltim	5 paket	smd	1.790.000.000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	305.000.000
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		300.000.000
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi	12 bulan	bru, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr	300.000.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	85 Nilai AKIP		220.000.000
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	180.000.000
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	40.000.000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2800 Izin/ Non Izin		350.000.000
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	1130 Izin/ Non Izin	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	100.000.000
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	1600 Izin/ Non Izin	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	150.000.000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	70 Izin/ Non Izin	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	50.000.000
2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang	4 PTSP	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	50.000.000
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau	7 Perusahaan Industri Baru		1.245.000.000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim	5 Perusahaan	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	125.000.000
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah laporan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal	4 Laporan	smd	120.000.000
2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim	100 Perusahaan	bru, btg, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, psr	1.000.000.000
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan		295.000.000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	220.000.000
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	75.000.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan (IKM)	82 Indeks		280.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah media informasi pelayanan perijinan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	3 pengembangan aplikasi/software	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	80.000.000
2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan	persentase pengaduan yang diselesaikan	60%	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	200.000.000
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU		775.000.000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	4 Event	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	700.000.000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	2 Pertemuan Bisnis	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	75.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				29.338.250.000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				29.338.250.000
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				29.338.250.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		8.767.350.000
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	8.767.350.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		3.505.250.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	bru, smd, luarPrv	3.505.250.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2.463.100.000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi	1 Dokumen	bru, smd, luarPrv	2.463.100.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan Ke Dalam Daerah	70 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Penyusunan anggaran dan laporan kinerja SKPD sesuai aturan yang berlaku	98%		375.000.000
2.13.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	bru, bpn, smd, luarPrv	214.000.000
2.13.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, smd, luarPrv	161.000.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	50 Orang		453.200.000
2.13.30.08	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah (JPD) tingkat Provinsi	50 Orang	smd, luarPrv	453.200.000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	450 Orang		1.514.700.000
2.13.31.04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka	450 orang	smd, luarPrv	1.514.700.000
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%		9.582.750.000
2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet yang dibina	440 Orang	smd	9.582.750.000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	5%		2.676.900.000
2.13.33.03	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event	Jumlah atlet yang dibina	80 Orang	luarPrv	994.300.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.13.33.12	Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang mendapat penerangan	2 Stadion	smd	1.682.600.000
2.17	Perpustakaan				3.619.200.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				3.619.200.000
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				3.619.200.000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.765.020.000
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.765.020.000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		467.800.000
2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	100%	smd	43.000.000
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	424.800.000
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan		750.000.000
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	60 kegiatan	btg, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, luarPrv	750.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		33.500.000
2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	smd	33.500.000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang mengakses perpustakaan	15%		414.600.000
2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka perpust. Konvesnional	340600 pemustaka	smd	414.600.000
		Jumlah Pemustaka perpust. Digital	6295 pemustaka		
		Jumlah Kerjasama Perpustakaan	15 MoU		
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Prosentase pengembangan koleksi bahan pustaka	10%		60.280.000
2.17.24.02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi lokal yang berhasil dikumpulkan dan di alih mediakan	350 judul	smd	60.280.000
		Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan dan dilestarikan	320 judul		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah	320 judul		
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Prosentase Perpustakaan yang memenuhi standar	2%		50.000.000
2.17.26.01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	20 perpustakaan	smd	50.000.000
		jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	10 perpustakaan		
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mengikuti Diklat	30 orang		
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Prosentasi Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik	9%		28.000.000
2.18.19.01	Akuisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	2 laporan	smd	28.000.000
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Prosentase Hasil pembinaan bidang kearsipan	25%		50.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.18.25.01	Pembinaan Internal dan Supervisi	Laporan pembinaan terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	15 laporan	smd	50.000.000
3	Urusan Pilihan				231.066.550.000
3.01	Kelautan dan Perikanan				29.960.850.000
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				29.960.850.000
3.01.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				29.960.850.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		4.737.450.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.737.450.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1.467.150.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	20 Unit	smd	301.150.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	1.166.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2.660.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	60 Kali	smd	2.260.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 Orang	smd	400.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	225 Stel		
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	12 Dokumen		913.825.000
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bpn, smd	500.000.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	bpn, smd	413.825.000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	157743 Ton		4.450.000.000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	60 KUB	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.900.000.000
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Mesin Kapal 24 PK)	50 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Mesin Ketinting 8 PK)	50 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Coolbox 220 L)	120 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Jaring Gillnet 2,3, dan 4 inch))	750 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Rawai Dasar)	560 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Bubu)	450 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Trammel Net 0,2 mm)	550 Unit		
		Jumlah Peralatan Penangkapan Ikan (Jaring Millenium)	590 Bal		
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan	235 Izin	bpn, smd	300.000.000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 Unit	btg, bpn, smd	250.000.000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	271339 Ton		1.250.000.000
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	65500 Ton		
		Nilai Ekspor Perikanan	36 Juta USD		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Volume Ekspor Perikanan	2700 Ton		
		Tingkat Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita		
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Kawasan Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	2 Kawasan	bru, btg, bpn, kkr, smd	500.000.000
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya & Pengolahan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI)	15 Dokumen	bpn, smd	250.000.000
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	10 UKM	ktm, ppu, smd, psr	350.000.000
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	2 Promosi	smd	150.000.000
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Percepatan Penyelesaian Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim	1 Dokumen		2.275.000.000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi	2 Pulau	smd	1.800.000.000
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	5 Pelaku Usaha	btg, bpn, smd	150.000.000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan Konswervasi yang Direhabilitasi	1 Kawasan	btg, kkr, smd	325.000.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan	46 Pokmaswas		650.000.000
3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	10 Operasi	bru, btg, ktm, bpn, kkr, smd, psr	300.000.000
3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10 Operasi	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	250.000.000
3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	1 Dokumen	smd	100.000.000
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	125 Sampel		150.000.000
3.01.28.01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	125 Sampel	smd	91.000.000
3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar	125 Sampel	smd	59.000.000
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi	3000000000 Benur		10.986.425.000
3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah ketersediaan benih yang tersertifikasi	1 benih	bpn	223.500.000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (Balikpapan)	10 HSRT	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr	7.762.925.000
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (KUKAR)	8 HSRT		
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (PPU)	3 HSRT		
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (BERAU)	1 HSRT		
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (PASER)	1 HSRT		
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (BONTANG)	1 HSRT		
		Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan Serta Obat-Obatan (KUTIM)	1 HSRT		
3.01.29.03	Operasional pembenihan di Balai perikanan dan Hatchery Skala Rumah Tangga	Pengadaan Induk Windu Unggul dan Pakan serta Obat-obatan (HSRT)	25 HSRT	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr	-



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah UPTD Perbenihan yang Direhabilitasi	2 UPTD	bpn, ppu	3.000.000.000
3.01.29.05	Peningkatan SDM Perbenihan	Jumlah Pembudidaya yang Mendapatkan Pelatihan	90 Pembudidaya	bpn, kkr, ppu, smd	-
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihasilkan	65000 Ekor		421.000.000
3.01.30.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Standarisasi Benih Ikan	4 Sertifikat	kkkr	146.800.000
3.01.30.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Benih Ikan Air Tawar	65000 Ekor	kkkr	274.200.000
3.02	Pariwisata				11.767.000.000
3.02.01	Dinas Pariwisata				11.767.000.000
3.02.01.01	Dinas Pariwisata				11.767.000.000
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.355.400.000
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.355.400.000
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		2.804.000.000
3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	50 Item	smd	1.987.200.000
3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	816.800.000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1.457.600.000
3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	50 Kegiatan	smd	1.457.600.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	30 Kegiatan		
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%		700.000.000
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	btg, smd	422.619.000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	277.381.000
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	0 Destinasi		1.000.000.000
3.02.15.07	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi destinasi KPP strategis	3 Promosi	smd	1.000.000.000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	0 Kawasan		1.150.000.000
3.02.16.03	Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem	Jumlah kegiatan di destinasi strategis KPP yang difasilitasi Infrastruktur dan ekosistemnya	0 Kegiatan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	1.150.000.000
		Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	0 Destinasi		
		Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	0 Destinasi		
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya	0 Jenis Usaha		1.000.000.000
3.02.30.01	Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan SDM di KPP strategis	0 Kegiatan	bru, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	1.000.000.000
		Jumlah kegiatan pengembangan dan pengendalian usaha sarana pariwisata	0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pengembangan dan pengendalian usaha jasa pariwisata	0 Kegiatan		
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah Jenis Pelaku Ekraf yang difasilitasi dan ditingkatkan SDM nya	0 Jenis		1.300.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.02.31.01	Pengembangan Seni Pertunjukan	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf seni pertunjukan	0 Kegiatan	btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, luarPrv	1.300.000.000
		Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya	0 Kegiatan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf karya seni budaya	0 Kegiatan		
3.03	Pertanian				57.528.700.000
3.03.01	Dinas Perkebunan				32.068.850.000
3.03.01.01	Dinas Perkebunan				32.068.850.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		3.322.300.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kk, smd	3.322.300.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2.119.989.800
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	24 Unit	smd	1.095.150.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1.024.839.800
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		2.862.850.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	2.100.150.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	smd	762.700.000
		Jumlah pakaian dinas	460 Stel		
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	20%		563.915.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	228.730.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	335.185.000
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	70533 Ton		14.364.500.000
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	15197504 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	3006 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	5317 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	12105 Ton		
3.03.58.04	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	19 Ton/Ha	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm	7.092.000.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.3 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.68 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.77 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.1 Ton/Ha		
3.03.58.05	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	100 Ha	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, psr	7.272.500.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	50 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	300 Ha		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20%		141.375.000
3.03.60.04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20%	smd	141.375.000
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	30%		741.425.000
3.03.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina	50 Kelompok Tani	ktm, smd	534.175.000
3.03.61.04	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi	2 Produk	smd, mah	207.250.000
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi		196.000.000
3.03.62.04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	2 Jenis	kk, smd	86.000.000
3.03.62.05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan	11 Produk	btg, kkr, ppu, smd, psr	110.000.000
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi		552.300.000
3.03.65.05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi	50 Transaksi	bru, ktm, ppu, smd, kbr, psr	366.300.000
3.03.65.06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data informasi produk dan pasar	2 Informasi	bru, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, psr	186.000.000
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	2 Kelompok Tani		328.650.000
3.03.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	50 Orang	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	328.650.000
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4785 Juta ton CO2eq		300.000.000
3.03.76.01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME	1 Perusahaan	bru, kbr, psr	150.000.000
3.03.76.02	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan Petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan	3 PBS dan Kelompok Tani		-
3.03.76.03	Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Luas area yang ditanami	50000 Ha Cadangan Carbon Rendah/tahun	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	150.000.000
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	50%		250.000.000
3.03.77.01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV	60 PBS	bru, ktm, kkr, smd, kbr, psr	100.000.000
3.03.77.02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi	130 Unit	kk, smd	150.000.000
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan	25 Orang		363.475.000
3.03.78.01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang	25 Orang	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	363.475.000
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	5 Gapoktan		828.650.000
3.03.79.01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah kelompok tani	30 Kelompok Tani	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	477.400.000
3.03.79.02	Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Perkebunan	Jumlah asosiasi	5 Asosiasi	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	351.250.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	30 Perusahaan		475.000.000
3.03.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial	2 Database	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	164.000.000
3.03.80.02	Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP	10 Perusahaan	bru, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr	122.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.03.80.03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi	20 Perusahaan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	188.500.000
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	20 Kelompok		262.600.000
3.03.81.01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan	20 Kelompok	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	262.600.000
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	5 Komoditi		468.000.000
3.03.82.01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina	5 Kelompok Tani	ppu, smd	239.250.000
3.03.82.02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi	15%	bpn, ppu, smd	228.750.000
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	40%		300.000.000
3.03.83.01	Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun	99 Ha	ktm, kkr, ppu, smd, kbr	300.000.000
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	4 Kasus		573.350.000
3.03.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang ilegal	4 Sumber Benih	bru, ktm, smd, kbr	247.900.000
		Pertemuan Pengawas Benih se-Kalimantan Timur	30 Orang		
		Pengawasan Peredaran Benih	5000000 Benih		
3.03.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah Benih yang Diawasi	20000000 Benih	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	325.450.000
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih		450.100.000
3.03.85.01	Pengujian benih	Jumlah Jenis Benih yang Diuji di Laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa)	5000000 Benih	smd	109.100.000
3.03.85.02	Sertifikasi benih	Jumlah Benih Tersertifikasi dan Berlabel, Jumlah Retribusi Jasa Pemeriksaan/Sertifikasi	5000000 Benih	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	341.000.000
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	30 Kelompok		557.500.000
3.03.86.01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT	25 Kelompok Tani	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	527.500.000
3.03.86.02	Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan	5 Regu	smd	30.000.000
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	10000 KG		575.682.200
3.03.87.01	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak	10000 Kg dan Liter	kk, smd	521.432.200
3.03.87.02	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Jumlah uji APH, Biopestisida dan Pestisida Kimia	3 Kali	ktm, kkr, smd	54.250.000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri	75%		1.471.188.000
3.03.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Bahan Tanaman Komoditas Perkebunan	150000 Benih	kk	1.146.163.000
3.03.88.02	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Terpeliharanya kebun Induk/Kebun Koleksi dan BPT	11.5 Ha	kk	325.025.000
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				25.459.850.000
3.03.02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				25.459.850.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%		3.909.707.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	42 Unit	ppu, smd	3.909.707.000
		Jumlah surat yang diproses	820 Surat		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan	86 Unit		
		Luas gedung yang disediakan jasa kebersihan	4982 M2		
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio aparatur yang memanfaatkan Personal Computer	1		2.973.550.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	55 Unit	ppu, smd	267.800.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	81 Unit	ppu, smd	2.705.750.000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara : Roda 4	21 Unit		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Catatan Atas Laporan Keuangan	1 Dokumen		1.972.743.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi yang disediakan	25 Buah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1.623.693.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	195 Kegiatan		
		Jumlah laporan hasil rekon keuangan	12 Laporan		
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	25 orang	ppu, smd, luarPrv	349.050.000
		Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus/hari-hari tertentu	304 Stel		
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77 Nilai		1.080.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd, luarPrv	666.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	16 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	414.000.000
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%		948.850.000
3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan	30 Orang	btg, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	200.000.000
		Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	2 Unit usaha		
3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah publikasi informasi harga komoditas peternakan	52 Kali	bru, psr, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	548.850.000
		Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	100000000 Rp		
3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30 Unit	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	200.000.000
		Jumlah pengendalian pemotongan ternak sapi/kerbau betina produktif	20 ekor		
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	118 Konstanta		5.800.000.000
		Jumlah Miniranch	5 Miniranch		
3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan	Luas Padang Penggembalaan / Kebun HPT	475 Ha	bru, psr, kbr, smd, kkr, ktm, btg, luarPrv	5.200.000.000
		Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	1000000 Stek/Polis		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	4 Dokumen	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	300.000.000
		Jumlah berita peternakan melalui elektronik (website)	50 Berita		
3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS)	50 Orang	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	300.000.000
		Jumlah Kelompok Peserta Asuransi Ternak	10 Kelompok		
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Status kesehatan hewan jembrana	50%		950.000.000
		Status kesehatan hewan Avian Influenza (AI)	60%		
		Status kesehatan hewan Rabies / Anjing gila	50%		
3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah kejadian penyakit jembrana	15 Kasus	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	450.000.000
		Jumlah kejadian penyakit AI	63 Kasus		
		Jumlah kejadian penyakit rabies	15 Kasus		
		Jumlah Ternak yang divaksinasi	1000 Ekor		
3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Kab/Kota	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	200.000.000
3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah sampel obat hewan	7 Sampel	psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, luarPrv	300.000.000
		Jumlah ternak besar yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	1000 ekor		
		Jumlah hewan yang dilakukan pelayanan klinik	400 Ekor		
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	19%		6.025.000.000
		Calving Interval	18 Bulan		
3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 Ekor	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	4.625.000.000
		Service per Conception	1.8 Konstanta		
3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Ternak yang menerapkan Good Farming Practice (GFP)	2 Kelompok	bru, psr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1.000.000.000
		Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	1 Kelompok		
3.03.90.03	Peningkatan Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	12 Proposal	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	400.000.000
		Jumlah Kelompok Ternak yang Terdaftar	5 Kelompok		
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan sampel yang diperiksa	10%		800.000.000
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan yang pasif	200 Sampel	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	400.000.000
		Jumlah Pengujian Sampel Penyakit Hewan	450 Pengujian		
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian sampel pangan asal hewan	300 pengujian	bru, psr, smd, ppu, kkr, bpn,	400.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
				ktm, btg, luarPrv	
		Jumlah sampel pangan asal hewan hewan yang pasif	150 sampel		
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak	10%		1.000.000.000
3.03.92.01	Peningkatan produksi dan distribusi Semen Beku	jumlah semen beku yang diproduksi	10000 dosis	ppu, smd, luarPrv	350.000.000
		Jumlah Kelahiran Sapi Blbit	30 Ekor		
		Jumlah Kelahiran rusa bibit	75 Ekor		
3.03.92.02	Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	700 Ton	ppu, smd, luarPrv	650.000.000
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi	5000 Stek/Pols		
3.04	Kehutanan				117.160.000.000
3.04.01	Dinas Kehutanan				117.160.000.000
3.04.01.01	Dinas Kehutanan				25.687.570.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.661.100.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, bru, luarPrv	2.661.100.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1.844.890.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, psr	596.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd, luarPrv	1.248.890.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1.877.900.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, psr, kbr, smd, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1.490.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	170 Stell	bpn, smd, kbr, luarPrv	387.900.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	170 Stell		
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		1.418.400.000
3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	611.900.000
3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, ktm, bpn, smd, kbr, psr, luarPrv	806.500.000
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Persentase penurunan emisi pada wilayah rencana kerja tahunan (RKT)	40%		4.000.010.000
3.04.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Jumlah Dokumen Draf Peraturan dan Penyusunan Naskah Akademis	2 Dokumen	bru, smd, luarPrv	1.485.000.000
		Jumlah pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	40 Laporan		
3.04.16.02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah perusahaan yang sudah RIL/RIL C	7 IUPHHK	bru, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, mah, luarPrv	750.000.000
		Jumlah Pelatihan PHPL & RIL	8 Pelatihan		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		luas lahan yang sudah diterapkan RIL/RIL C	100 Ha		
3.04.16.03	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah laporan pendampingan, identifikasi perubahan status, dan sinkronisasi KPH	3 Laporan	bpn, smd, luarPrv	738.500.000
3.04.16.05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah Laporan Penertiban, Pengawasan Pengendalian Peredaran, dan Rekonsiliasi Penerimaan PNB	40 Laporan	bru, bpn, smd, psr	826.510.000
		Jumlah Laporan Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi IU-IPHHK	25 Laporan		
3.04.16.06	Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Jumlah penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan	6 Kegiatan	smd	200.000.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	1 DAS Prioritas		1.279.000.000
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	10 Laporan	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	250.000.000
3.04.39.15	Pengelolaan DAS	Jumlah Sistem Informasi DAS Berbasis IT	1 Laporan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, luarPrv	690.000.000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi/Realisasi keberhasilan penanaman, dokumen peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS dan Dokumen RPDAS	5 Laporan		
3.04.39.16	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Monitoring Peredaran Benih Tanaman Hutan	14 Laporan	bru, ktm, bpn, ppu, smd, psr, luarPrv	339.000.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi	20%		842.100.000
3.04.41.24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	7 Laporan	bru, bpn, kkr, smd, kbr, psr	183.900.000
3.04.41.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 Laporan	bru, bpn, smd, kbr, psr, luarPrv	108.900.000
3.04.41.26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang diberikan bimbingan teknis	5 IUPHHK-HA/HT	ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	549.300.000
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	50%		2.560.320.000
3.04.42.36	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan	7 Laporan	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	1.089.000.000
		Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	2 Laporan		
3.04.42.37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah Laporan rapat pokja dan sosialisasi	7 Laporan	bru, ktm, kkr, smd, kbr, luarPrv	1.021.320.000
		Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Usaha, Monev Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Pemanfaatan Sumber Dana PMDH/Comdev/CSR	38 Laporan		
3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Jumlah laporan identifikasi/inventarisasi/pemetaan resolusi konflik, pembinaan dan pendampingan hutan adat serta monev hutan adat	3 Laporan	bru, smd, luarPrv	450.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	50%		600.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah kegiatan temu teknis KTH, Sekolah Lapangan, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari	4 Laporan	bru, smd, luarPrv	300.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	9 Laporan	ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	50%		534.600.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	4 Laporan	bru, mah, kbr, smd, kkr, bpn, ktm, luarPrv	287.800.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	246.800.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	25%		4.999.250.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	72 Laporan	bru, smd, luarPrv	2.684.246.000
		Terlaksananya Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	72 Laporan		
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyenyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	20 Laporan	bru, smd, luarPrv	400.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	155.441.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	240.000.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	0 Laporan	smd, luarPrv	400.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	bru, btg, bpn, kkr, smd, kbr, luarPrv	577.251.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	smd	300.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	smd	242.312.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		535.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	6 Laporan	bru, bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	535.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		2.000.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	120 Hektar	kkr, ppu, smd, luarPrv	2.000.000.000
		Luas Penanaman	100 Hektar		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pendedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	30%		535.000.000
3.04.48.03	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	13 Sertifikasi	bru, smd, luarPrv	123.800.000
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pendedar benih /bibit	16 SK	bru, smd, luarPrv	94.200.000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	60 Laporan	bru, smd, luarPrv	317.000.000
3.04.01.02	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto				9.728.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		598.804.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	598.804.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		141.696.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		48.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		93.696.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		237.500.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	kk, smd, luarPrv	152.400.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	114 Stell	b, pn, smd, luarPrv	85.100.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	114 Stell		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	5%		462.500.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	2 Laporan	kk, smd, luarPrv	462.500.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	10%		462.500.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 Laporan	kk, smd, luarPrv	462.500.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	31 Unit	kk, smd, luarPrv	1.189.250.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	kk, smd, luarPrv	584.450.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	4 Laporan	kk, smd, luarPrv	406.400.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	4 Laporan	kk, smd, luarPrv	369.900.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	kk	500.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	kk	500.000.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	kk	650.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	kk	200.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		462.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	6 laporan		462.500.000
		Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	6 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	86 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	110 Hektar	kk, smd	1.750.000.000
		Luas Penanaman	86 Hektar		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Peggadar Bibit / Benih yang Bersertifikat	10%		462.500.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	kk, smd	350.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Tersedianya bibit yang tersedia	100000 Bibitt		
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit/Benih yang Bersertifikat	20%	kk, smd	112.500.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	86 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	86 Hektar	kk, smd, luarPrv	400.000.000
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		350.000.000
3.04.50.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinergitas	2 Laporan	smd, luarPrv	50.000.000
3.04.50.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan, bantuan hukum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum	3 Laporan	kk, ppu, smd, luarPrv	300.000.000
3.04.01.03	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				10.192.680.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		435.100.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, smd	435.100.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		297.480.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	112.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	185.480.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		264.400.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru	213.300.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	73 Stell	bru	51.100.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	73 Stell		
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	50%		1.109.400.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial	3 Laporan	bru	235.900.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	3 Laporan	bru, smd, luarPrv	720.500.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	3 5 Laporan	bru, smd, luarPrv	153.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	75%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	20 Unit	bru, smd, luarPrv	2.085.550.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	12 Laporan	bru, smd, luarPrv	350.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	12 Laporan	bru, smd, luarPrv	273.800.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	12 Laporan	bru, smd, luarPrv	201.100.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	bru, luarPrv	367.050.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	bru, smd, luarPrv	494.100.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	bru, smd, luarPrv	407.600.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	bru, smd, luarPrv	220.800.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		628.400.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan Terseleenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	20 Laporan 20 Laporan	bru, smd	628.400.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman Terlaksananya Kegiatan RHL	200 Hektar 200 Hektar	bru, smd, luarPrv	1.750.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pendedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	25%		112.200.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia Tersedianya bibit yang tersedia	25000 Bibit 25000 Bibitt	bru, smd, luarPrv	112.200.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	200 Hektar	bru, smd, luarPrv	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	20%		795.700.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan Luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi Jumlah Laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan dan pembinaan industri hasil hutan pada pemegang IPHH	7 Laporan 3 Laporan	bru, smd, luarPrv	295.700.000
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan pembinaan pengelolaan usaha perhutanan sosial dan kemitraan	10 Laporan 3 Kelompok Tani Hutan	bru, smd, luarPrv	500.000.000
3.04.01.04	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				10.228.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		666.790.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	666.790.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		268.710.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	16.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	252.710.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		192.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn	165.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		27.500.000
		Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stell		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	50 Stell		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	10%		657.750.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	249.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	2 Laporan	kbr, luarPrv	200.000.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	2 Laporan	ppu, luarPrv	208.750.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	10%		473.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	473.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	32 Unit	bpn, ppu, kbr, luarPrv	1.174.050.000
		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	2 Laporan		
		Terlaksananya Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Laporan		
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	500.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemdaman	5 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	556.400.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	6 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	371.900.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	kbr	500.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	kbr	500.000.000
3.04.45.07	Pemdaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemdaman	0 Laporan	kbr	500.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	kbr	297.650.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		719.250.000
3.04.46.03	Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	4 Laporan	bpn, ppu, psr	262.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	6 Laporan	bpn, ppu	456.750.000
		Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	6 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	100 Hektar	bpn, smd, kbr, luarPrv	1.470.000.000
		Terlaksananya Kegiatan RHL	100 Hektar		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	280.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Penedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	0%		-
3.04.48.03	Penyediaan Benih	Tersedianya benih bagi Kelompok Tani Hutan	0 Benih		-
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Tersedianya bibit yang tersedia	0 Bibit		-
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	100 Hektar	bpn, kbr, luarPrv	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	10%		700.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	250.000.000
		Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan Luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	6 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan bantuan hukum penyidikan, penegakan hukum, advokasi, konsultasi bantuan hukum dan identifikasi permohonan masyarakat adat	10 Laporan	bpn, ppu, smd, luarPrv	450.000.000
		Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan pembinaan pengelolaan usaha perhutanan sosial dan kemitraan	2 Kelompok Tani Hutan		
3.04.01.05	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				10.528.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		565.800.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn, smd, luarPrv	565.800.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		530.600.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	46.500.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	484.100.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		381.600.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn, smd, luarPrv	278.400.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	76 Stell	bpn, luarPrv	103.200.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	76 Stell		
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	10%		260.528.400
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	2 Laporan	bpn, kkr	260.528.400
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	75%		5.049.924.400
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Unit	bpn, kkr	895.290.800
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetrainin g/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	7 Laporan	bpn, kbr, ppu, kkr, luarPrv	1.000.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	16 Laporan	bpn, kkr, kbr	374.796.800
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Movev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	4 Laporan	kk, ppu, kbr	169.792.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	kk, ppu, luarPrv	1.000.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	ppu, kbr, luarPrv	1.065.456.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	ppu	374.796.800
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	ppu	169.792.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		677.012.200
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	24 laporan	bpn, kbr, ppu, kkr, luarPrv	677.012.200
		Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	24 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	105 Hektar		2.012.535.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	105 Hektar	bpn, ppu, kbr	2.012.535.000
		Terlaksananya Kegiatan RHL	105 Hektar		
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	105 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Lokasi Rehabilitasi Hutan Lahan	105 Ha	bpn, ppu	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	25%		650.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	kk, psr	260.524.000
		Jumlah pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, koordinasi dan sinergitas antar KPH se Kalimantan Timur	7 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan identifikasi, inventarisasi daerah rawan kerusakan kawasan hutan, Pengamanan Kawasan Hutan, Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat	10 Laporan	kk, kbr	389.476.000
		Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	3 Kelompok Tani Hutan (KTH)		
3.04.01.06	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				10.028.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		485.420.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	485.420.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		468.080.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	150.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	318.080.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		174.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	psr	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Stell	psr	24.500.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	42 Stell		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Persentase Pengelolaan	4 KTH		514.300.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	2 Laporan	psr, luarPrv	189.300.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	4 Kelompok Tani Hutan (KTH)	psr, luarPrv	175.000.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan Peningkatan kelembagaan KTH	4 Kelompok Tani Hutan (KTH)	psr	150.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	100%		656.100.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok tani yang dilakukan pembinaan pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan	4 Kelompok Tani Hutan	psr, luarPrv	411.100.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	2 Laporan	psr	-
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 5 Laporan	psr	245.000.000
3.04.44.04	Pembinaan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Unit usaha program perhutanan sosial dan kemitraan	0 Laporan	psr	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100 Persen		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	psr, luarPrv	1.411.750.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustrainin g/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Terlaksananya Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan	psr	800.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	5 Laporan	psr	160.000.000
		Terlaksananya Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan		
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Movev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	5 Laporan	psr	115.750.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	psr	800.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	psr	852.500.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	psr	160.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	psr	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi	485000000%		485.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	5 laporan	psr	485.000.000
		Terseleenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	5 Laporan		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	200 Hektar	psr	1.750.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan RHL	200 Hektar		
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan RHL	0 Hektar	psr	-
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		194.600.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	psr	194.600.000
		Tersedianya bibit yang tersedia	25000 Bibit		
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	2 Laporan	psr	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		500.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan Luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	5 Laporan	psr	250.000.000
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan, bantuan hukum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum	5 Laporan	psr	250.000.000
3.04.01.07	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				9.833.750.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		483.750.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	483.750.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		250.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	49.020.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	200.980.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		150.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, ktm, bpn	150.000.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Pengelolaan	5 KTH		-
3.04.41.02	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Kerawanan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan Peningkatan kelembagaan KTH	5 Kelompok Tani Hutan (KTH)	kk, smd	-
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	0%		-
3.04.42.01	Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	0 Kelompok Tani Hutan	kk, smd	-
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	50%		462.500.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	1 Laporan	btg, kkr	62.500.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 Laporan	kk, smd	118.000.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	1 Laporan	kk	132.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari	6 Laporan	kk	44.250.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	5 Laporan	kk	105.750.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	10%		462.500.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial	5 Laporan	kk	201.325.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	1 Laporan	kk	111.175.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	2 5 Laporan	btg	80.000.000
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah kegiatan Pembinaan	5 Laporan	kk	70.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	25%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	kk	875.400.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	5 Laporan	kk, smd	1.000.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	5 Laporan	kk, smd	255.000.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	5 Laporan	kk	45.000.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	kk	1.000.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	kk	944.600.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	kk, smd	250.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	kk	30.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		462.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	5 laporan	kk, smd	462.500.000
		Terseleenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	5 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	350 Hektar	ktm, kk	1.750.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Penedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	25%		462.500.000
3.04.48.03	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	3 Sertifikasi	kk	207.450.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	1250 Bibit	kk	102.200.000
		Tersedianya bibit yang tersedia	1250 Bibit		
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pengedar benih /bibit	3 SK	kk	78.850.000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	3 Laporan	kk	74.000.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	350 Hektar	ktm	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		550.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan Peningkatan kelembagaan KTH	1 Kelompok Tani Hutan (KTH)	kk, smd	250.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar			
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	kkp	700.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	kkp	600.000.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	kkp	200.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	kkp	68.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		412.500.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Terseenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	0 Laporan	smd	-
3.04.46.02	Koordinasi	Terseenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	0 Laporan	smd	-
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	17 laporan	smd	412.500.000
		Terseenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	17 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar		1.800.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	70 Hektar	smd	1.800.000.000
		Terlaksananya Kegiatan RHL	70 Hektar		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pendedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		494.000.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	kkp	494.000.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	70 Hektar	smd	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		600.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan dan pembinaan industri hasil hutan pada pemegang IPHH	7 Laporan	kkp	200.000.000
		Jumlah Laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	10 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	10 Kelompok Tani Hutan (KTH)	kkp	400.000.000
		Jumlah laporan perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Delta Mahakam dan sosialisasi perlindungan hutan di wilayah Delta Mahakam	12 Laporan		
3.04.01.09	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				10.328.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		478.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	478.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		250.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	100.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		150.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	ktm, smd, luarPrv	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0 Stell	ktm	-
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	0 DAS Prioritas		-
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	0 Hektar	ktm	-
		Terlaksananya Kegiatan RHL	0 Hektar		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	10%		462.500.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	1 Laporan	ktm	226.444.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1 Laporan	ktm	170.964.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	0 Laporan		-
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	1 Laporan	ktm	65.092.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	35%		690.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	2 Laporan	ktm	360.000.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 Laporan	ktm	160.000.000
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah kegiatan Pembinaan	2 Laporan	ktm	170.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	11 Unit	ktm	1.887.950.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	ktm	545.550.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	3 Laporan	ktm	173.200.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	3 Laporan	ktm	294.400.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	ktm, smd, luarPrv	494.900.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	ktm, luarPrv	608.800.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	ktm, luarPrv	233.200.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	ktm, luarPrv	162.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		462.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	4 laporan	ktm	462.500.000
		Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan	4 Laporan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	250 Hektar	ktm	1.750.000.000
		Terlaksananya Kegiatan RHL	250 Hektar		
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev	1 laporan		-



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pongdar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		235.000.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	60000 Bibit	ktm	235.000.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	250 Hektar	bru, ktm, smd, luarPrv	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan	10%		1.050.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	ktm	650.000.000
		Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	4 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	5 Laporan	ktm	400.000.000
3.04.01.10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				10.328.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		512.600.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr	512.600.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		105.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr	105.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		360.400.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd, kbr, luarPrv	245.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	55 Stell	kbr	114.900.000
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	55 Stell		
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	100%		462.500.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL	10 Laporan	kbr	229.380.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	10 Laporan	kbr, mah	233.120.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	100%		462.500.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	207.025.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	kbr, mah, luarPrv	255.475.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4.400.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	smd, kbr, mah, luarPrv	971.400.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyenyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	577.450.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	505.200.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	0 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	345.950.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi/kampanye	0 Kegiatan	mah	600.000.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran	0 Kegiatan	mah	600.000.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	0 Laporan	kbr	400.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	0 Dokumen	kbr	400.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		925.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	smd, kbr, luarPrv	462.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	0 laporan 0 Laporan	smd, kbr, mah	462.500.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		1.750.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman Terlaksananya Kegiatan RHL	0 Hektar 0 Hektar	smd, kbr	1.750.000.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		400.000.000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	5 Laporan	smd, kbr, luarPrv	400.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	10%		950.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan	4 Laporan 4 Laporan	smd, kbr, luarPrv	486.750.000
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	7 Kelompok Tani Hutan (KTH)	smd, mah, kbr	463.250.000
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				14.650.000.000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				14.650.000.000
3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				14.650.000.000
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.593.060.000
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, ppu, smd, kbr, mah, psr, kkr, btg, ktm, bpn	2.593.060.000
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya disiplin aparatur	100%		1.142.110.000
3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	12 Unit	smd	679.500.000
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	462.610.000
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1.233.830.000
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	25 Kali	bru, smd	870.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah	16 Kali		
3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 Orang	smd	363.830.000
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	60%		1.060.000.000
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	360.000.000
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	6 Kali	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, psr	700.000.000
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	2%		2.100.000.000
3.05.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah DED PLTS Terpusat	10 DED	kk, smd, kbr, mah	1.500.000.000
3.05.27.02	Pengembangan Bioenergi	Jumlah Potensi pengembangan instalasi biogas skala rumah tangga	50 rumah tangga	bru, smd	300.000.000
		Jumlah Perusahaan dengan potensi energi berbasis POME	5 perusahaan		
		Jumlah penyalur BBM bersubsidi	60 penyalur		
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi	80 penyalur		
3.05.27.03	Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air	Jumlah OPD yang hemat listrik dan air	2 Laporan	ktm, smd	300.000.000
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	3.996 KK		1.800.000.000
3.05.37.03	Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Data Dasar untuk Basic Desain Renc Penyediaan Tenaga Listrik	3 Laporan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg	1.000.000.000
3.05.37.04	Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah monev pengembangan/pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	20 Lokasi	bru, ppu, smd, kbr, psr, kkr, btg, ktm, bpn	500.000.000
3.05.37.05	Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	25 Perusahaan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	300.000.000
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	3%		850.000.000
3.05.39.01	Konservasi Air Tanah	Jumlah peta konservasi air tanah CAT	10 Peta	btg, bpn, smd	400.000.000
3.05.39.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	60 Rekomtek	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	450.000.000
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	30%		571.000.000
3.05.41.01	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi	Luas Lahan yang direklamasi	8647 Hektar	bru, smd	571.000.000
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	80 Perusahaan		2.500.000.000
3.05.42.01	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Teknis Pertambangan	Jumlah penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	100 Milyar	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	500.000.000
3.05.42.02	Pembinaan dan pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Produksi Batubara	240 Juta Ton	bru, ktm, kkr, smd, kbr	650.000.000
		Jumlah Dana PPM	300 Milyar		
3.05.42.03	Pemantauan Perijinan Pertambangan	Jumlah Perusahaan Non CNC yang dipantau	75 Perusahaan	bru, btg, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300.000.000
3.05.42.04	Penggunaan Efisiensi biodiesel pada perusahaan tambang batubara	Jumlah perusahaan yang menggunakan biodiesel	20 Perusahaan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	750.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.05.42.05	Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Ketaatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan	25 Perusahaan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300.000.000
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	95%		800.000.000
3.05.43.01	Pemetaan sumberdaya Geologi	Data Lifting	4 Triwulan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	525.000.000
		Peta Geologi Tematik	4 Peta		
3.05.43.02	Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara	Data dan informasi Tekno ekonomi sumberdaya dan cadangan di Kaltim	7 Kab/Kota	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	275.000.000
3.05.44	Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor pertambangan	Jumlah penurunan emisi sektor energi	1045 Juta Ton CO2eq		-
3.05.44.01	Efisiensi penggunaan bahan bakar	Jumlah perusahaan yang melakukan efisiensi bahan bakar 15%	29 Perusahaan		-
3.05.44.02	Penggunaan Bahan Bakar Energi Baru Terbarukan	Jumlah perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%	29 Perusahaan		-
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				248.769.222.000
4.01	Kesekretariatan Daerah				119.468.400.000
4.01.03	Sekretariat Daerah				67.362.000.000
4.01.03.01	Biro Umum				35.000.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	95%		14.957.200.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	14.957.200.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90%		8.195.600.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	600.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	7.595.600.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90%		9.052.400.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	45 Kegiatan	smd	8.500.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	190 Orang	smd	552.400.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	20 Dokumen		715.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	10.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18 Dokumen	smd	705.000.000
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	12 bulan		811.500.000
4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro	jumlah PNS	190 orang	smd	84.500.000
4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik	4000 dokumen	smd	499.000.000
4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu	1500 Dokumen	smd	228.000.000
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga	190 buah		1.268.300.000
4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda	jumlah gedung yang terkelola dengan baik	6 buah	smd	357.500.000
4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik	95 acara	smd	910.800.000
4.01.03.02	Biro Hubungan Masyarakat				8.248.400.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan		620.200.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	620.200.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	25 Kegiatan		87.500.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 Unit	smd	57.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	10 Bulan	smd	30.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda	21 OT		268.550.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	10 Kegiatan	smd	150.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	20 Kegiatan	smd	118.550.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu	6 Laporan		22.600.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	13.400.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	4 Dokumen	smd	9.200.000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Terlaksananya peningkatan pembinaan adminitrasi kerjasama	60 Laporan		700.000.000
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah	20 Laporan	smd	250.000.000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	Laporan administrasi kerjasama Pemda yang terlayani dengan baik	20 Laporan	smd	200.000.000
4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Laporan kerjasama antar perintah	20 laporan	smd	250.000.000
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terwujudkan komunikasi kehumasan	1000 Berita, system, media		5.889.550.000
4.01.88.02	Kerjasama media	Jumlah kerjasama media	20 Media Massa	smd	167.000.000
4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi	1000 Berita	smd	5.518.050.000
4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi	2 2	smd	204.500.000
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keprotokolan yang profesional	400 Kegiatan		660.000.000
4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda	90 Instansi	smd	291.500.000
4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenataacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan	400 Kegiatan	smd	368.500.000
4.01.03.03	Biro Hukum				2.702.400.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	95%		313.900.000
		Terlayannya Administrasi Perkantoran	95%		
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	313.900.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		10.000.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	0 Unit		-
		Kendaraan, alat kantor	0 Unit		
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	32 Unit		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		369.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	smd	326.500.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Jumlah	smd	43.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu	6 Laporan		9.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	smd	6.500.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	10 Dokumen	smd	2.500.000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan	10 Jumlah		300.000.000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	10 Perda	smd	300.000.000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	meningkatnya produk hukum daerah provinsi	100%		250.000.000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah	650 Produk Hukum	smd	250.000.000
4.01.28.02	Evaluasi Peraturan Gubernur yang ditetapkan	Terlaksananya Peraturan Gubernur yang di Evaluasi	5 Pergub		-
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik	660 Jumlah		150.000.000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum	660 Jumlah	smd	150.000.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	250 Jumlah		600.000.000
4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan	250 Produk Hukum	smd	600.000.000
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kot	90%		530.000.000
4.01.33.01	Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	90%	smd	370.000.000
4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	85%	smd	160.000.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	90%		170.000.000
4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM	90%	smd	170.000.000
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Terlaksananya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	10 Perda		-
4.01.45.01	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan	Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	10 Perda		-
4.01.03.04	Biro Organisasi				3.538.400.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Laporan yang dikerjakan sesuai aturan	100%		423.800.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran	23 Laporan	smd	423.800.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan/ Kelengkapan Kantor yang dimanfaatkan	100%		87.000.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	9 Unit	smd	87.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	0 Unit	smd	-
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi sesuai tupoksi	70%		475.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi	1 Laporan	smd, luarPrv	280.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi	1 Laporan	smd, luarPrv	195.000.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	100%		950.200.000
4.01.42.02	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM	6 SPM	smd, luarPrv	512.000.000
4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey	1 Laporan	smd, luarPrv	246.000.000
4.01.42.04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi	5 Nominasi	smd, luarPrv	192.200.000
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%		50.000.000
4.01.51.01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Laporan Usulan Kepegawaian yang diproses	1 Laporan	smd, luarPrv	50.000.000
		Laporan Fasilitas Pelaksanaan Apel Pagi	1 Laporan		
		Laporan Penetapan Surat Keputusan yang diproses	1 Laporan		
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Area Perubahan yang dilaksanakan	100%		254.300.000
4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	smd, luarPrv	134.300.000
4.01.53.02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja	20 PD	smd, luarPrv	120.000.000
		Laporan hasil evaluasi dan penilaian penerapan budaya kerja	1 Laporan		
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKjIP sesuai aturan	100%		153.900.000
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Laporan	smd, luarPrv	153.900.000
		Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim	1 Laporan		
		Laporan Fasilitas Evaluasi AKIP	1 Laporan		
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1 Pergub		
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKjIP	1 Pergub		
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK	1 Laporan		
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	100%		966.000.000
		Persentase Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	100%		
4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi kelembagaan	38 PD	smd, luarPrv	590.000.000
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi kelembagaan	38 PD		
4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab/Kota yang dilakukan Fasilitas kelembagaannya	10 Kab/Kota	smd, luarPrv	161.000.000
4.01.80.08	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisis Jabatan	1 Laporan	smd, luarPrv	215.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Laporan Analisis Beban Kerja	1 Laporan		
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	100%		178.200.000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Laporan SOP	1 Laporan	smd, luarPrv	178.200.000
		Laporan Evaluasi	1 Laporan		
4.01.03.05	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				3.374.800.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100%		770.900.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	770.900.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	2%		25.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	25.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	80%		326.400.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	smd	276.400.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	2 Kegiatan	smd	50.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	90%		3.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	2.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	smd	1.000.000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Dokumen		211.400.000
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	1 Dokumen	smd	211.400.000
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pembakuan Nama Rupabumi	100%		854.500.000
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan	2 Dokumen	ktm, kkr, smd	197.000.000
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim	1 Dokumen	smd	225.400.000
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti	5 Dokumen	smd	432.100.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	100%		541.800.000
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan	1 Dokumen	smd	268.900.000
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	smd	272.900.000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Otda	1 Dokumen		373.900.000
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	smd	373.900.000
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		267.900.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen/Laporan	smd	267.900.000
4.01.03.06	Biro Kesejahteraan Rakyat				4.789.200.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	95%		580.100.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd, luarPrv	580.100.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	95%		213.300.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	15 Unit	smd	154.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	59.300.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		541.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Dokumen	smd, luarPrv	506.000.000
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Dokumen		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd	35.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	95%		47.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	25.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	10 Dokumen	smd	22.000.000
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	90%		950.000.000
4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	4 Dokumen	smd, luarPrv	700.000.000
4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	4 Dokumen	smd, luarPrv	250.000.000
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	90%		1.020.000.000
4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	smd, luarPrv	550.000.000
4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4 Dokumen	smd, luarPrv	250.000.000
4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	4 Dokumen	smd, luarPrv	220.000.000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	90%		800.000.000
4.01.19.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	smd, luarPrv	300.000.000
4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Dokumen	smd, luarPrv	250.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Dokumen	smd, luarPrv	250.000.000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat	90%		637.800.000
4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Hibah dan Bantuan Sosial	2 Dokumen	smd	337.800.000
4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kesra	1 Dokumen	smd	100.000.000
4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	smd	200.000.000
4.01.03.07	Biro Perekonomian				1.927.600.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		413.850.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	413.850.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		270.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	270.000.000
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20 kegiatan		
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%		133.950.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	5 Dokumen	smd	77.950.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	4 Dokumen	smd	56.000.000
4.01.22	Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga Keuangan	Jumlah Kebijakan Bidang Penanaman Modal, Perusda dan Sarana Perekonomian	1 Kebijakan		-
4.01.22.01	Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan	jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	8 kali	smd	-
4.01.22.02	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal	jumlah koordinasi penanaman modal dan sarana perekonomian	4 kali	smd	-
4.01.23	Program Pengembangan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	2 Kebijakan		-
4.01.23.01	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian	jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	3 kali	smd	-
4.01.23.02	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	4 kali	smd	-
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	2 Kebijakan		290.000.000
4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	3 kali	smd	76.000.000
4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	1 kali	smd	69.000.000
4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	2 kali	smd	108.000.000
4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	1 kali	smd	37.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Tersedianya Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah	1 Kebijakan		419.800.000
		Tersedianya Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola BUMD	1 Kebijakan		
		Tersusunnya Kebijakan Promosi Daerah Sarana dan Prasarana Perekonomian	1 Kebijakan		
4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah	1 Dokumen	smd	105.000.000
4.01.49.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	1 Dokumen	smd	100.000.000
4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	8 kali	smd	214.800.000
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	6 Kebijakan		400.000.000
4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan	smd	260.000.000
4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	1 kali	smd	60.000.000
4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	2 kali	smd	80.000.000
4.01.96	Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah	Jumlah fasilitas dan kebijakan ekonomi daerah	3 kebijakan		-
4.01.96.01	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi antara OPD terkait Provinsi dan Kabupaten/kota	1 kali	smd	-
4.01.96.02	Koordinasi Penyaluran Raskin	Koordinasi dalam rangka pendistribusian	2 kali	smd	-
4.01.96.03	Koordinasi peningkatan ekspor impor/directcall	koordinasi pemprov, kab/kota dan stakeholder	1 kali	smd	-
4.01.99	Program Peningkatan Fasilitas dan Sinergi pada bidang Industri dan jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	2 Kebijakan		-
4.01.99.01	Koordinasi dan sinergi sektor pariwisata koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	4 kali	smd	-
4.01.99.02	Koordinasi dan sinergi sektor perhubungan dan pariwisata	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	1 kali	smd	-
4.01.03.08	Biro Administrasi Pembangunan				5.477.600.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		868.900.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	868.900.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90%		207.500.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	5 Unit	smd	120.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	15 Unit	smd	87.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90%		928.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	smd, psr, luarPrv	828.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	20 Kegiatan	luarPrv	100.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	80%		177.400.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	9 Dokumen	bpn, smd, luarPrv	118.400.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	59.000.000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan	80%		805.000.000
4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	tertib administrasi	100%	bpn, smd, luarPrv	225.000.000
4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan/ peningkatan kapasitas	50 orang	bpn, smd, luarPrv	370.000.000
4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	250 paket	bpn, smd, luarPrv	210.000.000
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan	80%		1.118.400.000
4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi APBD dan Sektoral	1 dokumen	bpn, smd, luarPrv	372.800.000
4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi APBD dan Sektoral	1 dokumen	bpn, smd, luarPrv	372.800.000
4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	1 dokumen	smd, luarPrv	372.800.000
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Terlaksananya pengendalian kegiatan administrasi pembangunan dalam mencapai efektifitas program pembangunan	90%		1.372.400.000
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Koordinasi antara OPD terkait Provinsi dan Kabupaten/kota	1 kali	bru	189.000.000
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Meningkatnya pengendalian program kegiatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan	90%	bru, bpn, smd, luarPrv	858.400.000
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Meningkatnya pengendalian program kegiatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan	90%	smd, luarPrv	325.000.000
4.01.03.09	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				2.303.600.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		287.200.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	287.200.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		50.500.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	37.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	13.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		536.100.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	14 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	536.100.000
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan	90%		548.000.000
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	239.000.000
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	4 kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	204.500.000
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	4 kali	smd, luarPrv	104.500.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100%		478.500.000
4.01.68.01	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Jumlah Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	120.000.000
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Jumlah Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	4 kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	120.000.000
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	238.500.000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral	90%		403.300.000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	203.800.000
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	199.500.000
4.01.04	Sekretariat DPRD				45.000.000.000
4.01.04.01	Sekretariat DPRD Provinsi				45.000.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100 Persen		10.206.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	10.206.000.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	80 Persen		5.423.580.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia	334 Unit	smd	325.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	3.598.580.000
4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	1500000000 tahun	smd	1.500.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80%		5.570.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan	smd, luarPrv	4.270.000.000
		jumlah bulan penyediaan langganan surat kabar	12 bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota yang mengikuti pelatihan	100 Orang	smd	1.300.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dengan baik	80 Persen		1.059.020.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	80 Dokumen	smd	272.020.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	21 dokumen	smd, luarPrv	787.000.000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80%		22.741.400.000
4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Raperda yang telah dikoordinasi	10 kegiatan	bpn, smd	1.335.000.000
4.01.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD	3 kali	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu,	14.325.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
				smd, kbr, mah, psr	
4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji	4 Kasus	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	102.500.000
4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi	1 kasus	smd	100.500.000
4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik	850 kegiatan	smd, luarPrv	2.056.800.000
4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah pelaksanaan rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 paket	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	4.821.600.000
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				7.106.400.000
4.01.05.01	Badan Penghubung Provinsi				7.106.400.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.409.345.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.409.345.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2.279.425.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	62 Jenis	smd	624.425.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1.655.000.000
		Luas bangunan yang direhab	600 M2		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		1.071.400.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Kegiatan	smd	802.000.000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	25 Orang	smd	269.400.000
		Jumlah pakaian dinas	174 Stel		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%		44.500.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	5 Dokumen	smd	26.500.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	smd	18.000.000
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII	24000 Orang		601.230.000
4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun	23 Kegiatan	smd	162.000.000
4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun	7 Kegiatan	smd	50.750.000
4.01.38.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	1 Laporan	smd	388.480.000
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	100%		700.500.000
4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	60 Kunjungan	smd	261.500.000
4.01.39.02	Pelayanan mess	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess	1 Laporan	smd	194.000.000
4.01.39.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1077 Dokumen	smd	245.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.02	Pengawasan				6.603.500.000
4.02.01	Inspektorat				6.603.500.000
4.02.01.01	Inspektorat				6.603.500.000
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran	12 bulan		1.174.400.000
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	1 Tahun	smd	1.174.400.000
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	45 Buah		402.250.000
4.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	45 unit	smd	242.250.000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	10 unit	smd	160.000.000
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	60 Kegiatan		770.300.000
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas kelembagaan pemda yang dilaksanakan	60 kegiatan	smd	549.300.000
4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	60 orang	smd	221.000.000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	7 Dokumen		152.300.000
4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	7 dokumen	smd	152.300.000
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	60 orang		706.500.000
4.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	12 kegiatan	smd	706.500.000
4.02.87	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 perangkat daerah		108.000.000
4.02.87.01	Penerapan Zona Integritas Pada PD	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 perangkat daerah	smd	108.000.000
4.02.96	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	90%		166.500.000
4.02.96.01	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90%	smd	166.500.000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja	46 perangkat daerah		503.000.000
4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan	37 perangkat daerah	smd	503.000.000
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	17 laporan		1.963.250.000
4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan pemprov dan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	13 laporan	smd	341.500.000
4.02.98.03	Pemeriksaan kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	46 laporan	smd	1.621.750.000
4.02.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN	4 kegiatan		657.000.000
4.02.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	20 pengaduan	smd	237.000.000
4.02.99.03	Pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	4 kegiatan	smd	420.000.000
4.03	Perencanaan				35.820.360.000
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				35.820.360.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				35.820.360.000
2.14.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	92 Persen		2.227.250.000
2.14.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 Dokumen	smd	1.372.250.000
2.14.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	25 IGT	smd	855.000.000
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100 Persen		6.343.490.000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	6.343.490.000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		5.008.160.000
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	2.963.150.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	2.045.010.000
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 Persen		4.735.700.000
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 Bulan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.385.700.000
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	smd	1.350.000.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 Persen		525.800.000
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	410.800.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen		
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	115.000.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	90 Persen		2.300.000.000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	smd	759.800.000
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	smd	870.000.000
		Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	1 Dokumen		
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	smd	670.200.000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75 Persen		2.444.260.000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3 Dokumen	smd	1.440.260.000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPDP	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPDP Kab/Kota	6 Laporan	smd	1.004.000.000
		Dokumen Evaluasi RKPDP	1 Dokumen		



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	90 Persen		2.599.300.000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	smd	600.000.000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	smd	750.000.000
		Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 Dokumen		
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	smd	1.249.300.000
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	1 Laporan		
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	1 Laporan		
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	1 Laporan		
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	100 Persen		2.100.000.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	smd, luarPrv	739.900.000
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4 Laporan	smd, luarPrv	712.700.000
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	smd	647.400.000
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 Persen		7.536.400.000
4.03.48.01	Penyusunan RKPDP	Dokumen RKPDP Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPDP Tahun 2019	2 Dokumen	smd	1.065.000.000
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	1 Dokumen	smd	1.200.000.000
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPDP yang dilakukan	3 Forum	smd	3.000.000.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 Dokumen	smd	170.000.000
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 Tahap	smd	501.400.000
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 Dokumen	smd	1.600.000.000
4.04	Keuangan				65.545.612.000
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				37.868.292.000
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah				37.868.292.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		18.257.588.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kantor yang terlayani	45 unit	smd	18.257.588.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		8.256.145.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8 Jenis	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.873.819.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11 Jenis	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	4.382.326.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		3.181.167.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	40 Koordinasi / Konsultasi	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.000.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 PNS	smd	181.167.000
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase capaian Kinerja Instansi Pemerintah	100%		305.100.000
4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	186.300.000
4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen / Laporan	smd	118.800.000
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	100%		1.032.000.000
4.04.30.02	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	smd	673.200.000
		Jumlah sistem informasi pendapatan dikembangkan	2 Sistem Informasi		
4.04.30.03	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	3 Kajian	smd	358.800.000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%		2.832.280.000
4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	6000000000 0 Rupiah	smd	334.500.000
4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	8020000000 00 Rupiah	smd	1.564.080.000
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	5750000000 00 Rupiah		
4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	1715000000 000 Rupiah	smd	933.700.000
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	7350000000 Rupiah		
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	2094750000 00 Rupiah		
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%		1.045.400.000
4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	2090109000 0 Rupiah	smd	315.600.000
4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2448976400 00 Rupiah	smd	275.000.000
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	5712335410 00 Rupiah		
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	9335897000 Rupiah		
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	2148010000 000 Rupiah	smd	454.800.000
		Jumlah realisasi DAU	6421019570 00 Rupiah		
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	100 Dokumen		517.200.000
4.04.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi	3 Jenis Pendapatan	smd	298.200.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan			
4.04.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5 Dokumen Peraturan	smd	219.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	100%		2.441.412.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	23250000000 Rupiah	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	867.480.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	1921000000000 Rupiah	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1.573.932.000
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				27.677.320.000
4.04.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				27.677.320.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		5.240.700.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	5.240.700.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1.326.050.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	993.050.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	333.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		100.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	100.000.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas	100%		12.955.740.000
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	300.000.000
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	1.595.000.000
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	1.510.100.000
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	403.880.000
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	436.800.000
4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	414.720.000
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	661.800.000
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	463.880.000
4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	1.345.280.000
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	533.280.000
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	150.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	766.800.000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	1.656.800.000
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	510.500.000
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 bulan	smd	376.000.000
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 bulan	smd	705.500.000
4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	50 bulan	smd	195.400.000
4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	9 bulan	smd	930.000.000
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas	100%		1.950.210.000
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	555.000.000
4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	340.000.000
4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 bulan	smd	200.000.000
4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	210.000.000
4.04.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 bulan	smd	248.000.000
4.04.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	397.210.000
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		6.104.620.000
4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 bulan	smd	4.600.020.000
4.04.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 bulan	smd	935.000.000
4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	5 bulan	smd	569.600.000
4.05	Kepegawaian				12.227.600.000
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				9.227.600.000
4.05.01.01	Badan Kepegawaian Daerah				9.227.600.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan		1.768.727.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.768.727.000
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		938.000.000
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor	51 unit	smd	338.000.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	smd	600.000.000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah	85%		1.010.300.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92 kegiatan	smd	800.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan		
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dilingkungan BKD Prov. Kaltim	5 PNS	smd	210.300.000
		Jumlah Pakaian Dinas	69 Stel		
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	75 Nilai AKIP		149.823.000
4.05.10.01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 dokumen	smd	36.823.000
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6 dokumen	smd	113.000.000
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan	97%		2.540.750.000
4.05.47.01	Ujian Dinas	Jumlah PNS Pemprov. Kaltim yang mengikuti Ujian Dinas Tk. I	50 Orang	smd	98.000.000
4.05.47.02	Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang diterbitkan	120 SK	smd	2.442.750.000
4.06.45	Program Pendidikan Kedinasan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat	155 Orang		200.000.000
4.06.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim	155 Orang	smd	200.000.000
4.06.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan	70%		2.620.000.000
4.06.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah laporan penyusunan formasi pegawai	2 laporan	smd	300.000.000
4.06.47.03	Penempatan PNS	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi	300 SK	smd	85.000.000
4.06.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu	1300 SK	smd	200.000.000
4.06.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	3 Aplikasi	smd	150.000.000
4.06.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun	300 Orang	smd	150.000.000
4.06.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I	10 PNS	smd	200.000.000
4.06.47.24	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah rekomendasi permasalahan kepegawaian	10 rekomendasi	bpn, smd	300.000.000
4.06.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98%	smd	50.000.000
4.06.47.32	Pemberhentian PNS	Jumlah Pegawai yang Pensiun	255 PNS	smd	100.000.000
4.06.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup	99%	smd	85.000.000
4.06.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terukur dan terpetakan kemampuannya	200 PNS	smd	200.000.000
4.06.47.35	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah Peremajaan Data PNS	11570 PNS	bpn, smd	150.000.000
4.06.47.37	Pengembangan Karir Pegawai	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	114 PNS	smd	500.000.000
4.06.47.38	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing, Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, dan Promosi	150 PNS	smd	150.000.000
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3.000.000.000
4.05.02.01	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3.000.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	100%		277.250.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	277.250.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		560.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kegiatan	smd	466.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	3 Kegiatan	smd	94.500.000
4.01.41	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI	95%		787.900.000
4.01.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Terlaksananya kegiatan Olahraga Seni dan Budaya anggota KORPRI	5 Kegiatan	smd	502.650.000
4.01.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI	1 Paket	smd	234.250.000
4.01.41.08	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Terlaksananya Musyawarah, Rakerja, Rakor DP KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	5 Kegiatan	smd	33.000.000
4.01.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan	1 Tahun	smd	18.000.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.374.350.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksana administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.374.350.000
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				6.350.650.000
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.350.650.000
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.350.650.000
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		3.906.250.000
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3.906.250.000
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		449.500.000
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	smd	48.000.000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	401.500.000
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah	100%		892.000.000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	smd	842.000.000
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	50 Kegiatan		
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Dalam dan Luar Daerah	50 Kegiatan	smd	50.000.000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Intansi Pemerintah	60%		125.500.000
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	65.500.000
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	60.000.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Apartaur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	90%		358.500.000
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	100.000.000
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	158.500.000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	100.000.000
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis	90%		294.550.000
4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	smd	102.050.000
4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	30 Orang	smd	90.500.000
4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	90 Orang	smd	102.000.000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter	100%		324.350.000
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Kepemimpinan dan CPNS yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Prajabatan	150 Orang	smd	100.000.000
4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	4 Kegiatan	smd	124.350.000
4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	30 Orang	smd	100.000.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan				3.753.100.000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				3.753.100.000
4.07.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				3.753.100.000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.268.370.000
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.268.370.000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%		499.350.000
4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 Bulan	smd	499.350.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	12 bulan		741.960.000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	84 kegiatan	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr, luarPrv	741.960.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	41 Kegiatan		
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	34 Dokumen		146.120.000



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	ktm, bpn, smd, luarPrv	124.620.000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	24 laporan	bpn, smd	21.500.000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%		134.050.000
4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	80%	smd	42.550.000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana	70 artikel		
4.07.23.03	Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbangan	100%	ktm, bpn, smd	91.500.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	3 Rekomendasi		356.750.000
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	1 Laporan	btg, bpn, smd, luarPrv	263.250.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Laporan		
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.41.02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	5 laporan	btg, bpn, kkr, smd, luarPrv	93.500.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	3 Rekomendasi		270.000.000
4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	1 Laporan	btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, luarPrv	200.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.47.02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	4 Laporan	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, luarPrv	70.000.000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	3 Rekomendasi		336.500.000
4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan	1 Laporan	ktm, bpn, kkr, smd, luarPrv	200.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 Laporan		
4.07.48.02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan	7 laporan	bru, psr, mah, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luar Prv	136.500.000
JUMLAH					3.103.557.329.375

Tabel 6.2
Penelaahan Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur Tahun 2019



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKP DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
I. FRAKSI GOLKAR					
Bidang Pertanian					
1	Normalisasi Sungai Gunung Intan Kelompok Tani Mekar Bersama Desa Gunung Intan	PPU	500,000,000	PU	
2	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sumber Makmur Desa Gunung Intan	PPU	1,200,000,000	DAK (pembangunan jalan usahatani di desa babulu darat)	
3	Combine Hasvester 1 Unit Kel. Tani Karya Bakti Desa Gunung Intan	PPU	460,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan (522.000.000) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan (332.000.000)	
4	Combine Hasvester 1 Unit Kel. Tani Mekar Bersama Desa Gunung Intan	PPU	460,000,000	APBN Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan (522.000.000) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan (332.000.000)	
5	Pembuatan Pintu Air Primer RT. 17 Desa Gunung Intan	PPU	950,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				tepat guna (464.600.000)	
6	Pembuatan Linning Irigasi Tersier Desa Rawa Mulya	PPU	700,000,000	APBN Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan (522.000.000,00) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan (332.000.000)	
7	Pembuatan Pintu Air Tersier Desa Sumbu Sari	PPU	500,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
8	Pengerasan Jalan Usaha Tani Karang Jinawi Kec. Sepaku	PPU	1,500,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
9	Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Desa Sebakung Kec. Longkali	PASER	3,000,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				tepat guna (464.600.000)	
10	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani (JUT) Rt.07 Desa Handil terusan	KUKAR		APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
11	Peningkatan Badan Jalan Tani RT.1 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	KUKAR		APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
12	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani KM 2 Jalan Dayak Besar Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	KUKAR		APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
13	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani (JUT) Rt.13 Desa Handil terusan	KUKAR		APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
14	Lanjutan peningkatan jalan usaha tani samping makam Desa Jonggon Jaya	KUKAR	150,000,000	APBN , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000)	
	Bidang Kelautan dan Perikanan				
	-				
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
	Bidang Infrastruktur				
1	Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan armada truck sampah, Kota Bangun	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
2	Lanjutan pipanisasi air bersih Desa Handil Terusan	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
3	Semenisasi jalan lingkungan Sungai Baru Desa Babulu Darat	PPU		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
4	Pembuatan Siring Jalan Gunung Intan Tambong Desa Gunung Intan	PPU	2.700.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
5	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sumber Makmur Desa Gunung Intan	PPU	1.200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
6	Siring Jalan Lingkungan RT.04 Desa Gunung Intan	PPU	1.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
7	Semenisasi Jalan Lingkungan Sungai Baru Desa Babulu Darat	PPU	1.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
8	Pengerasan Jalan Usaha Tani Karang Jinawi Kec. Sepaku	PPU	1.500.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
9	Rehab Badan Jalan Dusun Kuyung seberang Kec. Muara Wis ke Terminal Kayu BATU Seberang Kec Muara Muntai	Kutai Kertanegara	15.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
10	Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Desa Rebaq Rinding ke Desa Pulau Harapan Kec. Muara muntai	Kutai Kertanegara	1.500.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
11	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Desa Rebaq Rinding ke Desa Pulau Harapan Kec. Muara Muntai	Kutai Kertanegara	200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
12	Pembuatan Siring Jalan Gunung Intan Tambong Desa Gunung Intan	PPU	2.700.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
13	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sumber Makmur Desa Gunung Intan	PPU	1.200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
14	Siring Jalan Lingkungan RT.04 Desa Gunung Intan	PPU	1.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
15	Semenisasi Jalan Lingkungan Sungai Baru Desa Babulu Darat	PPU	1.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
16	Pengerasan Jalan Usaha Tani Karang Jinawi Kec. Sepaku	PPU	1.500.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan P. Suryanata Gg. Firdaus Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan P. Suryanata Gg. H.Kuni Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Aminah II (Jalan Samping Masjid Ar-Rasyidin) Kel. Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Amuntai IV (Jalan Belakang Masjid Ar-Rasyidin) Kel. Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Monas Blok F RT.37 Kel. Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Manunggal 20 Kel. Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Jl. Flamboyan Menuju Makam Keramat Wali Allah Kel. Loa Buah Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Padat Karya Gg.Karya Mandiri 8 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perumahan Korem (Bumi Alam Indah) Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Jakarta Gg.Israp Kel. Loa Bakung Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
27	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani (JUT) Rt.07 Desa Handil terusan	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
28	Peningkatan Badan Jalan RT.24 Desa Sungai Mariam			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
29	Semenisasi Gang cempaka RT.02 Desa Sungai Mariam			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
30	Peningkatan Jalan Bali RT.4 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
31	Peningkatan Jalan Bali RT.6 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
32	Peningkatan Jalan Kudungga RT.14 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
33	Peningkatan Gang Umi RT.16 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
34	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani RT.17 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
35	Peningkatan Jalan RT.01, 02, dan 09 Dusun Antal Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
36	Peningkatan Jalan Sirbaya menuju Batas Desa Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
37	Peningkatan Jalan Sebulu Modern - Sebulu Ulu RT.3 Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
38	Peningkatan Jalan M. Asri RT.15 Dusun Antelan tembus ke RT.09 Dusun Antal Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
39	Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa RT.5 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
40	Peningkatan Jalan Gg.Langgar RT.03 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
41	Peningkatan Badan Jalan Tani RT.1 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
42	Peningkatan Jalan Rt.10 Desa Beloro Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
43	Peningkatan Jalan Dayak Besar RT.15 - T.16 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
44	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani KM 2 Jalan Dayak Besar Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
45	Peningkatan Jalan Abdullah RT.15 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
46	Peningkatan Jalan KH. Dewantara RT.06 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
47	Peningkatan Jalan Wayang Golek RT.15 - RT.16 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
48	Pengerasan Badan Jalan Poros Handil Terusan - Kutai Lama	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
49	Pembangunan Badan Jalan Handil. B RT.07 Desa Handil Terusan			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
50	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani (JUT) Rt.13 Desa Handil terusan			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
51	Pembangunan Badan Jalan RT.03 dan RT.10 Desa Handil Terusan			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
52	Pembangunan jalan Stadion kota Bangun	Kutai Kertanegara	5.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
53	Peningkatan Jalan Sri Bangun Gang Hidayah	Kutai Kertanegara	2.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
54	Pembangunan Jembatan KBU Kedung Murung Rimba Ayu, Kota bangun	Kutai Kertanegara	15.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
55	Pembangunan Jalan Poros Desa Karang Tunggal L 2, Tenggarong seberang	Kutai Kertanegara	15.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
56	Peningkatan jalan Triu Gang Nila, Tenggarong seberang	Kutai Kertanegara	250.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
57	Peningkatan Jalan Poros Muara Asa - Menceleo, Melak	Kutai Barat	5.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
58	Peningkatan Jalan SP. Estafet - Gunung Es - Lakan Bilem, Melak	Kutai Barat	12.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
59	Peningkatan Jalan Poros Muara Asa - Muara Asa, Melak	Kutai Barat	5.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
60	Pembuatan Jalan dan Jembatan Kukar-Kubar, Perian-Muara Kedang- Jempang-Siluq Ngurai	Kutai Barat	98.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
61	Perbaikan jalan Liang, Kota Bangun	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
62	Peningkatan Jalan Tepian Tebo - Kota bangun Ilir (longsor)	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
63	Peningkatan Jalan Sebelimbingan - Kembang Janggut	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
64	Pembangunan jalan Benua baru - Muara Wis			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
65	Pembangunan jalan Benua baru - SP 5			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
66	Semenisasi/aspal Jalan Lingkungan di Benua baru			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
67	Pembangunan jalan Kedang Murung-Rimba Ayu			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
68	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kayu desa Sangkuriman - Liang Ulu			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
69	Pembangunan Jalan Pendekat Kota bangun - Pelabuhan			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
70	Lanjutan semenisasi bahu jalan samping lapangan sepak bola dan pembuatan taman samping lapangan bola voli Kecamatan Loa Kulu	Kutai Kertanegara	100.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
71	Lanjutan peningkatan jalan RT. 06 Desa Margahayu	Kutai Kertanegara	150.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
72	Lanjutan peningkatan jalan Gunung Timur RT. 06 Desa Loh Sumber	Kutai Kertanegara	150.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
73	Lanjutan peningkatan jalan usaha tani samping makam Desa Jonggong Jaya	Kutai Kertanegara	150.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
74	Semenisasi jalan depan pasar Loa Kulu Desa Loa Kulu Kota	Kutai Kertanegara	170.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
75	Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 13 Desa Margahayu	Kutai Kertanegara	120.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
76	Pembuatan Turap Ulin Jl. Sopyonyo Desa Ponoragan, Kec. Loa Kulu	Kutai Kertanegara	150.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
77	Peningkatan jalan Dusun Lembonang Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu	Kutai Kertanegara	150.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
78	Penurapan Gang Sanotoso Jl. Barong Tongkok RT.20 Kel. Maluhu			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
79	Peningkatan badan jalan Gang Mayas Jl. Barong Tongkok RT.20 Kel. Maluhu			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
80	Semenisasi Jalan Kuburan Muslimin Gunung Wang RT. 43 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
81	Peningkatan badan jalan Gg. 2 RT 37 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
82	Penurapan Dan Pengurukan Jalan Gang Durian RT. 07 Kel. Baru Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
83	Penurapan Dan Penimbunan Jalan Gg. 2 Jl. Mangkuraja RT. 20 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
84	Semenisasi jalan di RT. 001 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
85	Perbaikan Jalan Aspal RT. 02 Dusun Karya Jaya Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
86	Drainase RT. 22 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
87	Drainase RT. 19 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
88	Semenisasi Jalan Gg. Sido Rukun RT 24 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
89	Semenisasi Jalan Gg. Pradita RT 24 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
90	Semenisasi Jalan Gg.Rukun RT 24 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
91	Rehab Jembatan Ulin Jl. Melak 1 Gg. Bahagia RT 24 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
92	Semenisasi Jalan Gg. Damai sampai Gg. Rukun RT. 75 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
93	Semenisasi Jalan Gang Dika RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
94	Semenisasi Jalan Blok A Gang Dika RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
95	Perbaikan Drainase Gang Dika RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
96	Perbaikan Drainase Blok A Gang Dika RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
97	Semenisasi Jalan Gg. 6 RT. 026 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
98	Semenisasi Jalan Gg. 5 RT. 026 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
99	Semenisasi Jalan Gg. 4 RT. 026 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
100	Semenisasi Jalan Belida I RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
101	Semenisasi Jalan Belida I Blok B 1. A RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
102	Semenisasi Jalan Belida I Blok 2 RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
103	Semenisasi Jalan Belida I Blok B 3 RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
104	Semenisasi Jalan Belida I Blok C 4 RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
105	Semenisasi Jalan Belida I Blok D RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
106	Peningkatan Jalan Belida 1 Blok D dalam RT. 031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
107	Peningkatan Jalan Gang Ikip 1 RT. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
108	Peningkatan Jalan Gang Ikip 2 RT. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
109	Peningkatan Jalan Gang Ikip 3 RT. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
110	Penerangan lampu jalan sepanjang jalan Ikip Mekar Sari RT. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
111	Semenisasi Jalan Gang Keluarga RT 09 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
112	Semenisasi Jalan Wolter Monginsidi RT. 32 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
113	Lanjutan Jalan Ke langgar Al-Mahmud RT.13 Kel. Timbau Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
114	Lanjutan Jalan bawah Perum. Penerangan RT.13 Kel. Timbau Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
115	perbaikan dan semenisasi jalan Gang 1 Jl. KH. Dewantara RT. 01 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	157.500.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
116	Perbaikan jembatan ulin Jl. KH. Dewantara RT. 01 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	90.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
117	Perbaikan Parit Wilayah RT. 01 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	82.500.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
118	Pembuatan jalan Gg. Ulin Jl. Anggansa 2 RT. 03 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	48.125.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
119	Pembuatan jembatan Ulin Jl. KH. Dewantara Gg. 4 RT. 08 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	61.250.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
120	Pembuatan Parit Turap Ulin kiri kanan Jl. KH. Dewantara RT.11 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	192.500.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
121	Semenisasi Gg. Keluarga 2 Jl. KH. Dewantara RT. 11 Kelurahan Panji	Kutai Kertanegara	90.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
122	Rehabilitasi jalan poros Perjuangan RT. 42 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
123	Lanjutan Semenisasi Jalan beringin 5 tembus gang mega RT. 40 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
124	Rehabilitasi Jalan Muso Bin Salim RT. 5,6,7 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
125	Semenisasi Jalan Gang RT. 35 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
126	Lanjutan semenisasi jalan Tirta Kencana 4 RT. 38 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
127	Semenisasi Jalan Gang RT.29 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
128	Semenisasi Jalan Gang RT.37 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
129	Semenisasi Jalan Gang RT.02 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
130	Rehab Jalan Gang RT.20 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
131	Rehabilitasi Jalan Gang RT.08 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
132	Rehabilitasi Jalan Gang RT.09 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
133	Semenisasi Jalan Gang RT.42 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
134	Rehabilitasi Semenisasi Jalan Gang RT.32 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
135	Semenisasi Jalan Gang RT.33 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
136	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Rukun RT.33 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
137	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 13 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
138	Rehabilitasi Jalan Gang Mitra Wahyu RT. 22 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
139	Rehabilitasi Jalan Gang 5 RT. 33 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
140	Rehabilitasi Jalan Gang Rahmat RT. 37 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
141	Semenisasi Jalan Gang RT. 38 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
142	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 41 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
143	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 01 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
144	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 04 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
145	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 12 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
146	Rehabilitasi Jalan Gang Danau Murung RT. 22 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
147	Semenisasi Jalan Tirta Ayu A RT. 36 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
148	Semenisasi Jalan Tirta Ayu B RT. 36 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
149	Semenisasi Jalan Gang Merdeka 6 RT. 42 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
150	Semenisasi Jalan Gang Densanak RT. 42 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
151	Semenisasi Jalan Padat Karya RT. 34 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
152	Semenisasi Jalan Gang Salak RT. 34 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
153	Semenisasi Jalan Gang 7 RT. 28 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
154	Rehab Gang Tirta Sari RT. 28 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
155	Rehab Jalan Gang 2 RT. 19 Kel. Melayu Tenggarong	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
156	Perbaikan jalan dan parit di sekitar kantor kelurahan melayu			Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
157	Perbaikan jalan provinsi di tenggarong seberang	Kutai Kertanegara		Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
158	Peningkatan Jalan Kel. Simpang pasir, Kel. Bukuan, Kel. Rawa makmur, Kel. Handil Bhakti (tersebar)	Samarinda	2.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
159	Peningkatan Jalan Cempaka RT 26 dan RT 38 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Samarinda	1.500.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
160	Pembangunan Jalan tembus Sepinggian Baru - km 8	Balikpapan	55.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
161	Pembangunan Jalan tembus km 5,5 - km 13	Balikpapan	16.000.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
162	Pembangunan Jalan Labu Siam RT 19 Kel. Gunung Elai	Samarinda	200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
163	Semenisasi Jalan Labu Putih RT 19 Kel. Gunung Elai	Samarinda	200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
164	Pembangunan Jalan Labu Putih 4 RT 19 Kel. Gunung Elai	Samarinda	200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	
165	Pembangunan Jalan Labu Putih 5 RT 19 Kel. Gunung Elai	Samarinda	200.000.000	Diarahkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
166	Semenisasi Jalan Lingkungan Sungai Baru Desa Baru Babulu Darat	PPU	1,000,000,000		
167	Normalisasi Sungai Rintik Desa Rintik	PPU	500,000,000		
168	Rehabilitasi Saluran Irigasi Handil Pelita Desa Muara Tlake	PASER	2,100,000,000	Bantuan Keuangan	
169	Rehabilitasi Saluran Irigasi Handil Jaya Desa Muara Tlake	PASER	2,400,000,000	Bantuan Keuangan	
170	Rehabilitasi Saluran Irigasi Handil Harapan Muara Tlake	PASER	2,400,000,000	Bantuan Keuangan	
171	Turap Sungai Handil. D Rt.03 Desa Handil Terusan	KUKAR		Bantuan Keuangan	
172	Peningkatan Saluran Irigasi Kec. Palaran	SAMARINDA	2,000,000,000	BANKEU	
173	Pembangunan Pintu Air	SAMARINDA	2,000,000,000	Bantuan Keuangan	

II. FRAKSI PDIP

II. FRAKSI PDIP					
Bidang Pertanian					
1	Pengadaan bantuan Tandon	Kutim		BANKEU	
2	Pengadaan bantuan alat semprot pertanian	Kutim		APBN , APBD 51. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 51.03 Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan , 52. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan 52.01. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna	
3	Bantuan langsung terhadap kelompok tani, peternakan, perikanan dan kelautan berupa saporodi, pupuk dan lain-lain (Smd)	Samarinda		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00)	
4	Bantuan langsung terhadap kelompok tani, peternakan, perikanan dan kelautan berupa saporodi, pupuk dan lain-lain (bpn)	Balikpapan		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00)	
Bidang Kelautan dan Perikanan					



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
1	Bantuan pengadaan alat tangkap ikan Bontang	Bontang		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00)	
2	Bantuan pengadaan alat tangkap ikan Kutim	Kutim		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00)	
3	Perbaikan tambak dan bagan tancap untuk tanggul perikanan kelautan kepada kelompok nelayan di Anggana	Kukar		BANKEU	
4	Bantuan mesin kapal nelayan dan perbaikan kapal nelayan di kecamatan anggana	Kukar		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > Lokus Ds. Melayu, Kec. Tenggarong	
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Pengadaan Solar Cell	Kutim		Diusulkan melalui DAK PLTS Terpusat di Kecamatan Sandaran Desa Tanjung Mangkalihit	
	Bidang Infrastruktur				
1	Pengadaan instalasi air bersih, lampu penerangan dan rumah layak huni	KUBAR, KUKAR, MAHULU		Pembangunan rumah layak huni diarahkan pada kegiatan APBN (Kemenpupera) dan melalui Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBD Provinsi), Pengadaan instalasi air bersih diarahkan melalui bantuan keuangan,	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				Pengadaan lampu penerangan diarahkan melalui Bantuan Keuangan	
2	Perbaikan Jalan Gemini RT. 20, 21 s/d 25 Kel. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim	Kutai Timur		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
3	Perbaikan Jalan Provinsi Jl. AM. Ayub Rinding			Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
4	Infrastruktur (Perbaikan Jalan, Jembatan dan Normalisasi Drainase) Kota Bontang	Bontang		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
5	Infrastruktur (Perbaikan Jalan, Jembatan dan Normalisasi Drainase) Kab. Kutim	Kutai Timur		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
6	Perbaikan Jembatan Desa Long Lanuk Kab. Berau	Berau		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
7	Peningkatan Jalan Mencimai Barong Tongkok Kubar	Kutai Barat		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
8	Peningkatan Jalan Kapling Simpang Raya Barong Tongkok Kubar	Kutai Barat		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
9	Semenisasi Jalan Ringgeng Barong Tongkok Kubar	Kutai Barat		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
10	Peningkatan Jalan Nyuatan Kubar	Kutai Barat		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
11	Jalan Kubar – Mahulu	Kutai Barat – Mahakam Ulu		Merupakan ruas jalan penghubung antar Kabupaten.	
12	Jalan Tembus Irigasi Rapak Poros Kubar	Kutai Barat		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
13	Semenisasi Dalam Kampung – Kampung	KUBAR, KUKAR, MAHULU		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
14	Jalan Tembus Kampung – Kampung menuju Jalan Poros	KUBAR		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
15	Infrastruktur (Perbaikan Jalan, Jembatan dan Normalisasi Drainase) Kota Samarinda	Samarinda		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
16	Infrastruktur (Perbaikan Jalan, Jembatan dan Normalisasi Drainase) Kota Balikpapan	Balikpapan		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
17	Normalisasi drainase	BONTANG, KUTIM, BALIKPAPAN		Bantuan Keuangan Provinsi	
18	Bendungan Marangkayu belum dapat difungsikan akibat adanya beberapa kendala	KUKAR		Merupakan proyek yang diprioritaskan untuk segera	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				dituntaskan pembangunannya.	
19	Bendungan Wain harus segera dituntaskan mengingat keberadaannya sangat penting untuk menyuplai air baku di KIK	BALIKPAPAN		Tahun 2019 akan dilaksanakan pengadaan lahan	
20	Agar dibangun infrastruktur pengairan untuk mendukung usaha ekonomi petani & nelayan			Kegiatan irigasi merupakan prioritas RKPD 2019, lokus tahun 2019 diprioritaskan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi	
III. FRAKSI GERINDRA					
	Bidang Pertanian dan Perikanan				
	-				
	Bidang Kelautan dan Perikanan				
	-				
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
1	Bidang Lingkungan Hidup				
a	Seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim menjalankan praktek pengolahan tambang yang baik. Praktek pengolahan tambang yang baik adalah memberikan manfaat maksimal bagi sekitar dan daerah. Disamping itu juga mampu menekan sekecil-kecilnya resiko dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Tidak boleh ada lagi perusahaan tambang yang mencemari sungai dan merusak sistem konservasi tanah dan air, apalagi sampai meninggalkan lubang-lubang tambang tanpa direklamasi.	DLH		(DLH) Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Rp.295.000.000,-	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap perusahaan/swasta dengan cara melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi serta penegakan hukum
		ESDM		(ESDM) Program Rehabilitasi/Reklamasi Lahan Pasca Tambang Rp.571.000.000,-	Dengan melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi tambang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
b	Perusahaan tambang juga harus memastikan tidak mencemari udara daerah sekitar dengan debu atau polusinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang terarah atas operasi perusahaan tambang secara terbuka dan independen. Harus ada peningkatan jumlah dan kualitas inspektur tambang dan pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup.	DLH		(DLH) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Rp.1.210.000.000,00-	(DLH) Pegawai Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melakukan fungsi pengawasan lingkungan (proper) ke semua perusahaan tambang di Kaltim terutama pada ijin PKP2B dan IUP
		ESDM			(ESDM) Untuk Inspektur Tambang Koordinasinya langsung dibawah kemenESDM
c	Penanganan pencemaran akibat kegiatan penambangan batubara, sebaiknya tidak hanya terfokus di areal kerja dan lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga di daerah hilirnya juga perlu perhatian yang	ESDM			(ESDM) pengawasan oleh ESDM terkait pengangkutan batu bara melalui angkutan sungai hanya sampai di



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKP DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	serius, seperti di muara sungai dan laut lepas tempat dimana ponton pengangkut batubara memindahkan muatannya ke kapal pengangkut. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran laut akibat jatuhnya batubara ke laut pada saat proses pemuatan dan limbah/kotoran hasil dari pencucian ponton yang tidak terawasi. Dampak lain akibat tercemarnya laut antara lain berkurangnya hasil tangkapan nelayan, rusaknya terumbu karang dan sedimentasi batubara di laut.	DLH		(DLH) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Rp.1.805.100.000,00	Jetty/pelabuhan (Port Site) Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi Pemantauan Lingkungan Air Sungai , Air Laut, Udara dan Tanah Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
d	Pro aktif mempromosikan model pengelolaan hutan lestari termasuk praktek pembalakan dengan dampak rendah. Skema-skema termasuk praktek pembalakan dengan dampak rendah. Skema-skema dana karbon perlu digali lebih jauh dan kita dapatkan untuk membangun hutan kita agar lebih baik dan mensejahterakan masyarakat. Industri kehutanan harus direvitalisasi menjadi industri yang menguntungkan dan memberikan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang bagi masyarakat Kaltim. Model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang lestari dan terintegrasi dengan industri kehutanan seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan harus secara serius dikembangkan agar ekonomi pedesaan di Kaltim dapat bangkit seiring dengan bangkitnya ekonomi di wilayah perkotaan.	DISHUT		(DISHUT) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Rp.4.000.010.000,00 (Dishut) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial Rp.2.560.320.000,00	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, diantaranya PT. Gunung Gajah Abadi dan PT. Utama Damai Indah Timber yang telah melakukan model pengelolaan hutan lestari untuk RIL C di Kalimantan Timur Program Perhutanan Sosial dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat di Kaltim sampai dengan saat ini Hutan Desa 17 ijin, Hutan Kemasyarakatan 2 ijin, Hutan Tanaman Rakyat 8 ijin, Hutan Adat 1 ijin dan Kemitraan 5 ijin
Bidang Infrastruktur					
1	Progress fisik dan keuangan pembangunan Jembatan Mahakam IV-Bentang tengahnya masih jauh dari target fisik, yakni minus 15,59 persen.	Samarinda		Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
2	Progres fisik dan keuangan jalan pendekat Jembatan Mahakam IV sisi Samarinda Seberang. Target rencana 35,61 persen, realisasi hanya 29,64 persen. Artinya ada deviasi minus 5,97 persen per 21 Juli 2017.	Samarinda		Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
3	Progres fisik dan keuangan jalan pendekat Jembatan Mahakam IV sisi Samarinda Kota, dari target rencana 23,83 persen, realisasinya mencapai 44,62 persen. Ada deviasi plus 20,78	Samarinda		Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	persen. Namun, masih diperlukan pendalaman permasalahan lain yang masih belum tergalai.				
4	Perlunya perhatian khusus untuk segmen 5 pembangunan jalan tol.	Balikpapan		Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
5	Rekomendasi dalam pansus meminta RPJMD diubah, khususnya terkait dengan target penyelesaian proyek-proyek MYC dan hal ini berdampak terhadap besaran porsi anggaran untuk issue sektoral yang lain.			-	
6	Temuan masalah proyek MYC lain lagi, Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring- Penyelesaian dan rencana operasionalisasinya sudah beberapa kali tertunda.	Samarinda		-	
7	Pansus LKPJ menemukan masalah terbaru- bahwa progress fisik pembangunan BSB kembali terkendala akibat penurunan <i>runway</i> pada posisi STA 2.100 yang menyebabkan rencana target 85,12 persen hanya bisa dicapai 82,16 persen.	Samarinda		-	
8	Pelayanan infrastruktur yang terbatas terkait dengan persoalan akses dasar publik yaitu pembangunan sarana jalan yang lebih layak (re-design) dan memadai, pembangunan Bandara dan Pelabuhan, bendungan-bendungan, persoalan listrik serta mendorong lebih produktif usaha ekonomi petani dan nelayan, serta pembangunan sarana akses dasar yang dibutuhkan rakyat Kaltim lainnya.			Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas RKPD tahun 2019.	
9	Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara telah menelan sebesar Rp 175,532 Miliar dan dari APBN sebesar Rp 87,356 Miliar. Total keseluruhan anggaran untuk membangun bendungan ini sebesar Rp 262,892 Miliar.	KUKAR		Bendungan Marangkayu merupakan proyek strategis yang diprioritaskan untuk segera dituntaskan pembangunannya.	
10	Pembangunan Bendungan Telake dan Lambakan di PPU dan Paser untuk mendukung program swasembada pangan dengan investasi sebesar Rp 4 Triliun untuk Lambakan dan Rp 1,7 Triliun untuk Telake.	PPU dan PASER		Telah diusulkan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional dan akan didanai melalui APBN/PHLN.	
11	Pembangunan Bendungan Sungai Wain di Balikpapan yang mangkrak karena selama 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan kucuran dana APBD Kaltim. Pembangunan bendungan merupakan skala prioritas yang harus segera diselesaikan. Karena tujuan utama bendungan nantinya adalah sebagai tempat menampung air untuk menyuplai kebutuhan air baku di	BALIKPAPAN		Pada RKPD tahun 2019 telah diprogramkan pengadaan lahan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kota Balikpapan				
IV. FRAKSI DEMOKRAT					
Bidang Pertanian					
1	Sosialisasi Penguatan kelembagaan petani Untuk Peningkatan Mutu dan kemanana Pangan Segar(KUKAR)	KUKAR		Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar (600.000.000) Pengawasan Mutu Pangan Segar (400.000.000,00) (Berau, Smd)	
2	Pembinaan Kemanana Pangan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengendalaian hama Penyakit Tanaman (KUKAR)	KUKAR		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (270.000.000,00) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (270.000.000,00) (Smd)	
3	Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan (KUKAR)	KUKAR		Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar (600.000.000) Pengawasan Mutu Pangan Segar (400.000.000,00) (Berau, Smd)	
4	Pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari (KUKAR)	KUKAR		Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (500.000.000,00) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (150.250.000,00) (Berau)	
5	Gerakan Sosialisasi konsumsi Makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) (KUKAR)	KUKAR		Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar (600.000.000,00) Pengembangan Pangan Organik (200.000.000,00) (Lempake , Smd)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
6	Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (KUKAR)	KUKAR		APBN	
7	Pemantauan harga dan Pasokan Pangan (KUKAR)	KUKAR		25. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 25.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 25.07. Pengembangan sistem informasi pasar	
8	Pembangunan Lantai Jemur Untuk Lumbung Pangan Masyarakat (KUKAR)	KUKAR		BANKEU	
9	Pembinaan Kelembagaan dan Pengelolaan Lumbung Pangan masyarakat (KUKAR)	KUKAR		APBN dan DAK	
10	Bantuan Pengisian gabah pada Lumbung Pangan masyarakat (KUKAR)	KUKAR		APBN	
11	Kawasan Mandiri Pangan (KUKAR)	KUKAR		APBN	
12	Pengembangan Pangan lokal (KUKAR)	KUKAR		APBN Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (500.000.000,00) Pengembangan Pangan Lokal (254.750.000,00) -> Smd	
13	Penganganan Daerah Rawan Pangan (KUKAR)	KUKAR		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (1.476.650.000,00) Penanganan daerah rawan pangan (129.750.000,00) -> Smd	
Bidang Kelautan dan Perikanan					
-					
Bidang Indagkop & UMKM					
1	Paradigma Baru Pemasaran Produk UKM			* Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif * Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Motivasi Kewirausahaan, Gebyar Kewirausahaan, Bimtek Kewirausahaan) [750.000.000]	
2	Pengembangan Pasar UMKM			* Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				Menengah yang Kondusif * Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	
3	Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM			[750.000.000]	
4	Penyederhaan/mempermudah pengurusan perijinan usaha UMKM			* Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM	
5	Program Bantuan Subsidi atau Penguatan Permodalan UMKM			* Kegiatan Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah [750,000,000]	
6	Peningkatan Akses Permodalan			(Sosialisasi Kebijakan UKM, Bimtek Manajemen Usaha, Pendampingan Pengembangan UKM, Temu Mitra Usaha)	
7	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM				
8	Peningkatan Kualitas Teknologi Usaha UMKM			* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (800,000,000): *1)Kegiatan Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM [524,220,000] dan *2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM [275,780,000] (Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan dan Mebel Rotan, Pelatihan Desain Kemasan Produk, Pelatihan Kerajinan Kayu, Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk UKM, Pelatihan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				Pengolahan Produk Makanan Bagi UKM)	
9	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM			* Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM * Kegiatan Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah [750.000.000]	
10	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kukar		* Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan * Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan [602,500,000]	
11	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Kukar		Diajukan dalam Bantuan Keuangan Provinsi TA 2019 "Pembangunan Gudang (Sistem Resi Gudang) 1 unit di Samboja, Kukar(3,000,000,00 0)"	
Bidang Pariwisata					
-					
Bidang Infrastruktur					
1	Pengembangan pengelolaan ketersediaan air baku untuk keperluan air bersih dan pertanian. Penyediaan air bersih yang mengambil air bawah tanah dengan cara membangun sumur bor untuk daerah yang jauh dari sumber mata air permukaan/sungai seperti di Desa Putang Kecamatan Long Kali, Kayungo Sari, Kecamatan Long Ikis, Rangan Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Api-Api	PASER, BONTANG		Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	
2	Perlunya anggaran untuk pemeliharaan jalan-jalan, pembangunan dan pemeliharaan dermaga/pelabuhan rakyat, pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum bus antar kabupaten/kota, pembuatan marka jalan dan parit samping kiri dan kanan, rambu lalu-lintas, lampu persimpangan lalulintas.			Diarahkan pada pemeliharaan jalan dan jembatan melalui UPTD PUPR.	
3	Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pembangunan infratraktur yang perlu			Diarahkan pada program	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	ditingkatkan yaitu: pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan bandara, serta infrastruktur penunjang lainnya			pembangunan jalan dan jembatan.	
4	Pembangunan infrastruktur fokus pada peningkatan jalan yang menghubungkan daerah – daerah terisolasi dari pembangunan (daerah-daerah perbatasan) dan program-program berjalan untuk segera diselesaikan.			Diarahkan pada program pembangunan jalan dan jembatan.	
5	Bidang Perhubungan Udara, Melakukan Percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru, Pembangunan Bandara di Kabupaten Paser, peningkatan bandara-bandara di Kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur dengan memprioritaskan “panjang dan daya dukung run-way” serta kelengkapan navigasi penerbangan, dan memastikan bahwa bandara-bandara tersebut dapat beroperasi.			Menjadi program/kegiatan prioritas Kemenhub tahun 2019.	
6	Bidang Perhubungan Darat, memprioritaskan a. Pembangunan jalan provinsi agar menjadi prioritas utama; b. Perencanaan, pembangunan serta pengawasan sarana dan prasarana pengelolaan Jembatan Timbang; c. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan serta pengawasan sarana dan prasarana Rambu Lalulintas Jalan Raya, tanda alur jalan dan fasilitas pengaman tepi jalan;			Diarahkan pada program pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan terminal, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas.	
7	Bidang transportasi, pemerintah provinsi diminta mencegah kerusakan jalan dengan membangun dan mengoperasikan pos-pos pemantau serta jembatan timbang untuk memantau kendaraan barang yang melintas jalan negara/provinsi.			Program diarahkan pada pengendalian lalu lintas dan lebih mengintensifkan kegiatan forum lalu lintas.	
8	Bidang perumahan, melakukan pengembangan perumahan dan sanitasi melalui: a. Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi b. Kegiatan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu c. Kegiatan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat, Layak Huni dan Murah			Diarahkan pada kegiatan APBN (Kemenpupera) dan melalui Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBD Provinsi). Program/kegiatan pada RKPD tahun 2019 difokuskan pada kawasan kumuh.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
9	Peningkatan Jalan Biawan (dekat Lapangan Bola) Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	182,045,610	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
10	Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 menuju Gg. Belayan Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	236,810,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
11	Peningkatan Jalan Pahlawan Gg. Singgasana Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	253,151,490	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
12	Perbaikan Parit & Gorong-gorong Perum Korpri Jl. Pesut RT. 15 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	252,730,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
13	Lanjutan Semenisasi Jalan Mangkuraja 10 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	236,810,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
14	Peningkatan Jalan Mangkuraja Gg. Citra Baru RT. 65 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	272,629,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
15	Pembuatan Parit RT 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	455,129,500	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
16	Peninggian dan Semenisasi Gg. 1 Menuju Pemakaman samping PDAM dan Gorong-gorong Kelurahan Sukaramae Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	376,630,100	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
17	Peningkatan Jalan APT. Baya-Baya RT 01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang	Kutai Kartanegara	238,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
18	Peningkatan Jalan Agus Salim RT 20 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang	Kutai Kartanegara	238,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
19	Peningkatan Jalan RT 08 Desa Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Seberang	Kutai Kartanegara	238,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
20	Peningkatan Jalan Jelawat Gg. Limas RT. 4 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
21	Peningkatan Jalan Wolter Monginsidi II dan Pembuatan 2 Buah gorong-gorong RT. 32 Km. 5 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
22	Peningkatan Badan Jalan Gang Darussalam 4 RT. 65 Jalan Mangkuraja Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
23	Peningkatan Jalan Awang Habul RT. 42 Jalan Gunung Triyu Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
24	Pembuatan Parit Utama Gang Langgar RT. 10 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
25	Pembuatan Parit Jalan Melak Barat RT. 10 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
26	Peningkatan Jalan Gang Etam RT. 10 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
27	Peningkatan Jalan Abdul Majid RT. 12 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
28	Peningkatan Jalan Gerbang Dayaku RT. 01 Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
29	Peningkatan Jalan Gerbang Dayaku RT. 02 Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
30	Penurapan Jalan Long Bagun RT. 11 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
31	Penurapan Jalan Long Bagun RT. 12 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
32	Pengurukan Jalan Sangkulirang Gg. 10 RT. 1 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
33	Pengurukan Jalan Mangkuraja Gg. Bentian Blok A dan Blok B RT. 68 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
34	Peningkatan Jalan & Jembatan Jl. Mangkuraja Gg. Silaturahmi Blok C RT. 23 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
35	Peningkatan Jalan Triyu 3 Pangala RT. 72 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
36	Peningkatan Badan Jalan Gunung Belah Gg. Alza RT. 55 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
37	Peningkatan Jalan Penyinggahan Gg. Fatimah RT. 71 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
38	Peningkatan Jalan Senopati Gg. Poplot RT. 74 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
39	Peningkatan Jalan Mangga 2 RT. 10 Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
40	Peningkatan Badan Jalan Gunung Penetak Gg. Petani 2 Blok. A RT. 16 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
41	Peningkatan Jalan Gg. Barokah Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu RT. 34 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
42	Peningkatan Badan Jalan Stadion Gg. Permai RT. 37 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
43	Peningkatan Jalan Akhmad Muksin Gg. 9 RT. 3 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
44	Peningkatan Jalan Sarifudin 3 Tambak Rel Kelurahan Baru Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
45	Peningkatan Jalan Triyu 2 Gg. Penggilingan RT. 63 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
46	Peningkatan Jalan Etam Gg. Indah RT. 8 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	150,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
47	Peningkatan Jalan Awang Long Senopati Gg. 2 RT. 03 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
48	Peningkatan Jalan MJ. Panjaitan Gg. Ikhlas RT. 8 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
49	Peningkatan Jalan Arjuna RT. 13 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
50	Peningkatan Jalan Bogenvile Gang 7 RT. 08 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
51	Pembuatan Badan Jalan Mangkuraja 10 RT. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
52	Peningkatan Jalan Pahlawan Gg. Luther RT. 12 Sido Rukun Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	150,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
53	Peningkatan Jalan Ikip Mekar Sari Gg. Ikip I Tembus Gg. 3 RT. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
54	Peningkatan Jalan Gunung Menyapa Gg. Dika RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
55	Peningkatan Jalan Pesut Gg. Bangunan RT. 19 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	50,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
56	Peningkatan Drainase Jalan Gunung Menyapa Gg. Kenohan 2 RT. 33 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	200,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
57	Peningkatan Drainase Jalan Durian RT. 22 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong	Kutai Kartanegara	100,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
58	Pembangunan Drainase di Perum Korpri Sempaja Lestari Indah	Samarinda	1,500,000,000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	

V. FRAKSI PKB

Bidang Pertanian					
1	Pembuatan Jalur Irigasi Ds. Sebakung. Kec. Longkali	Paser		APBN (440 Ha)	
2	Pembuatan Jalur Irigasi Desa Petiku, Kec. Longkali	Paser		APBN (440 Ha)	
3	Pembuatan Jalur Irigasi Sebakung (Dusun Seburung) Kec Longkali	Paser		APBN (440 Ha)	
4	Normalisasi Saluran irigasi Ds. SuliliranKec. Paser Blengkong	Paser		APBN (440 Ha)	
5	Pembangunan Saluran Irigasi Ds. Keresik Bura Kec. Paser Blenglong	Paser		APBN (440 Ha)	
6	Pembangunan Saluran Irigasi Ds. Muara Talake , Kec. Long Kali	Paser		APBN (440 Ha)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
7	Normalisasi Saluran irigasi pertanian Pertanian Desa padang Panagrapat, Kec. Tanah Grogot	Paser		APBN (440 Ha)	
8	Normalisasi Saluran Primer& Sekunder Desa Rantau Panjang , Kec. Tanah Grogot	Paser		APBN (440 Ha)	
9	Normalisasi Saluran irigasi Pertanian Desa Jone Kec. Tanah Grogot	Paser		APBN (440 Ha)	
10	Peningkatan kapasitas dan Produktifitas Irigasi Sawah Desa Suliliran baru Kec. Paser Belengkong (Pembuatan Saluran Primer dan Perbaikan saluran Sekunder)	Paser		PU	
11	Normalisasi Drainase dan Saluran Parit Induk Desa Senaken RT.12, 13.15	Paser		PU	
Bidang Kelautan dan Perikanan					
-					
Bidang Pariwisata					
-					
Bidang Infrastruktur					
1	Peningkatan Jalan Provinsi Kerang Tanjung Aru Kecamatan Batu Engau Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)	Paser	5.000.000.000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
2	Semenisasi gang di Jalan Rajawali kecamatan Sungai Pinang Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)	Samarinda	1.000.000.000	Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
VI. FRAKSI PAN					
Bidang Pertanian					
1	Pembuatan Kandang ayam kampung Kelompok tani Keluarga Bersatu, Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur	KUTIM		BANKEU	
2	Pembuatan Naskah Akademik RAPERBUP tarif sewa ALSINTANAK Dinas Pertanian, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	
3	Penyusunan Standard Oprational Procedure (SOP) ALSINTANAK Dinas Pertanian, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	
4	Kegiatan Bimbingan Teknik (BIMTEK ALSIN) penerima Handtractor di 7 kecamatan kelompok tani/gabungan kelompok tani.	KUTIM		BANKEU	
5	Bimbingan Teknis (BIMTEK ALSIN) penerima penggilingan padi 2 fase dan 1 fase kelompok tani/golongan kelompok tani, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	
6	Bimbingan Teknis (BIMTEK ALSIN) penerima Rice Transplater kelompok tani/golongan kelompok tani penerima, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	
7	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 6 kecamatan, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		APBN (500 Ha)	
8	Bimbingan Teknis (BIMTEK ALSIN) penerima Combine Harvester kelompok tani/golongan kelompok tani penerima, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
9	Magang Tim Brigade ALSIN, Kab. Kutai Timur.	KUTIM		BANKEU	
10	Pembuatan kandang ayam khusus DOC Kelompok tani Keluarga Bersatu, Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kutim.	KUTIM		BANKEU	
11	Pembuatan kandang ayam Ras Kelompok tani Keluarga Bersatu, Desa Sepaso Barat, Kec. Begalon, Kutim.	KUTIM		BANKEU	
12	Pengadaan perlengkapan kandang ayam (tempat pakan, minum dll) Kelompok tani Keluarga Bersatu, Desa Sepaso Barat, Kec. Kutim.	KUTIM		BANKEU	
13	Pembuatan kandang ayam kampung, kelompok Amanar Retorika, Desa Sebuntai, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara.	KUTIM		BANKEU	
14	Pengadaan kerbau Kelompok Cahaya Baru, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara.	KUTIM		BANKEU	
15	Bantuan bibit sawit kelompok tani Maju Bersama, Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Kab. Kukar.	KUKAR		72 Program Perluasan Kebun Sawit (964.250.000,00) (72.1) - Ekstensifikasi perkebunan sawit (964.250.000,00) (Karag Anyar)	
Bidang Kelautan dan Perikanan					
16	Bantuan perahu ketinting Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tepian Batu Sejahtera, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
17	Bantuan peti es (coolbox) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kuta Lama Mandiri, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
18	Bantuan perahu ketinting Kelompok Usaha Bersama (KUB) Anggana Mandiri, Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
19	Bantuan peti es (coolbox) Gapokkan Delta Pantuan Abadi, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
20	Bantuan mesin kapal kepada KUB Semoga Jaya, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
21	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Kampung Baru, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
22	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Surya Abadi, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
23	Bantuan peti es (coolbox) KUB Pantuan Jaya, desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				(21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
24	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Sumber Sejahtera, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
25	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Sipurennu, Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
26	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Tambak Jaya, Desa Sepatin, Kec. Anggan, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
27	bantuan peti es (coolbox) dan Rakkang Pokdakan maju Makmur, Desa sepatin, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
28	Bantuan pembangunan tempat penjemuran ikan, Desa Sepatin, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		BANKEU	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
29	Bantuan peti es (coolbox) Pokdakan Bina Karya, Desa Tani Baru, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
30	Bantuan peti es 9coolbox) Pokdakan Sinar Tani, Desa Tani Baru, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21)Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
31	Bantuan tiang bagan (Nibung) KUB Putra Laut, Jl. Balikpapan Handil II Rt. 18 Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		BANKEU	
32	Bantuan tiang bagan (Nibung) KUB Putra Bagan, Jl. Balikpapan Handil II Rt. 18 Kel. Kuala Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		BANKEU	
33	Bantuan mesin kapal KUB Putra Pesisir Mandiri, Jl. Tahir Rt. 02, Kel. Muara Jawa, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
34	Bantuan mesin kapal KUB Putra Pesisir Mandiri, Jl. Tahir Rt. 02, Kel. Muara Jawa, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
35	Bantuan benur (bibit udang windu) Pokdakan Makmur Sungai Rambe, Pulau	KUKAR		29 Program Peningkatan Penyediaan Benih	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	Kerbau, Kel. Muara Kembang, Kec. Muara Jawa, kab. Kutai Kartanegara.			Ikan dan Udang Unggulan (10.986.425.000,00) 29.2 - Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang (7.762.925.000,00) - > Lokasi : Kel. Melayu, Kec. Tenggaring - KUKAR	
36	Bantuan benur (bibit udang windu) Pokdakan Elang Pesisir, Pulau Pagar Batu, Kel. Muara Kembang, Kec. Muara Jawa, kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		29 Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (10.986.425.000,00) 29.2 - Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang (7.762.925.000,00) - > Lokasi : Kel. Melayu, Kec. Tenggaring - KUKAR	
37	Bantuan mesin kapal KUB Nurul Iman, Jl. Tahu, Rt. 08., Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
38	Bantuan jaring udang (trammel net) KUB Bunga Karang Mahakam, Jl. Tahir Rt.02, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
39	Bantuan keranjang ikan (baket) Poklahsar Pusaka Jaya Indah Abadi, JL. Tahir Rt. 04, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				(21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
40	Bantuan benur (bibit udang windu) Pokdakan Karya Bersama Pagar Batu, Kel. Muara Kembang, Kec. Muara Jawa, kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (10.986.425.000,00) Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang (7.762.925.000,00) (Melayu, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara) <i>Ds. Melayu, Kec Tenggarong, Kab. Kukar</i>	
41	Bantuan alat pengolahan amplang Poklhasar Karya Laut Pesisir, Jl. Tahir Rt.03, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		BANKEU	
42	bantuan alat pengolahan amplang Poklhasar Mitra Mandiri, Jl. Tahir Rt.03, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.	KUKAR		BANKEU	
43	Bantuan pengadaan kapal dan mesin KUB Kakap Merah, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
44	Bantuan pengadaan kapal dan mesin KUB Harapan Mutiara, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
				MELAYU, KEC. TENGGARONG	
45	Bantuan pengadaan kapal dan mesin KUB Gerbang Samudra, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
46	Bantuan pengadaan kapal dan mesin KUB Mega Harapan, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
47	Bantuan pengadaan kapal dan mesin KUB Pada Idi, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai kartanegara.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
48	Bantuan pengadaan Speedboat Penyuluh perikanan wilayah kerja pesisir dan delta Mahakam, Kec. Anggana, Kukar.	KUKAR		(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000,00) (21.08) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000,00) - > LOKUS = DS. MELAYU, KEC. TENGGARONG	
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
	Bidang Infrastruktur				
1	Peningkatan Jalan Danau Tempe 1 RT.04 Desa Bumi Rapak, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur.	Kutai Timur		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
2	Peningkatan Jalan Danau Batur 1 RT.09 Desa Bumi Rapak, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur.	Kutai Timur		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
3	Pembuatan jembatan Beton Jalan Pramoni Rt.02 Desa Ponoragan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.	Kutai Kertanegara		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
4	Peningkatan jalan dan drainase Jl. Damanhuri Gang Muslimin Rt.28 Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
5	Peningkatan Jalan Kl. Hajar Dewantara 1 Rt.27 Kel Gunung Kelua, Kec. Samarinda ulu sepanjang 200m lebar 4 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
6	Peningkatan jalan di Jl. Raya berambai Batu Indah Kel. Sempaja Utara. Panjang 300m lebar 6m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
7	Peningkatan jalan di jl. Giri Mulyo Rt.15 dan Rt.16			Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
8	Peningkatan Jl. Sidomukti RT. 41 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
9	Peningkatan jalan dan drainase Jl. Padat Karya (Pinang Seribu) Gg. Muhabbah RT. 40 Kelurahan Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Panjang 50 m Lebar 2,5 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
10	Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Provinsi Gang Lestari RT. 4 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
11	Peningkatan Jl. Damai RT.27 Kelurahan Sidodamai Kec. Samarinda Ilir.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
12	Peningkatan Jl. Gunung Sari Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Panjang 1.187 m dan Lebar 5 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
13	Peningkatan Jl. Sulawesi Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Panjang 611 m dan Lebar 5 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
14	Peningkatan Jl. Pusban Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Panjang 471 m dan Lebar 5 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
15	Peningkatan Jl. Kasturi Gang Malvinas Kelurahan Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Samarinda Panjang 70 m Lebar 2 m.	Samarinda		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
16	Peningkatan jalan Kerang – Ipil – Random – Tanjung Aru sepanjang 99 km, kab. Paser	Paser		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
17	Peningkatan jalan Simpang Pait Menuju Telake, Kab. Paser	Paser		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
18	Peningkatan badan Jalan Desa Pondong, Kab. Paser.	Paser		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
19	Peningkatan Jalan Muara Samu, Kab. Paser.	Paser		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
20	Peningkatan Jalan Long Pinang, Kab. Paser.	Paser		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
21	Peningkatan drainase tersebar se-Kota Samarinda	SAMARINDA		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
VII. FRAKSI HANURA					
	Bidang Pertanian				
1	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili, menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Samarinda	SAMARINDA		BANKEU	
2	Pembangunan Pelabuhan Ikan terintegrasi dengan objek Wisata Alam Pantai Jingga	KUKAR		BANKEU	
3	Swasaembada Beras melalui pencetakan sawah baru	KUKAR (Kec. Anggana)		APBN (140 Ha)	
	-				
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
	Bidang Infrastruktur				
1	Pembangunan Pelabuhan Kargo di Kawasan Industri Terpadu Maloy, Kutai Timur:	Kutai Kertanegara		Telah diusulkan ke Pemerintah Pusat.	
2	Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kota Balikpapan; Fly over di Simpang Rapak dan Under-pass di KM 5 Simpang Hotel Platinum-Kariangau	Balikpapan		Telah diusulkan ke Pemerintah Pusat.	
3	Perbaikan jalan dan drainase lingkungan dan pemukiman di Kota Balikpapan	Balikpapan		Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
4	Revitalisasi Bendungan Benanga	SAMARINDA		Tahun 2018 sudah mulai dilakukan pengerukan sedimen dan dilanjutkan pada tahun 2019 oleh Kemenpupera.	
5	Revitalisasi Folder Air Hitam	SAMARINDA		Bantuan Keuangan Provinsi.	
6	Perbaikan jalan dan drainase lingkungan dan pemukiman	BALIKPAPAN (tersebar)		Bantuan Keuangan Provinsi.	
VIII. FRAKSI PKS					
	Bidang Pertanian				
1	Anggaran untuk bidang pertanian arti luas sebesar 10% tetap dianggarkan pada APBD 2019, dan program-program yang berpihak kepada petani dan nelayan oleh SKPD terkait			Anggaran Sektor Pertanian Artif Luas 6 % dari BL APBD 2019	
2	Anggaran untuk program-program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan petani dan nelayan, seperti seminar, lokakarya dan sejenisnya harus dikurangi			Akan dicermati kembali	
3	Anggaran diarahkan untuk pencetakan lahan pertanian baru dan perbaikan			APBN, DAK	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	infrastruktur pertanian, khususnya jalan-jalan tani yang penting peranannya sebagai akses penjualan hasil produksi ke pasar			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000,00)	
4	mendesak Provinsi agar serius melindungi lahan-lahan pertanian berkelanjutan yang terus menyusut akibat dikonversi menjadi areal pertambangan dan perkebunan kelapa sawit			Pemerintah Prov Kaltim telah membuat Perda PLP2B, namun belum di lanjutkan/diturunkan ke tingkat Kab/Kota	
5	Mendesak Pemprov segera menegakkan aturan pada Perda tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah disahkan DPRPD Kaltim			Pemerintah Prov Kaltim telah membuat Perda PLP2B, namun belum di lanjutkan/diturunkan ke tingkat Kab/Kota	
	Bidang Indagkop & UMKM				
	-				
	Bidang Pariwisata				
	-				
	Bidang Infrastruktur				
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy	Kutai Timur		Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
2	Pemprov Kaltim diminta memberikan penjelasan sejauh mana kemajuan dan kepastian dari proyek-proyek pola kontrak tahun jamak dapat diselesaikan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir tahun 2018.			Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
3	Perlu adanya evaluasi total dan audit investigasi untuk seluruh proyek infrastruktur berpola kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) yang harus selesai pada akhir tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar proyek-proyek MYC ini tidak menjadi persoalan dan berpotensi mengganggu program/kegiatan infrastruktur pada APBD 2019 dan setelahnya.			Pengalokasian anggaran sesuai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi.	
4	Penanganan ruas-ruas jalan Trans Kalimantan dan jalan provinsi harus mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi pada APBD 2019.			Telah diusulkan dan dibahas pada Musrenbangnas.	
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy	KUTIM	#####	MYC, target selesai tahun 2018	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
6	Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat	KUTIM	156,380,000.00 0.00	MYC APBD Kaltim, target tuntas tahun 2018	
IX. FRAKSI PPP - NASDEM					
Bidang Pertanian					
1	Subsidi sarana produksi atau insentive produksi bagi petani yang berhasil			APBN Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (8.387.980.000,00) Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan (8.000.000.000,00)	
2	Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur pertanian di perdesaan karena memang perdesaaan ada lahan potensial untuk tanaman pangan			APBN Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (8.387.980.000,00) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00)	
3	Pembinaan lebih intensif pada Desa Mandiri Pangan			APBN	
4	Pemberdayaan Lembaga-lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan peningkatan pangan seperti Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang tergabung dalam Gapoktan			Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (500.000.000,00) Analisis Pola Pangan Harapan (95.000.000,00) Pengembangan Pangan Lokal (254.750.000,00)	
5	Perlu ada perlindungan lahan pangan non-padi			Pemerintah Prov Kaltim telah membuat Perda PLP2B, namun belum di lanjutkan/diturunkan ke tingkat Kab/Kota	
6	Perlindungan lahan pertanian, dari pencemaran/polusi terhadap air dan tanah				
7	Untuk memperkuat bidang pertanian sehingga menjadi andalan ekonomi bagi Provinsi Kaltim Jangka Panjang maka harus dialokasikan anggaran pada bidang pertanian minimal 5% dari APBD, diperuntukkan antara lain : (1) Membangun jalan usaha tani; (2) Mencetak sawah baru serta membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi; (3)			(1) DAK , (2) APBN, (3) APBN (4) APBN APBD Program pemberdayaan penyuluh pertanian	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	menyediakan subsidi pupuk dan alat pertanian serta insentif bagi petani berprestasi; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas Penyuluh Pertanian; (5) Meningkatkan keterampilan petani			lapangan (500.000.000,00) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian (205.800.000,00) Pengembangan SDM Penyuluh (294.200.000,00) APBN APBD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (4.250.000.000,00) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (4.250.000.000,00)	
8	Bantuan atau subsidi sarana produksi bagi petani di pedesaan			APBN Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (8.387.980.000,00) Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan (8.000.000.000,00) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (464.600.000,00) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna (464.600.000,00)	
9	Dukungan teknologi maju bagi petani ladang			APBN Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (8.387.980.000,00) Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan (8.000.000.000,00)	
10	Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk membuat Perda sebagai tindak lanjut tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui kajian dan			Masih akan terus mengkoordinasikan oleh PD terkait ke tingkat Kab/Kota	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	penelitian secara komprehensif dan memperjelas koordinat lahan di tingkat kabupaten agar tidak lagi terjadi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian				
11	Menbuat mekanisme pengawasan terhadap Program Kemitraan antara PBS dengan masyarakat			Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan (262.600.000,00) Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan (262.600.000,00)	
12	Melakukan Kajian terhadap perusahaan kelapa sawit apakah sudah beroperasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, misal AMDAL atau kaidah lingkungan lainnya, termasuk pelaksanaan kajian tentang Nilai Konservasi Tinggi (NKT)			Program konservasi lahan dan air (250.000.000) Perlindungan lahan perkebunan (100.000.000)	
Bidang Kelautan dan Perikanan					
13	Perlu upaya-upaya serius dan terarah dalam pengembangan potensi perikanan dan kelautan			Pemerintah Prov. Kaltim akan terus menggali dan mengembangkan potensi perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya melalui Program pengembangan perikanan tangkap dan Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	
14	Kalimantan Timur mempunyai potensi sumberdaya alam laut dan pesisir yang melimpah ruah sehingga masih perlu digali dan dimanfaatkan secara maksimal				
15	Perlu pengawasan dan perlindungan sektor kelautan dan perikanan illegal secara memadai			Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (650.000.000,00) Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (100.000.000,00)	
16	Kalimantan Timur perlu membuat skenario pemanfaatan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) di masa mendatang			Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (650.000.000,00) Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan (300.000.000,00)	
17	Dalam bidang kelautan dan perikanan laut, Pemprov harus meningkatkan anggaran untuk program kelautan, yang selama ini masih jauh dari harapan .			Pemerintah Prov kaltim tetap akan berusaha meningkatkan	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	Dimana potensi bidang kelautan yang memiliki potensi besar belum tergarap secara optimal dan maksimal			pembiayaan di sektor Perikanan dan disesuaikan dengan kapasitas pembiayaan tercatat pada 2018 Rp. 9.317.485.000 dan pada 2019 sebesar Rp. 29.960.850.000,00 atau meningkat 221%	
18	Bantuan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan			Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (1.250.000.000,00) Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 500.000.000,00	
				Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan (3.900.000.000)	
				Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (10.986.425.000) Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang (7.762.925.000)	
19	Pembangunan pelabuhan perikanan			BANKEU	
20	Penyediaan bibit ikan untuk perikanan darat seperti udang windu, lele, nila ikan mas, patin, dsb yang menjadi kebutuhan mendesak untuk dipenuhi di daerah sendiri. Oleh karena itu teknologi perikanan pembenihan di tingkatkan serta memperbanyak pendidikan dan pelatihan pembenihan			(25) Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (1.250.000.000) (25.1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (500.000.000)	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
21	Pemberdayaan masyarakat nelayan baik untuk perikanan darat maupun kelautan			(21) Program pengembangan perikanan tangkap (4.450.000.000) (25) Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (1.250.000.000)	
22	Melakukan sinergi baik secara kualitas maupun kuantitas			Pemerintah akan terus berupaya dan berinovasi dalam pengembangan potensi perikanan dan kelautan Kaltim dengan melibatkan berbagai multi stakeholder	
23	bekerjasama dengan sektor lain untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan daratan yang berhubungan langsung dengan usaha perikanan lainnya			(26) Program Pengelolaan Ruang Laut (2.275.000.000) (26.02) Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan (150.000.000) (26.03) Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan (325.000.000)	
Bidang Indagkop & UMKM					
-					
Bidang Pariwisata					
24	Perlunya untuk menyusun dan menyempurnakan rencana prioritas alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan strategis Kalimantan Timur yang memiliki potensi bisnis pariwisata, baik yang ditujukan untuk pengembangan bagi potensi-potensi unggulan maupun yang ditujukan untuk penciptaan peluang-peluang bisnis pariwisata sekaligus menciptakan ruang usaha bagi masyarakat yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi			* Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan * 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Rakernis Pariwisata)	
25	Perlunya untuk menyusun dan menyempurnakan rencana alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan strategis Kalimantan Timur yang memiliki potensi pariwisata dan budaya yang ditujukan untuk memenuhi aspek apresiasi seni dan budaya yang bernilai tinggi dalam bentuk program pelestarian dan perbaikan situs-situs bersejarah,			[422,619,000]	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	sekaligus menyusun program penggalian potensi bisnis pariwisata untuk kawasan strategis yang terpilih guna penciptaan peluang ekonomi				
26	Perlunya untuk menyusun dan menyempurnakan rencana alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan strategis Kalimantan Timur yang memiliki potensi pariwisata dan budaya yang ditujukan untuk memenuhi aspek kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sekaligus menyusun program penggalian potensi bisnis pariwisata untuk kawasan strategis yang terpilih guna penciptaan peluang ekonomi			*2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Evaluasi LAKIP, LPPD, DPIP, dan Evaluasi Renja)	
27	Adanya sinergi dari ketiga poin di atas yang mengarah pada perencanaan skala prioritas yang bertujuan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi			[277,381,000]	
28	Perlunya untuk menyusun dan menyempurnakan rencana alokasi anggaran yang ditujukan untuk menyusun dan menyempurnakan Dokumen Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Kalimantan Timur Jangka Panjang. Dalam hal ini perlu didukung oleh Ketersediaan Portal Data Potensi PARIwisata dan Budaya Kalimantan Timur sebagai pendukung utama terbangunnya suatu Sistem Informasi Potensi Wisata dan Budaya Kawasan STRategis Kalimantan Timur yang dapat diakses oleh semua calon wisatawan, abik Nusantara maupun Mancanegara, yang ditujukan untuk meningkatkan daya promosi pariwisata dan budaya di Kawasan Strategis Kalimantan Timur			Telah ada dokumen RIPARDA KALTIM (Rencana Induk Pariwisata Daerah Kalimantan Timur) 2013-2023 dan Tahun 2018 ini, Dinas Pariwisata sedang menyusun Rencana Strategis Pariwisata 2018-2023	

Bidang Lingkungan Hidup					
30	Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup harus mempromosikan dan memastikan , bahwa seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur menjalankan praktek pengelolaan tambang yang baik. Praktek pengelolaan tambang yang baik adalah yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar dan daerah., disamping itu juga mampu menekan sekecil-kecilnya resiko dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Tidak	DLH		(DLH) Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Rp.295.000.000	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap perusahaan/swasta dengan cara melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi serta penegakan hukum
		ESDM		(ESDM) Program Rehabilitasi/Reklamasi Lahan Pasca Tambang Rp.571.000.000,-	Dengan melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi tambang di wilayah



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	boleh lagi ada perusahaan tambang yang mencemari sungai dan merusak sistem konservasi tanah dan air, apalagi sampai mmeninggalkan lubang-lubang tambang tanpa direklamasi.				Provinsi Kalimantan Timur
31	Perusahaan tambang juga harus dipastikan tidak mencemari udara daerah sekitar dengan debu atau polusi lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang terarah atas operasi perusahaan tambang secara terbuka dan independen. Harus ada peningkatan jumlah dan kualitas inspektur tambang dan pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup.	DLH		(DLH) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Rp.1.210.000.000	(DLH) Pegawai Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melakukan fungsi pengawasan lingkungan (proper) ke semua perusahaan tambang di Kaltim terutama pada ijin PKP2B dan IUP
		ESDM			(ESDM) Untuk Inspektur Tambang Koordinasinya langsung dibawah kemenESDM
32	Kegiatan pencemaran akibat kegiatan penambangan batubara, sebaiknya tidak hanya terfokus di Areal Kerja dan lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga daerah hilirnya perlu perhatian serius, seperti di Muara Sungai dan Laut lepas tempat dimana ponton pengangkut batu bara memindahkan muatannya ke kapal pengangkut. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran laut akibat jatuhnya batu bara kelaut pada saat proses pemuatan dan limbah/kotoran hasil pencucian ponton yang tidak terawasi. Dampak lain akibat tercemarnya laut antara lain berkurangnya hasil tangkapan nelayan, rusaknya terumbu karang dan sedimentasi batu bara dilaut.	ESDM			(ESDM) pengawasan oleh ESDM terkait pengangkutan batu bara melalui angkutan sungai hanya sampai di Jetty/pelabuhan (Port Site)
		DLH		(DLH) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Rp.1.805.100.000,00	Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi Pemantauan Lingkungan Air Sungai , Air Laut, Udara dan Tanah Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
33	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus lebih serius lagi dalam mengembangkan potensi energi baru terbarukan yang tinggi di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun kemitraan dikalangan swasta dan masyarakat. Limbah biomas dari industri perkebunan dan kehutanan serta limbah organik dari rumah tangga di Kalimantan Timur berpotensi tinggi untuk diolah menjadi tenaga listrik yang dapat membantu peningkatan tingkat elektrifikasi kita yang masih rendah saat ini.	ESDM		(ESDM) Program Diversifikasi Energi Rp.2.100.000.000,00	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2. Pengembangan Bioenergi 3. Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air
Bidang Kehutanan					
34	Dinas Kehutanan harus secara proaktif mempromosikan model pengelolaan hutan lestari termasuk praktek pemalakan dengan dampak rendah. Skema-skema dana karbon perlu digali lebih jauh dan kita dapatkan untuk membangun hutan kita agar lebih baik dan mensejahterakan masyarakat. Industri kehutanan harus direvitalisasi	DISHUT		Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Rp.4.000.010.000	PT. Narkata Rimba telah melakukan model pengelolaan hutan lestari untuk RIL C di Kalimantan Timur
				Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Program Perhutanan Sosial dalam pengelolaan hutan oleh



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
	menjadi industri yang menguntungkan dan memberikan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang bagi masyarakat kalimantan timur. Model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang lestari dan terintegrasi dengan industri kehutanan seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan harus secara serius dikembangkan agar ekonomi pedesaan di Kalimantan Timur dapat bangkit seiring dengan bangkitnya ekonomi di wilayah perkotaan.			dan Perhutanan Sosial Rp.2.560.320.000	masyarakat di Kaltim sampai dengan saat ini Hutan Desa 17 ijin, Hutan Kemasyarakatan 2 ijin, Hutan Tanaman Rakyat 8 ijin, Hutan Adat 1 ijin dan Kemitraan 5 ijin
35	Penanaman hutan Mangrove perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.	DISHUT		(DISHUT) Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir Rp.10,556,100,000	Akan dilakukan penanam Mangrove di Penajam Paser Utara
36	Perlunya perencanaan pengelolaan hutan secara menyeluruh.	DISHUT		(DISHUT) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Rp.4.000.010.000	akan dilakukan kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan oleh Dishut (KALTIM)
37	Perlu lebih intensif dalam pengelolaan DAS.	DISHUT		(DISHUT) Program Pengelolaan DAS dan RHL Rp.1.279.000.000	Akan dibangun Sistem Informasi DAS Berbasis IT dan pelaksanaan Rekonsiliasi/Realisasi keberhasilan penanaman, dokumen peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS dan Dokumen RPDAS
38	Perlu gerakan reboisasi dan rehabilitasi serta pemeliharaan yang efektif terhadap kawasan hutan dan lahan yang terdeforestasi.	DISHUT		(DISHUT) Program Pengelolaan DAS dan RHL Rp.1.279.000.000	Akan dilakukan Reboisasi dan Rehabilitasi di Hutan Rakyat di Kabupaten kukar dan Penajam Paser Utara dan penanaman mangrove di Penajam Paser Utara
39	Peningkatan ekonomi keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup pada kawasan hutan.	DISHUT		(DISHUT) Program Perlindungan dan KSDAE Rp.842.100.000	pemberian bimbingan teknis kepada IUPHHK-HA/HT terkait dengan keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup (Kaltim)
40	Mengintensifkan perlindungan kawasan-kawasan hutan yang berekosistem penting seperti kawasan KARST dll.	DISHUT & DLH		(DISHUT) Program Perlindungan dan KSDAE Rp.842.100.000 (DLH) Program Perlindungan Sumber Daya Alam Rp.635.000.000	identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum (KALTIM)
41	Pengawasan kawasan hutan yang melibatkan pemangku kepentingan (Stakeholder kehutanan)	DISHUT		(DISHUT) Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR) Rp.535.000.000	identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum (KALTIM)



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
42	Penyelamatan Kawasan Hutan yang tersisa dengan memberikan dukungan berupa fasilitas dan pengembangan model-model kelola yang ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan	DISHUT		(DISHUT) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial Rp.2.560.320.000	Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Monitoring Evaluasi, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (KALTIM)
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan					
43	Eksplorasi SDA di Kalimantan Timur telah menyebabkan perubahan ekosistem yang berdampak pada adanya perubahan lingkungan.	(ESDM)		(ESDM) Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang Rp.571.000.000,- Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan Rp.2.500.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya : 1. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi 2. Evaluasi dan Monitoring Kinerja Teknis Pertambangan 3. Penggunaan Efisiensi biodiesel pada perusahaan tambang batubara 4. Pemantauan Perijinan Pertambangan
44	Jumlah cadangan SDA khususnya energi tidak terbarukan semakin menipis hal ini perlu disikapi dengan mengubah paradigma pengelolaan sumber-sumber energi baru terbarukan.	(ESDM)		(ESDM) Program Diversifikasi Energi Rp.2.100.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2. Pengembangan Bioenergi 3. Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air
45	Dalam rangka mendukung Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional, perlu penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	(ESDM)		(ESDM) Program Diversifikasi Energi Rp.2.100.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2. Pengembangan Bioenergi 3. Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air
46	Dengan melimpahnya sumber energi di Kalimantan Timur diharapkan segera membuat perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan.	(ESDM)		(ESDM) Program Diversifikasi Energi Rp.2.100.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2. Pengembangan Bioenergi



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
					3. Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air
47	Dikarenakan kondisi geografis, maka diperlukan pembangkit-pembangkit listrik seperti contohnya PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	(ESDM)		(ESDM) Program Diversifikasi Energi Rp.2.100.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2. Pengembangan Bioenergi 3. Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air
48	Perencanaan pembangunan pembangkit listrik merupakan aspek yang sangat penting untuk diterapkan namun juga harus memperhitungkan mengenai sumber-sumber energi penggeraknya atau bahan bakarnya.	(ESDM)		(ESDM) Program Pengembangan Ketenagalistrikan Rp.1.800.000.000	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah : 1.Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah 2.Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 3.Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Bidang Infrastruktur					
1	Pengadaan perumahan rakyat murah dan layak huni bagi rakyat tidak mampu			Diarahkan pada kegiatan APBN (Kemenpupera) dan melalui Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBD Provinsi)	
2	Pengembangan pengelolaan ketersediaan Air Baku untuk keperluan air bersih dan pertanian			Suplai irigasi pertanian direncanakan fokus di Berau dan Kutai kartanegara	
3	Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan jalan, pembuatan marka dan drainase. Prioritas penganggaran ditujukan pada proyek-proyek MYC pembayaran eskalasi program yang disusulkan melalui reses & hearing serta pengembangan Kawasan terpadu pusat pengembangan desa (KTP2D).			-	
4	Peningkatan jalan dan jembatan di ruas jalan provinsi dan ruas jalan kab/kota yang belum tertangani.			Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
5	Pembangunan Infrastruktur difokuskan pada peningkatan jalan yang menghubungkan daerah yang selama ini terisolasi. Perlunya alokasi anggaran belanja dan alokasi bantuan keuangan untuk pemeliharaan jalan & jembatan.			Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

NO	USULAN KEGIATAN	LOKUS	PAGU	SINKRONISASI DENGAN RKPD DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH	CATATAN
6	Perlunya perbaikan infrastruktur jaringan jalan, pasar dan pembangunan terminal di daerah pertanian melalui bantuan keuangan.			Diarahkan pada kegiatan bantuan keuangan provinsi.	
7	Mendukung percepatan pembangunan jembatan Kembar dengan konstruksi yang disederhanakan terkait dengan efisiensi anggaran.	Samarinda		Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
8	Mendukung penyelesaian Jembatan Pulau Balang dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD Provinsi.	Balikpapan - PPU		Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
9	Percepatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dari Kab. Kutai Barat ke Kab. Mahakam Ulu.	Kubar - Mahulu		Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
10	Peningkatan Jalan dari Kab. Kutai Kartanegara ke Kab. Kutai Barat.	Kukar - Kubar		Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
11	Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah perbatasan.	Mahulu		Diprogramkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan.	
12	Penanganan banjir di beberapa titik yang cukup vital			Penanganan Banjir pada RKPD Kaltim tahun 2019 direncanakan di Kota Samarinda & Bontang	
13	Optimalisasi pengelolaan dna pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun			Dialokasikan melalui UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPPERA	
14	Pembangunan check-dam guna mengendalikan sedimentasi pada sungai-sungai utama/induk			APBN / Bantuan Keuangan	
15	Perencanaan, pembangunan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan manajemen drainase perkotaan			APBN / Bantuan Keuangan	
16	Pembangunan pengaman pantai untuk mencegah abrasi dari gelombang air laut			Tahun 2019 rencana dilaksanakan di Balikpapan dan PPU	
17	Penyediaan air bersih yang mengambil air bawah tanah dengan cara membangun sumur bor untuk daerah yang jauh dari sumber mata air permukaan/sungai			Kegiatan ini diarahkan pada bantuan keuangan.	



LAMPIRAN
PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2019. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,12	75,30
2.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,36	12,00
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,75	65,50
3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,91	6,54
4.	Angka Harapan Hidup (%)	73,70	74,02
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	2,5 ± 1
6.	Tingkat kemiskinan (%)	6,19	6,00
7.	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	19,07	20,30
8.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran (%)	5,3	5
9.	Jumlah kawasan strategis yang terhubung		2
10.	Kontribusi sub sektor perkebunan (%)	4,47	4,5
11.	Kontribusi sektor perikanan (%)	1,63	1,6
12.	Rasio pemenuhan daging sapi lokal (%)	25	27,6
13.	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras (%)	61,52	65,00
14.	Indeks Gini	0,333	0,329
15.	Indeks Williamson	0,48	0,45
16.	Inflasi (%)	3,15	4 ± 1
17.	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	28,20	42
18.	Jalan dalam kondisi baik (%)	35,69	56,89
19.	Rasio elektrifikasi (%)	84,07	85,00
20.	Rumah tangga yang terlayani Air minum perpipaan (%)	58	60
21.	IKLH	84	84
22.	Penurunan emisi GRK (juta ton CO ₂ Eq)	15,15	12,16
23.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,15	85



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2019
24.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	2

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan capaian pembangunan tahun 2017/2018 dan berisikan data indikator berupa target/kondisi akhir yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	97,43	98
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	108,07	114
3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%)	68,23	75
4	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA (%)	99,51	88
5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB (%)	79,58	89,50
6	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB (%)	91,46	98
7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA/SMALB (%)	18,48	18,50
8	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	22,67	23,50
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,75	65,50



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
10	Persentase jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi (Kualifikasi guru) - SMA (%) - SMK (%)	98,21 94,46	99,21 95,46
11	Angka Harapan Lama Sekolah (%)	13,49	14
12	Rata-rata Lama Sekolah (%)	9,36	12
13	Populasi beresiko yang dilakukan skrining	-	80
14	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral (%)	90.00	99.00
15	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0.40	<1
16	Case Notifikation Rate	153.00	100
17	Persentase keberhasilan pengobatan TB (%)	87	90
18	Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	48	55
19	Jumlah Kematian Bayi (orang)	565	560
20	Jumlah Kematian Balita (orang)	73	70
21	Jumlah Kematian Ibu (orang)	103	90
22	Prevelansi kurang gizi pada Balita	19.3	17
23	Prevalensi Stunting pada Balita	30.6	27
24	Besaran UMP (Rp/bulan)	2.543.331	2.600.000
25	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan (%)	100	100
26	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (orang)	30	40
27	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif (Kepala Keluarga)	480	575
28	jumlah wirausaha baru (WUB)	1.200	1.000
29	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	239.710	271.339
30	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	63.573	65.500
31	Peningkatan produksi daging (%)	2,9	3,0
32	Peningkatan produksi telur (%)	2,3	3,0
33	Produksi hijauan pakan ternak (ton berat kering)	30.828	32.325
34	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	146.045	157.743
35	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (orang)	1.015	1.015
36	Jumlah Produksi Padi (GKG) [Ton]	400.040	510.000
37	Jumlah Kawasan Pertanian (Ha)	1.000	24.000
38	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,16	100
39	1. Peningkatan populasi ternak (%) :		
	- Sapi (%)	3.5	3.5
	- Kerbau (%)	1.0	1.0
	- Kambing (%)	3.5	3.5
	- Babi (%)	3.5	3.5
	- Ayam Buras (%)	3.0	3.0
40	2. Service per Conception (S/C)	2	1,8



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
41	3. Produksi biogas yang dihasilkan (m3)	-	45
42	Pertumbuhan industri olahan (%)	3,47	5,69
43	Produktivitas komoditas perkebunan Kelapa sawit (ton/ha)	16,69	18,32
44	Produktivitas komoditas perkebunan karet (ton/ha)	1,27	1,33
45	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa (ton/ha)	0,80	0,83
46	Produktivitas komoditas perkebunan kakao (ton/ha)	0,50	0,52
47	Produktivitas komoditas perkebunan lada (ton/ha)	0,98	1,0
48	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Triliun)	28	42
49	Luas kebun sawit (juta Ha)	1.192.342	1.314.557
50	Pertumbuhan investasi industri (%)	20	15
51	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	145.678	145.878
52	Rasio ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis (%)	150	150
53	Volume usaha kawasan industri (Triliun)	3,65	3,75
54	Jumlah Rumah Tangga miskin yang memiliki Rumah Layak Huni (rumah tangga)	1.586	1.788
55	Kapasitas air baku (l/detik)	7.113	7.693
56	Rasio elektrifikasi (%)	79,5	80,5
57	Persentase desa berlistrik (%)	97,5	98
58	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	96	100
59	Penyediaan jalan dengan kapasitas daya mampu diatas 10 ton (km)	155,57	215,88
60	Kuantitas komoditas (ton) dan penumpang (orang)	324.681.818 & 11.016.550	Ganti nomenklatur
61	Tingkat kemantapan jalan (%)	51,66	56,89
62	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi baik (panjang jalan dalam kondisi baik) (km)	255,26	315,26
63	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	42,28	Ganti nomenklatur
64	Persentase peningkatan penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan pemanfaatan informasi public (%)	85	95
65	Persentase penyebarluasan informasi kepada masyarakat (%)	76	85
66	Terwujudnya Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas	1	6
67	Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan KKN (%)	100	100
68	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu / Pilkada (%)	57,16 (Tahun 2015)	77,50



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
69	Terwujudnya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur (%)	96	100
70	Indeks kepuasan masyarakat (%)	80,56	85
71	Jumlah KPH (unit KPH)	8	20
72	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	40.901,85	40.987
73	Persentase penurunan beban pencemaran (%)	100	100
74	Jumlah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (ton/juta US\$)	1.515	12.181.570
75	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	73	tidak ada lagi
76	Persentasi emisi yang diturunkan dari BAU (%)	31	33
77	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima (Tokoh Kalpataru)	1	2
78	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu (unit DAS)	11	15
79	Persentase kapasitas produksi listrik yang dihasilkan dari sumber energi alternative (%)	100	100
80	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik (desa)	974	981
81	Luas genangan banjir yg tereduksi (Ha)	378	318
82	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)	73,48	74,28

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun pertama perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam periode 2018-2023. Sebagai pelaksanaan tahun pertama, RKPD Tahun 2019 harus mampu menjadi pondasi atau langkah awal yang tepat untuk selanjutnya menjadi tangga menuju pelaksanaan tahun kedua dan seterusnya. Dengan Tema “ **Perkuatan Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hliriasasi Industri**” mengindikasikan perencanaan pembangunan tahun 2019 dititikberatkan pada penguatan aspek-aspek daya saing investasi yaitu : (1) infrastruktur,(2) kuantitas dan kualitas tenaga kerja, (3)kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah (pertanian dalam arti luas) yang berorientasi pada permintaan /peluang pasar, serta (4) kemudahan berusaha menyangkut proses perijinan invetasi.

Penyusunan RKPD tahun 2019, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government spending utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran RKPD tahun 2019.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan

daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2019 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPD Tahun 2019 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efiseinsi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019;
3. RKPD tahun 2019 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2019 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2019;
5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2019, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2019 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020;



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Marinda, 26 Juni 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur